



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

Ubaidillah

Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia

REAL
NEWS

FAKE
NEWS

Buku ini tidak dapat dipertanggungjawabkan

Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2024 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ubaidillah

Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2024 Ubaidillah

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia/Ubaidillah–Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

xx + 116 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-8372-60-7 (*e-book*)

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Propaganda Politik | 2. Politik Hoaks |
| 3. Bahaya Disinformasi | 4. Otoritas Media Massa |
| 5. Politik Pencitraan | 6. Politik Jokowi |

320.014

Editor Akuisisi : Anggy Denok Sukmawati
Copy editor : Mulyani
Proofreader : Siti Mutiara Fitry
Penata isi : Hilda Yunita
Desainer Sampul : Hilda Yunita

Cetakan Pertama : Maret 2024



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 Penerbit BRIN

 @penerbit_brin

 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Pengantar Penerbit.....	xi
kata pengantar	xiii
Prakata	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 DISINFORMASI SEBAGAI WACANA.....	5
A. Politik Hoaks sebagai Produksi Hoaks Politik	8
B. Politik Hoaks sebagai Praktik Pelabelan	13
C. Analisis Wacana Kritis sebagai Metode.....	16
BAB 3 REPRESI, INDUSTRIALISASI, DAN POLITISASI PERS INDONESIA.....	19
A. Politik Pencitraan dan Disinformasi	32
B. Populisme Termediasi.....	34
BAB 4 GENEALOGI WACANA BAHAYA DISINFORMASI	49
A. Penanganan Disinformasi: dari Cek Fakta sampai Pemutusan Akses Internet	53
B. Polisi dan Skandal Informasi	59
C. Disinformasi dan Konflik.....	67

BAB 5	POLITIK HOAKS DALAM TIPOLOGI DEMOKRASI	
	<i>ILLIBERAL</i> DI INDONESIA	75
A.	Dari Demokrasi <i>Illiberal</i> ke Pembangunan Perdamaian	
	<i>Illiberal</i>	79
B.	Catatan Penutup.....	89
Referensi	93
Tentang penulis	113
Indeks	115

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Klasifikasi Penyimpangan Informasi.....	11
Gambar 2.2	Lapisan Konteks dari Politik Pelabelan Hoaks.....	18
Gambar 3.1	Berita Partai Politik selama Kampanye Pemilu 1987 (dalam %)	22
Gambar 3.2	Distribusi Artikel Mengenai Partai Politik di Jakarta Post 1999–2004.....	23
Gambar 3.3	Sampul Film ‘Di Balik Frekuensi’	25
Gambar 3.4	Kata Pencitraan pada Google Trends.....	33
Gambar 3.5	Kata Pencitraan dengan Topik Politik pada Google Trends	33
Gambar 3.6	Hoaks Jokowi Anti-Islam	38
Gambar 3.7	Demonstran membawa poster menolak Metro TV dan Kompas.....	42
Gambar 3.8	Pemberitaan Bersentimen Rasial	44
Gambar 4.1	Cuplikan Artikel Tabloid Obor Rakyat.....	50
Gambar 4.2	Perusakan Kantor Perwakilan TV One Yogyakarta.....	51
Gambar 4.3	Presiden Jokowi mengklarifikasi hoaks PKI mengenai dirinya.....	52
Gambar 4.4	Pelabelan Hoaks Kerusakan Papua	54
Gambar 4.5	Pelabelan Hoaks RUU Cipta Kerja.....	56
Gambar 4.6	Pelabelan Hoaks.....	58
Gambar 4.7	Protes Masyarakat Daring.....	62

Gambar 4.8	Viralitas menjadi alat politik	64
Gambar 4.9	Unggahan Polsek Srandakan	64
Gambar 4.10	Meme Kasus Sambo di Twitter	65
Gambar 4.11	Anggaran Kepolisian 2010-RAPBN 2022.....	66
Gambar 4.12	Meme dan Unggahan tentang Tukang Bakso yang Membawa <i>Walkie Talky</i>	67
Gambar 5.1	Cuitan Herry Subiakto di Twitter yang Terklarifikasi Keliru	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perolehan Lima Besar Suara Pemilihan Legislatif 2004...24
Tabel 3.2	Figurasi Jokowi dalam Berita Masuk Gorong-gorong.....29
Tabel 3.3	Daftar Media Massa yang Berelasi Ekonomi-Politik dengan Jokowi.....35
Tabel 4.1	Periode Rumor di Indonesia Pascareformasi.....73

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENGANTAR PENERBIT

Di era digital saat ini, masyarakat perlu sangat berhati-hati dalam menerima kiriman informasi, baik lewat situs berita maupun lewat layanan pesan instan. Tidak jarang informasi yang dikirimkan tadi ternyata adalah sebuah bentuk disinformasi atau hoaks yang sengaja disebarluaskan untuk memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Kemudahan memproduksi dan menyebarkan informasi lewat media sosial membuat masyarakat diserbu dengan limpahan berita hoaks. Salah satu peristiwa penting yang memperlihatkan derasnya aliran berita hoaks di masyarakat bisa kita amati pada peristiwa Pemilu Tahun 2019. Menurut Kominfo, berita hoaks seputar Pemilu 2019 tidak hanya terkait tokoh politik tetapi juga terkait lembaga-lembaga negara penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Pada bulan Maret 2019, Kominfo merilis artikel yang menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai Februari 2019 terjaring sekitar 771 konten hoaks. Dari jumlah itu, topik politik mendominasi isi dari konten hoaks tersebut.

Berangkat dari keresahan penulis melihat peristiwa tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 untuk melihat lebih detail bagaimana dinamika informasi yang berkembang di masyarakat kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan hoaks—khususnya hoaks dalam bidang politik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketika naskah buku ini masuk di tahun 2023, Penerbit BRIN sangat tertarik terhadap topik yang diangkat oleh penulis dalam buku ini karena isu seputar hoaks dalam bidang politik merupakan isu yang sangat menarik untuk digali lebih dalam dari sisi akademis. Harapannya, analisis akademis terhadap isu tersebut bisa memberikan panduan bagi masyarakat untuk bisa memahami lebih baik perputaran hoaks serta membuat masyarakat bisa bersikap lebih bijak dalam menghadapi hoaks yang muncul, khususnya hoaks di bidang politik. Oleh karena itu, Penerbit BRIN sangat menyarankan buku ini untuk bisa dibaca oleh masyarakat dari semua kalangan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini, mulai dari penulis, Tim Penerbitan Ilmiah Penerbit BRIN, maupun kepada pembaca yang nantinya akan menikmati buku ini.

Semoga penerbitan buku ini bisa membangkitkan naluri berpikir kritis di dalam masyarakat, khususnya dalam menghadapi terjangan informasi yang saat ini sangat mudah diperoleh melalui berbagai media sosial.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah YME atas terbitnya buku berjudul *Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia*. Buku ini sangat menarik karena ditulis oleh seorang ahli linguistik yang melakukan pekerjaan akademiknya di kelompok riset yang mengembangkan riset media dan masyarakat digital. Dalam buku ini, fenomena jurnalistik dianalisis dengan pendekatan multidisiplin. Analisis linguistik yang dilakukan untuk melihat fenomena komunikasi politik sangat menarik, di antaranya adalah pergeseran penanda populisme yang semula menggunakan kata rakyat menjadi umat. Sebagai anggota kelompok riset yang mengkaji masalah media dan masyarakat digital, penulis aktif melakukan riset tentang disinformasi sejak tahun 2020.

Beberapa tahun terakhir, kata hoaks atau disinformasi menjadi sebuah kata yang populer. Popularitas tersebut terjadi seiring peningkatan kuantitas disinformasi yang tersebar di berbagai platform. Disinformasi sering dikaitkan dengan lanskap komunikasi yang sedang berubah. Perkembangan sosial media membuat distribusi informasi mudah dan murah karena tanpa adanya *barrier to entry* yang salah satunya adalah kapital. Kondisi tersebut membuat *information overload*. Implikasi lain adalah adanya perubahan tata informasi dunia baru di mana produksi informasi tidak hanya didominasi oleh negara-negara di belahan utara.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kemudahan dalam memproduksi informasi ini memiliki beberapa konsekuensi. European Commission (2018) menyebut bahwa teknologi baru telah mendisrupsi *gatekeeper* tradisional seperti pemerintah dan institusi media yang mengontrol penyebaran informasi. Di era media lama, dua institusi tersebut dituding sebagai penghambat berkembangnya demokratisasi media, tetapi kini keberadaan *gatekeeper* mulai diperbincangkan di kalangan akademik. Penyebaran konten yang kurang berkualitas dan banyaknya disinformasi disebut karena absennya *gatekeeper*.

Disinformasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Disinformasi merupakan fenomena global. Disinformasi sering dikaitkan dengan meningkatnya populisme. Perjuangan yang dilakukan kelompok ini mengatasnamakan rakyat jelata dan mempertentangkan dengan elit yang sering dianggap korup (Mudde, 2004). Disinformasi juga sering dikaitkan dengan teori konspirasi. Hal ini disebabkan karena dalam gerakannya, kaum populis sering menggunakan teori konspirasi untuk mendelegitimasi lembaga yang sudah mapan (Bergmann, 2018). Difasilitasi oleh algoritma, konten-konten sensasional ini mudah tersebar karena jumlah kliknya banyak.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil disinformasi. Konten disinformasi yang paling banyak adalah tentang kesehatan dan politik. Disinformasi kesehatan terkait pandemi jumlahnya banyak, di antaranya adalah masalah vaksin dan pengobatan herbal. Disinformasi di bidang politik tergolong cukup masif menjelang pemilihan presiden 2019. Pada saat pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2020, jumlahnya menurun. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan. Situasi yang terjadi menjelang 2019 diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar berpikir lebih dewasa dalam menghadapi disinformasi.

Terdapat banyak hal yang menarik dalam buku ini. Salah satu kasus yang diangkat adalah disinformasi dalam pemilihan presiden Amerika 2016 dengan kandidat Donald Trump dan Hillary Clinton. Peristiwa ini menandai penggunaan disinformasi di bidang politik dengan jumlah produksi yang banyak. Peristiwa mirip seperti ini

juga terjadi saat pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Bedanya adalah disinformasi di Amerika mampu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pers secara lebih tajam dibandingkan disinformasi di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa akibat disinformasi tersebut, masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan terhadap pers lebih baik daripada masyarakat Amerika.

Politik pencitraan banyak digunakan oleh kandidat pada pemilihan kepala daerah maupun presiden untuk menarik simpati pemilih. Sayangnya, dalam memproduksi citra tersebut, para kandidat kadang menggunakan misinformasi dan disinformasi. Berdasarkan pada berbagai latar belakang di atas, penulis mengajak pembaca untuk memikirkan bagaimana “merebut kembali otoritas informasi publik”.

Buku ini mampu mengisi kekosongan mengenai referensi dalam bentuk buku tentang disinformasi yang dilengkapi dengan kasus-kasus di Indonesia. Pengetahuan yang ada di buku ini penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan yaitu akademisi, mahasiswa, praktisi politik dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, selamat membaca buku yang menarik ini.

Dr. Nina Widyawati, M.Ikom
Peneliti Komunikasi Politik, BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA

Dalam berbagai kesempatan, penulis mendengarkan kuliah umum, sambutan pejabat, maupun diskusi pakar di televisi perihal fenomena disinformasi di era internet ini. Selain potensi bahaya, solusi meningkatkan literasi masyarakat juga menjadi poin utama. Penulisan buku ini didasari oleh adanya perasaan sangsi terhadap klaim-klaim tersebut. Bukan karena klaim tersebut pasti salah, tetapi penulis merasa bahwa klaim itu perlu dilengkapi. Alih-alih tergesa-gesa mengarahkan jari telunjuk ke masyarakat karena gagap bahkan gagal mengonsumsi informasi secara benar, jauh lebih arif memahami mengapa masyarakat memalingkan muka dari sumber informasi otoritatif dan beralih menghadap sumber alternatif.

Rasa sangsi tersebut difasilitasi oleh Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN dengan pelibatan penulis dalam riset penanganan disinformasi dan keamanan siber yang menjadi salah satu fokus Prioritas Riset Nasional (PRN). Riset berlangsung sejak 2020 saat masih bernaung di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sampai berjalan dalam naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudahan dan dukungan administratif lembaga sangat dirasakan penulis, baik saat dipimpin oleh Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, Prof. Ahmad Najib Burhani, maupun Dr. Lilis Mulyani.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam pelaksanaan riset ini, penulis difasilitasi dengan akses literatur, diskusi terpumpun dengan para praktisi dan pakar komunikasi media, sampai penelitian lapangan ke Kabupaten Sumbawa dan Mataram pada 2021 dan 2022. Oleh karena itu, penulis berhutang terima kasih kepada tim riset ini: Dr. Nina Widyawati yang mengoordinatori, Prof. Widjajanti M. Santoso, Dr. Ikbal Maulana, Mbak Ana Windarsih, Mas Ibnu Nadzir, Mas Henry Tondo, Arief Hartanto, dan Al Araf, untuk diskusi-diskusi yang menyenangkan dan menyegarkan. Pada tahap akhir penyelesaian buku ini, penulis terlibat diskusi yang cukup alot dengan Adit (Bondit) mengenai bagaimana buku ini dihadirkan ke pembaca. Judul buku yang sekarang hadir adalah salah satu hasil diskusi tersebut. Diskusi tersebut telah membuka ruang kemungkinan bagi penulis untuk memikirkan lagi apa yang telah ditulis sebelumnya.

Dua pengulas anonim buku ini telah memberikan komentar yang memungkinkan penulis menyusun buku sebagaimana yang ada sekarang. Proses perbaikan dari catatan para pengulas ini memberikan stimulan bagi penulis untuk mengembangkan perspektif lebih jernih dari sebelumnya. Oleh karena itu, penulis berhutang terima kasih kepada para pengulas ini. Terima kasih pula untuk Mbak Anggy Denok Sukmawati, editor akuisisi, yang sangat membantu dari awal penulis mengirimkan naskah sampai hadir di hadapan pembaca.

Nurul Fatma Subekti tak hanya mendukung dan menopang sebagai istri. Ucapan terima kasih pun patut diberikan sebagai orang pertama yang membaca naskah ini dan menyunting naskah sampai akhir. Buku ini menjadi kado kecil untuk Praba Wungu Arumdalu yang baru saja hadir di tengah keluarga kecil penulis. Ide dasar yang merajut tulisan-tulisan pendek penulis yang akhirnya dikembangkan menjadi buku ini justru muncul saat sedang memangku dia tidur. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi!

Buku ini mustahil dituntaskan tanpa dukungan dan kontribusi banyak pihak. Namun, pada akhirnya tetap penulis yang bertanggung jawab atas segala isi buku ini.

Bogor, November 2023

Ubaidillah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PENDAHULUAN

Kabar bohong adalah gejala dari kekuasaan monopolistik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unaccountable monopoly power*) dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi (Pickard, 2020).

Motivasi awal penulisan buku adalah ketidakpuasan dalam melakukan pencarian literatur di Google Scholar mengenai hoaks di Indonesia. Tiga halaman pertama dari hasil pencarian dengan kata kunci hoaks sangat sedikit memunculkan karya dalam bahasa Indonesia yang membahas secara mendalam interelasi hoaks dan kekuasaan.

Karya yang ditulis Juditha (2019) sebenarnya dapat masuk dalam kategori pembahasan hoaks dan kekuasaan karena menggunakan konsep *agenda setting* untuk membahas fenomena hoaks. Sebagai konsep yang biasa digunakan untuk mengkaji kerja media massa (McCombs & Shaw, 1972), *agenda setting* memiliki pengetahuan latar belakang bahwa agenda tersebut ditetapkan redaksi. Pada tingkat pertama, redaksi berdiri sebagai kekuasaan yang berwenang memformulasi informasi di media massa. Pada tingkat lanjutan, analisis bisa menyentuh sisi relasi ekonomi-politik yang memengaruhi sebuah pembingkaihan peristiwa dalam berita. Pembahasan hoaks dengan konsep *agenda setting* memiliki tantangan metodologis dan

konseptual untuk bisa menelusuri dan menunjukkan rupa kekuasaan yang menetapkan agenda dari persebaran hoaks di Indonesia, terutama ketika masa pemilihan umum. Akhirnya, penelitian ini menyodorkan simpulan bahwa ‘*agenda media sosial tentang hoaks dibentuk oleh para pengguna media sosial itu sendiri*’ (Juditha, 2019):

Simpulan Juditha (2019) tersebut tetap perlu dilengkapi bahwa pembahasan hoaks beriringan dengan konsep pendengung (*buzzer*) baik yang bekerja karena transaksi ekonomi seperti yang dibahas oleh Gunawan dan Ratmono (2020) maupun dengan individu yang mendeklarasikan diri sebagai pendengung secara sukarela (Pambudi et al., 2021). Pendengung ini berada dalam relasi hierarki sehingga lebih terang dimensi kekuasaan yang melingkupi produksi dan sirkulasi hoaks di media sosial. Masifnya penyebaran hoaks tidak terbayangkan berada di tingkat seperti sekarang jika hanya karena dibentuk oleh pengguna media sosial semata.

Harus diakui, dalam kajian mengenai produksi dan penyebaran hoaks secara terkoordinasi, secara metodologis sulit membuktikan siapa aktor intelektual dan finansialnya. Gunawan dan Ratmono (2020) yang mengulas Saracen sebagai sindikasi yang memproduksi dan menyebarkan konten kebencian dan negatif di internet, termasuk hoaks, hanya menyebut bahwa mereka bekerja atas alasan transaksi ekonomi tanpa menunjuk hidung siapa pemesannya tersebut. Saracen bernasib sama seperti tabloid *Obor Rakyat* yang menggegerkan pemilihan presiden 2014. Hanya pelaku teknis yang dapat diungkap. Jaringan kekuasaan produksi dan penyebaran hoaks masih bersifat samar.

Meski bukan alasan utama, kesulitan metodologis ini yang menjadi salah satu pertimbangan penulis memfokuskan kajian tentang interelasi hoaks dan kekuasaan dengan fenomena politik pelabelan hoaks di Indonesia. Pertimbangan utama pengambilan fokus tersebut tetap bersandar dari pengamatan dinamika politik Indonesia yang kerap diwarnai leksikon hoaks sebagai jalan keluar dari kemelut relasi negara dan rakyat dalam berbagai isu. Fenomena hoaks digital tidak disangkal memiliki potensi bahaya. Riset lain yang dilakukan penulis

mengenai hoaks dan konflik di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengonfirmasi keberadaan potensi hoaks dapat menjadi salah satu pemicu kerusuhan. Namun, praktik pelabelan hoaks secara monolitik pun tidak kalah membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ekosistem informasi publik, buku ini ditulis dengan meneliti dua aktor dominan dalam ekosistem tersebut, yaitu media massa dan negara. Dua aktor tersebut memiliki basis kekuasaan masing-masing yang tidak dimiliki masyarakat umum. Motivasi lainnya, buku ini ditulis untuk mengisi kesenjangan literatur akademik berbahasa Indonesia yang mendalami kajian hoaks dan kekuasaan.

Data untuk penulisan buku ini diperoleh dari pengamatan secara digital dari berbagai pihak yang terklasifikasi dalam dua kategori aktor tersebut. Data kontemporer tersebut direfleksikan ke belakang untuk menelisik hubungan negara dan media massa sejak era Orde Lama hingga sekarang. Oleh karena itu, buku ini ditulis dengan menggunakan metode analisis wacana historis yang diperkenalkan Ruth Wodak. Penjelasan konseptual dan metodologis selengkapnya diuraikan pada Bab II.

Buku ini menawarkan diskusi mengenai disinformasi dengan melihat sebagai proses sosial yang memiliki jangkar historis dan menjadi arena perebutan legitimasi kebenaran informasi publik oleh negara dan media. Buku ini dapat dilihat sebagai penilaian prakondisi yang membuat fenomena disinformasi dapat marak terjadi. Penilaian ini dilakukan mengikuti faktor-faktor yang memengaruhi tingkat resiliensi suatu negara terhadap disinformasi yang salah satu faktornya adanya polarisasi politik, selain faktor ketidakpercayaan terhadap media, belanja iklan yang besar, dan jumlah pengguna media sosial yang besar (Humprecht et al., 2020). Kabar bohong adalah gejala dari kekuasaan monopolistik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unaccountable monopoly power*) dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi (Pickard, 2020). Pelaku kekuasaan monopolistik itu bisa saja negara, media massa, media sosial atau bahkan aliansi para pelaku dalam membentuk kartel informasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hal demikian membuat disinformasi atau hoaks menjadi persoalan struktural dan solusi penanganannya pun perlu reformasi struktural.

Untuk mempertajam fokus kajian ini, buku ini membatasi pembahasan mengenai penanganan disinformasi digital di Indonesia yang dilakukan oleh media massa dan negara. Penyusunan bab dalam buku ini terbagi dalam dua kategori konteks, yaitu Bab II–III termasuk analisis konteks dimensi situasional dari politik pelabelan hoaks, dan Bab IV–V merupakan lapis konteks sosio-politik historis. Bab II menyajikan uraian konsep mengenai hoaks politik, politik hoaks, dan metode analisis wacana kritis historis yang digunakan. Pembahasan Bab III diarahkan untuk mendeskripsikan kembali interaksi dan relasi antara media massa dan negara sejak era Orde Baru hingga pascareformasi yang diperantarai administrasi dan kapital hingga membentuk representasi populis dan sikap resistansi massa terhadap media massa. Pembahasan Bab IV berkisar genealogi wacana disinformasi atau hoaks yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan rangkaian tindakan penanganan hoaks oleh beragam institusi negara. Bab IV mendeskripsikan pula trajektori kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia sebagai pembandingan dari genealogi narasi bahaya hoaks. Bab V menunjukkan upaya negara dan media massa merebut kembali otoritas mereka atas informasi publik yang berkelindan dengan perkembangan *illiberal* dari demokrasi Indonesia. Bab V pun berupaya mengidentifikasi tipologi penanganan hoaks atau disinformasi digital di Indonesia sekarang dengan tipologi pembangunan perdamaian *illiberal* yang digagas Smith (2014; 2020).

Bab 2

DISINFORMASI SEBAGAI WACANA

Beragam peristiwa terjadi di masa pemilihan presiden Indonesia 2014 yang menantang kewibawaan pers Indonesia. Mulai dari penyebarluasan berita dengan sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dengan sumber berita yang tidak akuntabel, penyebarluasan berita yang tidak berlandaskan asas keadilan dan keberimbangan, pengepungan dan perusakan kantor berita oleh massa yang tidak terima calon presiden usungannya disebut antek Partai Komunis Indonesia, hingga penerbitan surat peringatan kepada seorang wartawan yang menolak perintah untuk menulis berita dengan sumber berita tidak akuntabel oleh pemimpin redaksinya¹. Belakangan diketahui pemimpin redaksi tersebut masuk dalam gerbong tim sukses salah satu kandidat presiden dan mengeluarkan surat peringatan dalam masa cutinya sebagai pemimpin redaksi. *Harian Jakarta Post* pun menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap Jokowi yang menjadi calon presiden 2014 dalam editorialnya *'Endorsing Jokowi'*. Polarisasi masyarakat disebut sebagai salah satu imbas pemilihan presiden 2014. Namun, tidak hanya masyarakat, pers Indonesia pun menunjukkan gejala serupa.

1 Arya Sinulingga, Pemimpin Redaksi stasiun televisi RCTI memberikan surat peringatan ketiga (SP3) kepada produser RCTI, Raymond Rondonuwu yang mempertanyakan berita tentang pertemuan anggota KPU dengan tim sukses calon presiden yang diduga membocorkan materi debat capres. Arya Sinulingga menjadi direktur komunikasi dan media tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

Salah satu tujuan buku ini adalah untuk menelusuri imbas jatuh bangun pers Indonesia sebagai salah satu agensi ekosistem informasi publik terhadap maraknya fenomena disinformasi di era digital yang mendeliberasi produksi dan distribusi informasi sekaligus respons pemerintah menangani persoalan disinformasi ini. Buku ini mengandalkan asumsi yang berkebalikan dengan Colomina et al. (2021) yang menyebut disinformasi berdampak buruk terhadap institusi demokrasi, seperti pers. Disinformasi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pers. Polarisasi pers saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 yang mempertarungkan Donald Trump dan Hillary Clinton dapat menjadi contoh. Terlebih Donald Trump menggunakan strategi pelabelan *'fake news'* untuk mendelegitimasi pers yang berseberangan dengannya (Lakoff & Duran, 2018). *'Fake news'* menjadi landasan untuk memercayai kebenaran alternatif yang disembunyikan media massa. Kepercayaan publik Amerika Serikat kini hanya di angka 29, lebih rendah daripada Indonesia yang berada di angka 39 dalam survei Digital News Report 2021 yang dilakukan Reuters Institute for Study of Journalism.

Angka kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita berada di tingkat medio di antara daftar negara-negara Asia Pasifik. Buku ini justru berangkat dari asumsi bahwa ekosistem pers Indonesia menjadi kondisi pendahuluan yang berkontribusi terhadap maraknya disinformasi di era internet. Fenomena tsunami informasi yang dibawa oleh internet menemukan faktor pendukungnya untuk membuat masyarakat memproduksi, mencari, dan memercayai informasi alternatif yang tidak diberitakan media. Memahami pola produksi dan konsumsi dalam hukum gerak sentrifugal dan sentripetal membuat kita mafhum bahwa sebelum orang mencari pusat informasi baru, mereka terlebih dahulu meninggalkan pusat-pusat informasi lama, yaitu media maupun negara.

Dengan demikian, buku ini mengulas wacana bahaya disinformasi sebagai bagian dari perkembangan ekosistem informasi publik di Indonesia. Oleh karena itu, riset dalam rangka penulisan buku ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktur yang

menempatkan media massa dan negara sebagai subjek penelitian. Wacana kontra-disinformasi yang diproduksi kedua aktor ini menjadi data utama. Data utama ini dikomparasi pula secara historis untuk melihat trajektori masing-masing subjek dalam mengelola informasi publik. Proses ini signifikan dilakukan untuk memahami proses gerak sentrifugal orang meninggalkan pusat-pusat informasi lama dan gerak sentripetal mencari pusat informasi baru. Ada trajektori struktural yang berimbas terhadap *frame-circuits* seseorang (Lakoff & Duran, 2018) yang akhirnya menentukan pilihan keputusan saat seseorang menginterpretasi sebuah pesan, antara menerima begitu saja, menegosiasikan, dan menolak sama sekali kebenaran pesan tersebut (Hall, 1973). Kepercayaan terhadap sumber pesan menjadi bagian penting dari salah satu pilihan mekanisme tersebut, misalnya dicontohkan penolakan kebenaran berita dan peliputan dari Metro TV oleh kelompok islamis. Sikap tersebut muncul disebabkan anggapan bahwa sikap stasiun televisi tersebut terhadap gerakan yang dilakukan dipengaruhi aliansi ekonomi-politik antara Surya Paloh sebagai pemilik stasiun televisi dan salah satu ketua partai pendukung Presiden Joko Widodo.

Secara praktis, pembahasan dalam dimensi struktural ini menyumbang diskusi bahwa penanganan hoaks di Indonesia tidak hanya mengandalkan sisi hilir yang menysasar pendidikan publik dalam mengenali hoaks melalui literasi digital, tetapi dapat mempertimbangkan juga untuk perbaikan sisi hulu, yaitu peningkatan kualitas kelembagaan secara demokratis yang mengusung transparansi, ruang dialogis, dan mampu menyeimbangkan kepentingan publik di tengah tekanan ekonomi bisnis media dan pergulatan politik praktis dalam pengelolaan negara. Hal demikian merupakan bagian dari proses adaptasi di era digital dalam mendeliberasi saluran publik, sehingga tiap-tiap orang dapat memproduksi informasi publik. Jaringan sosial yang terbentuk di media sosial, misalnya, bisa berubah menjadi pasar gelap pertukaran informasi dan hoaks, bila informasi otoritatif tidak lagi dipercaya oleh publik. Jaringan sosial ini menjadi

pusat informasi baru yang menggantikan pusat informasi publik yang lama (media dan negara).

Hoaks menurunkan kualitas demokrasi karena menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara (Gunawan & Ratmono, 2020) dan media massa (Colomina et al., 2021). Buku ini mengajukan argumen berkebalikan dari simpulan tersebut bahwa hoaks mudah dipercaya oleh publik dapat pula disebabkan karena ketidakpercayaan publik terhadap aktor-aktor dominan yang berada dalam ekosistem informasi publik. Oleh karena itu, rentang pembahasan dua aktor yang menjadi subjek penelitian menyentuh sisi interelasi negara dan media massa sampai titik persinggungan narasi bahaya hoaks yang disampaikan keduanya guna mengarahkan kembali masyarakat kepada mereka sebagai otoritas informasi publik. Aktor negara ini dapat difragmentasi menjadi presiden, kepolisian, kementerian atau lembaga tertentu. Diskusi mengenai hoaks dalam ekosistem informasi publik ini kemudian diperluaskan kembali dengan mempertautkan ciri *illiberal* demokrasi yang berkembang di Indonesia pada bagian akhir buku ini. Pertautan secara berjenjang ini akan menggambarkan pengertian dari politik hoaks yang dibahas, tidak hanya bermakna memproduksi hoaks untuk kepentingan politik, tetapi dapat bermakna pula instrumentasi label hoaks secara *illiberal* guna mempertahankan, mengokohkan, atau merebut kekuasaan.

A. POLITIK HOAKS SEBAGAI PRODUKSI HOAKS POLITIK²

Pengertian politik hoaks sebagai tindakan memproduksi hoaks untuk kepentingan politik dapat kita lihat contohnya, baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global, Amerika Serikat menggunakan informasi '*senjata pemusnah massal*' sebagai alasan politik untuk melakukan invasi militer ke Irak. Padahal, informasi itu tidak kunjung terbukti, sehingga kerap disebut fenomena hoaks

- 2 Gradasi konseptual antara hoaks sebagai netral dan disinformasi yang menekankan aspek intensi ini menjadi pertimbangan dalam buku ini hanya menggunakan kata hoaks dan disinformasi untuk mencakupan 'Politik Hoaks' dalam dua pengertian

paling berdarah (Lewandowsky et al., 2013). Isu ‘*senjata pemusnah massal*’ itu didistribusikan pula oleh media massa. Contoh lain, di dunia internasional adalah propaganda Rusia dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan beberapa bahasa Eropa timur untuk memengaruhi geopolitik (Paul & Matthews, 2016). Strategi hoaks ini mewarnai momentum elektoral, baik di tingkat nasional maupun daerah (Mulyartono et al., 2017; Temby, 2019; Rianto, 2020). Pengertian politik hoaks demikian yang akhirnya menjadi bagian penting penyusunan konseptualisasi hoaks atau disinformasi.

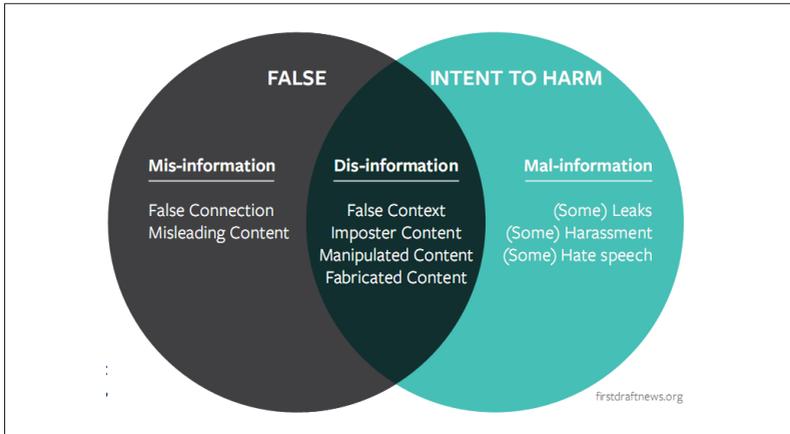
Dalam pelbagai pidato, pernyataan, atau berita yang memenuhi perbincangan publik, sering pula kata hoaks dan disinformasi disebut berurutan, yang tidak jelas relasi keduanya, tidak jelas apakah ada distingsi di antara keduanya atau hanya pengulangan sinonim untuk penekanan retorik. Dapat dikatakan ada beberapa terminologi yang populer untuk menandai fenomena tersebut, seperti *fake news*, disinformasi, misinformasi atau hoaks. Di antara empat terminologi tersebut, hanya *fake news*, terminologi yang memiliki kriteria produsen, yaitu media massa yang melakukan kerja jurnalistik. Sementara, tiga terminologi tergolong semu dalam mengidentifikasi kriteria produsen.

Hoaks menjadi terminologi yang netral, dalam pengertian tidak menonjolkan unsur intensi sebagaimana disinformasi dalam memalsukan informasi untuk kepentingan tertentu. Kata *misinformation* ditetapkan oleh dictionary.com sebagai *word of the year* pada 2018. Kata ini didefinisikan oleh dictionary.com sebagai informasi palsu yang tersebar tanpa melihat niat untuk menyesatkan. Penetapan itu dilakukan berdasar dua pertimbangan, yaitu ledakan peristiwa *misinformation* yang terjadi dan perkembangan terminologi yang mampu memahami peristiwa-peristiwa tersebut. *Disinformation*, *echo chamber*, *confirmation bias*, *filter bubble*, *conspiracy theory*, *fake news*, *post-fact*, *post-truth*, *homophily*, *influencer*, dan *gatekeeper* menjadi kata-kata yang menyertai penggunaan kata *misinformation* dan menggambarkan diskursus dalam mendefinisikan mekanisme penyebaran, penyebab, dan solusi.

Bila kita merefleksikan pada era jurnalisme yang dikelola melalui manajemen kurasi, verifikasi, penerbitan, dan distribusi yang berlapis dan berjenjang, tentu unsur gatekeeper menjadi faktor penting yang harus ditautkan dalam perbincangan misinformation. Pada zaman pra-internet, kebenaran informasi terlembaga dalam organisasi, kemudian setelahnya, internet memberi kesempatan tiap individu melampaui itu semua dan menyebarkan informasinya sendiri. Proses kurasi dan verifikasi yang semula terorganisasi, kini menjadi sekadar kesadaran dan kecakapan individual. Setahun sebelumnya, 2017, *fake news* ditetapkan oleh Maqucueri Dictionary sebagai *word of the year* menyusul penggunaan kata tersebut di ranah politik sangat masif. Kita bisa merujuknya ke dinamika politik di Amerika Serikat masa Presiden Donald Trump yang kerap melabeli *fake news* media massa yang berseberangan dengannya (Quandt et al., 2019; Farkas & Schou, 2018). Dua kata yang dianugerahi *word of the year* sekilas bersinonim (parsial), tetapi bila dibedah konteks dan komponen maknanya, akan tampak signifikansinya masing-masing.

Misinformasi hanya salah satu jenis gangguan informasi (*information disorder*). Tipologi gangguan informasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni disinformasi, misinformasi, dan mal-informasi. European Commission (2018) dan Wardle dan Derakhshan (2018) menekankan definisi disinformasi pada aspek praktik manipulasi informasi yang dilakukan sehingga menampakkan keberadaan aktor yang mengambil keuntungan dari ketersebaran informasi yang salah tersebut. Oleh karena itu, disinformasi tidak hanya salah, melainkan juga menipu. Sementara, misinformasi hanyalah informasi salah yang tersebar tanpa melihat adanya intensi manipulasi yang melatarbelakanginya. Untuk pengertian mal-informasi sendiri lebih menekankan potensi dampak koersif yang ditimbulkannya. Untuk contoh jenis mal-informasi ini, Uni Eropa dan Wardle dan Derakhshan (2018) memiliki perbedaan; ujaran kebencian digolongkan oleh Wardle dan Derakhshan (2018) sebagai contoh ekspresi mal-informasi sebagaimana tampak dalam gambar 2.1, sementara Uni Eropa memasukkan ujaran kebencian dan hasutan

untuk melakukan kekerasan sebagai salah satu bentuk disinformasi. Ujaran kebencian digolongkan sebagai bentuk mal-informasi karena sifatnya yang koersif, meski pernyataan yang disampaikan tidak mengandung informasi yang menyimpang. Sifat koersif dari mal-informasi yang ditekankan.



Sumber: Wardle dan Derakhshan (2018)

Gambar 2.1 Klasifikasi Penyimpangan Informasi

Penjajaran terminologi-terminologi di atas perlu diperjelas kait-kelindan satu sama lain dalam fenomena gangguan informasi. Seseorang yang meyakini bahwa informasi yang dia bagikan adalah benar, tentu tidak dapat dikatakan dia melakukan disinformasi. Pengertian disinformasi memberi batasan bahwa pelakunya mengetahui bahwa informasi yang dia bagikan adalah salah atau menyimpang. Penyimpangan tersebut justru bila dipercaya akan memberi keuntungan bagi pembuat disinformasi. Bila diurutkan secara kronologis, fenomena disinformasi dan misinformasi masih berada dalam satu lintasan kronologi komunikasi. Upaya manipulasi informasi dilakukan untuk menipu dan memperdaya kognisi penerima sehingga meyakini informasi tersebut sebagai kebenaran. Disinformasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dapat mengakibatkan misinformasi (Harsin, 2018). Oleh karena itu, misinformasi sebenarnya dapat diletakkan sebagai kondisi yang terjadi setelah menerima disinformasi.

Unsur tujuan dari pengertian disinformasi dapat dielaborasi dengan pengertian pelintiran kebencian yang ditawarkan George (2017). Menurutnya, pelintiran kebencian adalah penghinaan dan kebencian yang sengaja diciptakan sebagai strategi politik untuk mengeksploitasi identitas kelompok, memobilisasi pendukung, dan menekan lawan. Meski pengertian Cheria ini merujuk pada momen kontestasi politik dan tidak membahas disinformasi sama sekali, unsur tujuan eksploitasi identitas untuk tujuan politik tertentu ini dapat diuniversalisasi menjadi tujuan apapun yang dikehendaki pelakunya. Oleh karena itu, disinformasi dapat dipahami sebagai pelintiran kebencian, ketakutan, dan ketersinggungan untuk menipu kesadaran seseorang dengan memanipulasi informasi tertentu sehingga seseorang bertindak sebagaimana tujuan yang diproyeksikan oleh pelaku.

Pengertian disinformasi di atas menegaskan keberadaan unsur agensi, intensi, dan tujuan yang diproyeksikan pelaku. Pada dasarnya, pengertian ini selaras dengan pengertian disinformasi menurut European Commission (2018) yang mendefinisikan disinformasi sebagai segala bentuk kepalsuan, ketaktepatan, dan penyimpangan informasi yang didesain, disajikan, dan disebarkan secara sengaja untuk menimbulkan kerusakan atau keuntungan tertentu. Hanya saja pengertian Uni Eropa tidak menyertakan aspek eksploitasi identitas kelompok yang lazim digunakan dalam disinformasi yang bertujuan politis. Pengertian disinformasi yang didefinisikan oleh Uni Eropa lebih universal. Oleh karena itu, pengertian disinformasi yang dihasilkan dari elaborasi dengan konsep pelintiran menjadi terpayungi oleh definisi yang disampaikan oleh Uni Eropa, khususnya untuk menjelaskan disinformasi politis.

Disinformasi politis patut diperhatikan karena menyimpan potensi tereskalasi menjadi konflik atau dampak koersif tertentu di masyarakat sebagaimana terjadi di Tanjung Balai dan Wamena. Disinformasi dalam pengertian demikian merupakan bagian dari

perjuangan perebutan kekuasaan formal maupun kultural (Farkas & Schou, 2018). Oleh karena itu, Freelon dan Wells (2020) berpendapat bahwa disinformasi adalah komunikasi politis. Disinformasi dilakukan untuk menghasilkan implikasi yang meneguhkan otoritas atau superioritas suatu kelompok baik dalam ranah kebijakan maupun sosial. Disinformasi politis dapat dilakukan dengan memanfaatkan aspek agama dan sosial budaya tertentu.

Berdasar uraian konseptual mengenai intensi dalam produksi informasi palsu di atas, terminologi disinformasi politis memiliki kesejajaran konseptual dengan hoaks politik. Oleh karena itu, politik hoaks dalam pengertian pertama ini akhirnya menghasilkan hoaks politik. Politik yang menghasilkan atau mendayagunakan hoaks ini dapat dianggap jenis dari kampanye hitam di era digital yang menyebarkan fitnah atau informasi palsu. Salah satu contoh hoaks politik pada pemilihan presiden 2014 bisa dirujuk pada fenomena tabloid *Obor Rakyat* yang mendiskreditkan Joko Widodo. Tabloid ini meski tersebar dalam bentuk cetakan, tetapi versi digitalnya pun menyebar melalui internet. Hoaks politik *Obor Rakyat* ini dapat dijelaskan dalam pengertian Cherian, yakni bertujuan eksploitasi prasangka Komunis yang memiliki sejarah kelam dalam perjalanan Republik Indonesia untuk tujuan politik. Ketakutan akan komunisme dianggap dapat menggerakkan publik untuk meninggalkan Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014.

B. POLITIK HOAKS SEBAGAI PRAKTIK PELABELAN

Perkembangan hoaks di era digital kemudian direspons oleh banyak pihak melakukan upaya cek fakta. pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan kanal cek fakta di situs resminya sebagai rujukan masyarakat mengecek kebenaran informasi. Organisasi sipil, seperti Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) pun turut membangun kanal turnbackhoax.com sebagai alternatif pengecekan fakta. Media-media daring melakukan hal serupa. Penanganan

hoaks melalui praktik cek fakta tentu signifikan dilakukan untuk mengimbangi ketersebaran hoaks digital yang begitu cepat dan masif. Namun, buku ini mengambil sisi alternatif dalam melihat praktik penanganan hoaks digital di Indonesia karena praktik cek fakta atau klarifikasi menunjukkan gejala *illiberalism*, seperti ditandai pernyataan Menteri Kominfo saat itu Johny G. Plate, “*Kalau pemerintah sudah bilang hoaks, ya hoaks*”³ yang disampaikan dalam sebuah *talkshow* membahas protes publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu. Kebenaran informasi menjadi bersifat final untuk didiskusikan atau dikoreksi kembali. Karakter demikian dapat diproyeksikan pula untuk melihat praktik lembaga negara melabeli karya jurnalistik secara sepihak. Pada nuansa perkembangan demokrasi demikian, Tapsell (2020) menyebut penanganan hoaks di Indonesia makin meningkat sifat politisnya karena lebih ditegakkan untuk mengokohkan posisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau melemahkan lawan politiknya. Oleh karena itu, pembahasan politik hoaks dalam buku ini berkelindan dengan perkembangan demokrasi Indonesia sebagai konteks makro dari fenomena.

Buku ini menggunakan pengertian politik pelabelan hoaks sebagai sebuah bentuk koreksi. Pengertian politik hoaks yang kedua ini meminjam konsep *correction* dari Foucault (1995). Kita mesti menempatkan tindakan *correction* tersebut sebagai metode sistem hukuman. Pelabelan hoaks pada praktik cek fakta dapat dikatakan sebagai bentuk hukum paling ringan atas kesalahan memproduksi atau menyebarkan hoaks. Indonesia memiliki perangkat hukum pidana yang dapat membuahkan hukuman kurungan untuk orang yang melakukan kejahatan hoaks. Praktik koreksi ini dengan sendirinya melekatkan sifat patologis pada hoaks dan mengandaikan kekuasaan yang mampu mendiagnosa sekaligus mengobati.

Semua gerakan besar perluasan itu mencirikan hukuman modern - problematisasi penjahat di balik kejahatannya, kekhawatiran akan suatu hukuman yang berupa koreksi,

3 Pernyataan Johny G Plate ini dikutip dari Tempo.co (Anjar, 2020).

terapi, normalisasi, pembagian tindakan penilaian antara berbagai otoritas yang seharusnya mengukur, menilai, mendiagnosis, menyembuhkan, mengubah individu - semua ini menunjukkan penetrasi pemeriksaan disipliner ke dalam inkuisisi yudisial. ... itu sejak awal merupakan bentuk 'legal penahanan' yang dipercayakan dengan tugas perbaikan tambahan, atau usaha untuk mereformasi individu yang mengalami perampasan kebebasan diperbolehkan berfungsi dalam sistem hukum (Foucault, 1995, 227; 233).

Donald Trump sebagaimana sempat disebut di bagian awal menjadi contoh paling sering dibahas dalam mendayagunakan praktik pelabelan *fake news* terhadap media massa yang bersebarangan dengan dirinya. Contoh ini menunjukkan bagaimana berita media massa dan narasi aktor negara berkontestasi mendesak kebenaran masing-masing dalam kehidupan publik. Dinamika penanganan hoaks atau disinformasi di Indonesia pun telah mencapai fase ini. Praktik pelabelan ini penting untuk dipahami sebagai titik tolak untuk perkembangan wacana kontra-hoaks karena dinarasikan dapat menyebabkan konflik atau bahkan memecah kerukunan bangsa sehingga menjadi landasan pengambilan keputusan *illiberal*. Politik hoaks dalam pengertian demikianlah yang lebih banyak dieksplorasi dalam buku ini.

Pengertian politik hoaks sebagai praktik pelabelan dengan sendiri mensyaratkan kriteria subjek yang dibahas karena praktik koreksi dihasilkan dari interseksi antara pengetahuan dan kekuasaan. Media massa dan negara pada corak khasnya memiliki kriteria tersebut. Media massa dengan muruah jurnalisme bekerja atas kepentingan publik untuk melakukan cek dan menyeimbangkan kekuasaan negara. Di sisi lain, negara dengan kekuasaan administrasi dapat memiliki kapasitas kewenangan formal untuk mendefinisikan suatu realitas. Perimbangan atau subordinasi posisi politik kedua aktor ini diselidik lebih jauh untuk melihat sejarah paternalisasi administratif dan konvergensi ekonomi yang memberi pengaruh terhadap ekosistem

informasi publik, termasuk sikap publik terhadap pemberitaan atau narasi yang dihasilkan.

C. ANALISIS WACANA KRITIS SEBAGAI METODE

Fenomena hoaks digital yang meningkat pesat, terutama ketika berada dalam momentum elektoral, menjadi basis legitimasi historis praktik politik pelabelan hoaks ini. Dengan kata lain, politik hoaks dalam pengertian kedua merupakan respons terhadap politik hoaks dalam pengertian pertama. Dalam pengandaian analisis wacana, praktik pelabelan hoaks adalah teks, sedangkan hoaks politik adalah konteks teks-internal langsung atau koteks. Teks dan konteks ini saling berinteraksi membentuk kerangka wacana. Buku ini sendiri lebih memperdalam analisis konteks historis dari fenomena penanganan hoaks di Indonesia dengan menggunakan analisis wacana kritis yang digagas Ruth Wodak yang memberi penekanan pada aspek historis sehingga sering disebut pula analisis wacana historis. Analisis wacana historis yang digagas Ruth Wodak ini membagi konsep konteks menjadi empat lapis (Titscher et al., 2009) sebagai berikut:

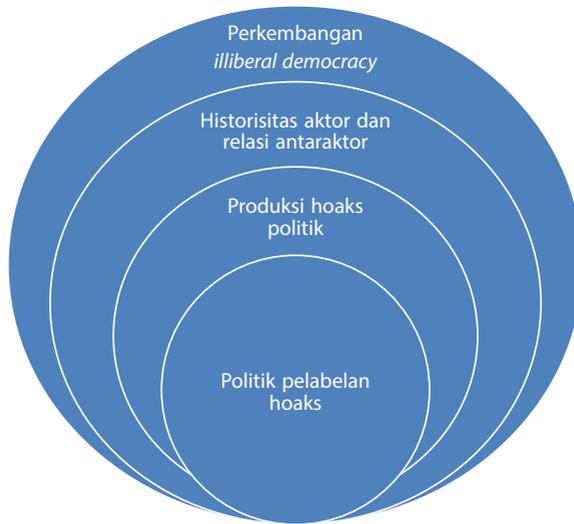
- 1) koteks, bahasa, atau teks-internal langsung;
- 2) hubungan intertekstualitas antara ujaran, teks, genre, dan wacana;
- 3) variabel sosiologis/sosial di luar lingkup bahasa yang menunjukkan dimensi situasional dari teks;
- 4) konteks sosio-politik historis yang lebih luas disematkan dan keterkaitannya dengan praktik diskursif.

Aspek historis dalam kajian wacana menjadi elemen penting untuk diperhatikan. Hal demikian tidak lain disebabkan proses sosial selalu dinamis (Wodak, 1989) sehingga historitas ini dapat menjadi titik tolak perkembangan atau penyimpangan dari suatu pola. Panduan dalam menganalisis wacana ini tidak lepas dari epistemologi bahasa sebagai

praktik sosial dan sifat emansipatoris pendekatan kritis dalam analisis wacana yang menaruh perhatian khusus pada hubungan bahasa dan kekuasaan, terutama pada institusional, gender, dan wacana media (Wodak, 2001a; 2001b). Penarasian bahaya disinformasi oleh media massa dan negara, pada titik ini lebih tegas dan jelas posisinya secara sosial karena mengimplikasikan relasi kuasa. Penarasian bahaya disinformasi atau politik hoaks sebagai praktik pelabelan mengundang eksplorasi pertanyaan-pertanyaan:

- 1) Bagaimana wacana tersebut membentuk pengetahuan;
- 2) Bagaimana wacana tersebut diproduksi dan membangun institusi sosial;
- 3) Bagaimana fungsi ideologi dalam institusi sosial;
- 4) Bagaimana aktor sosial mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan wacana tersebut dalam sebuah komunitas? (Wodak, 2001).

Empat pertanyaan ini secara simultan memandu uraian data dan kasus-kasus yang dipilih untuk menunjukkan tujuan utama buku ini dalam mendiskusikan politik hoaks sebagai praktik pelabelan hoaks. Praktik tersebut dilihat sebagai bagian dari perkembangan ekosistem informasi publik di Indonesia yang memiliki sejarah represi, industrialisasi, dan politisasi. Data dan kasus yang dibahas dalam buku ini dapat diklasifikasikan dalam pembabakan konteks dari praktik pelabelan hoaks sebagaimana terlihat dalam gambar 2.2. Struktur lapisan ini mengikuti pembagian konteks yang disampaikan Wodak. Hoaks politik sebagai konteks terbahas secara simultan membentuk intertekstualitas dalam analisis mengenai konteks historisitas aktor dan relasi antar-aktor sebagai lapis konteks situasional dari teks dan konteks sosio-politik historis perkembangan *illiberal democracy* di Indonesia. Visualisasi lapisan konteks dari politik hoaks ini terdapat dalam gambar 2.2.



Sumber: Diadaptasi dari Titscher et al. (2009)

Gambar 2.2 Lapisan Konteks dari Politik Pelabelan Hoaks

Buku ini menempatkan disinformasi sebagai wacana, tidak semata kegagalan individu dalam memproduksi dan mengonsumsi informasi. Berbagai institusi, seperti negara, media, maupun kelompok sipil menyodorkan literasi digital sebagai solusi tunggal penanganan disinformasi ini. Literasi digital sebagai solusi penanganan disinformasi sendiri mengandung masalah epistemik. Disinformasi tercerabut dari ekosistem informasi publik Indonesia yang telah memiliki sejarah panjang akan monopoli, represi, industrialisasi, sampai politisasi. Aspek struktural seolah tidak hadir berkontribusi terhadap maraknya disinformasi di era digital ini dan menjadi perkara individual semata. Literasi digital yang diselenggarakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap hanya memperkuat dominasi dan tidak mengajarkan berpikir kritis (Idris, 2022).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab 3

REPRESI, INDUSTRIALISASI, DAN POLITISASI PERS INDONESIA

Pers Indonesia pasca-kemerdekaan setidaknya dapat digambarkan mengalami empat fase perkembangan. Pertama, di bawah kendali dan pengawasan negara, terutama yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kedua, industrialisasi pasca-Orde Baru yang ditandai dengan kemunculan institusi pers milik swasta yang masif. Ketiga, masa konvergensi media-media dalam beberapa grup perusahaan raksasa. Keempat, instrumentasi pers untuk kepentingan politik pemilikinya. Perkembangan pers di Indonesia ini telah banyak dikaji oleh para ilmuwan. Bagian ini selanjutnya akan menggambarkan secara karikatural perkembangan yang berlangsung dan titik pergeseran di tiap masa dari literatur yang ada.

Kesinambungan pers Indonesia masa Orde Lama dan Orde Baru adalah adanya upaya ideologisasi. Pada masa Orde Baru, ideologisasi ini berlangsung lewat birokratisasi yang ketat. Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban menjadi syarat mutlak pendirian institusi pers meski dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menyebutkan bahwa *‘Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan’*.

Setelah peristiwa Malari 1974 setidaknya ada 12 institusi pers yang dicabut izinnya atau dengan kata lain dibredel. Masa-masa setelahnya, kehidupan pers lebih ditekan dan diarahkan menjadi pers pembangunan atau pers Pancasila (Mallarangeng, 2010). Istilah Pers Pancasila sudah dikemukakan oleh M. Wonohito, seorang wartawan senior kenamaan, jauh sebelum dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV di Surakarta pada tanggal 7–8 Desember 1984. Setidak-tidaknya konsep Wonohito mengenai Pers Pancasila dapat diketahui dari diktat kuliah pada Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian gabungan, berjudul “Teknik Jurnalistik dalam Sistem Pers Pancasila” yang dia susun pada tanggal 2 Januari 1977. Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif (Rasid, 2011).

Peristiwa Malari direspons oleh Dewan Pers yang diketuai Menteri Penerangan Mashuri dengan merumuskan tentang interaksi posisi pers, pemerintah, dan masyarakat (Oetama, 1987). Rumusan interaksi positif ini masuk menjadi keputusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ke-17 yang mengusung tema “*Memantapkan Peranan Pers di Dalam Membudayakan Pancasila dan UUD 45*” di Manado, 14 s/d 16 Nov 1983 mengusulkan interaksi positif itu diubah menjadi interaksi konstruktif.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 menunjukkan secara jelas proses ideologisasi Orde Baru dan deideologisasi rezim Orde Lama dengan perubahan sebagai berikut.

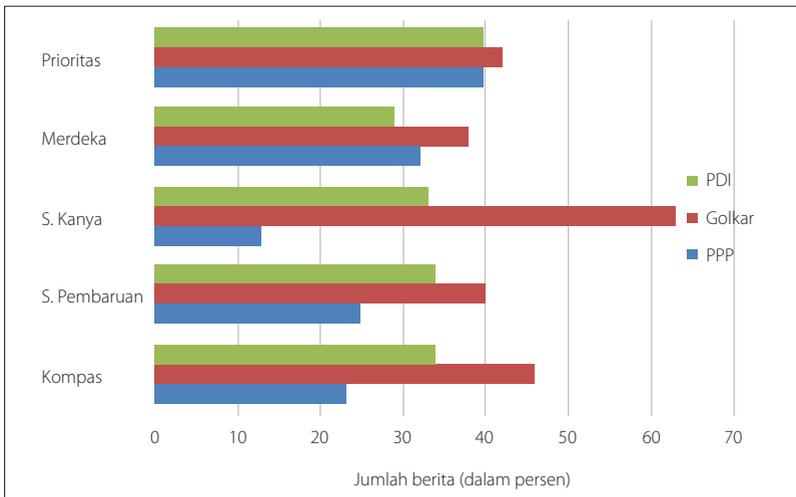
- 1) “Alat revolusi” diubah menjadi “alat Perjuangan Nasional”.
- 2) “Alat penggerak massa” diubah menjadi “alat penggerak pembangunan bangsa”.
- 3) “Pengawal revolusi” diubah menjadi “pengawal ideologi Pancasila”.

- 4) “Pers Sosialis Pancasila” diubah menjadi “Pers Pancasila”.
- 5) “Tiga kerangka revolusi” diubah menjadi “Tujuan Nasional”.
- 6) “Progresif” diubah menjadi “konstruktif-progresif”.
- 7) “Kontra revolusi” diubah menjadi “menentang Pancasila”.
- 8) “Berkhianat terhadap revolusi” diubah menjadi “berkhianat terhadap Perjuangan Nasional”
- 9) “Gotong royong kekeluargaan terpimpin” diubah menjadi “secara bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- 10) “Revolusi” diubah menjadi “Perjuangan Nasional”. - “revolusi Pancasila” diubah menjadi “ideologi Pancasila” (Pasal 1a Nomor 21 Tahun 1988).

Dalam undang-undang yang sama, terdapat pengalihan kewenangan administrasi pers ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilakukan bersama dengan Dewan Pers dan menjadi dasar dimulainya rezim Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers. Ikatan hubungan pers-pemerintah masa Orde Baru sangat paternalistik atau cenderung patron-klien (Suwardi, 1993). Siapa yang menjadi ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers harus direstui oleh penguasa dan siapa yang menjadi pemimpin redaksi suatu media massa mesti mendapat rekomendasi dari PWI (Masha, 2020). Berbagai ketentuan tertulis, tidak tertulis, budaya telepon, maupun *briefing* oleh jajaran Departemen Penerangan dilakukan untuk mengendalikan berita yang beredar (Ishadi, 2014). Ruang penyiaran yang merupakan subsistem dari ekosistem pers pun pada masa Orde Baru *‘menjadi objek kolonisasi domain komunikatif masyarakat oleh subsistem bisnis dan subsistem administrasi negara, serta praktis hanya melayani kepentingan para pejabat dan sekelompok pengusaha’* (Sudibyo, 2009). Meski tidak dapat dipungkiri, relasi paternalistik tersebut tidak stagnan, melainkan dinamis. Pada masa kritis transisi kejatuhan Soeharto Mei 1998, tekanan jurnalis di *newsroom* mampu membuat celah untuk menayangkan berita yang

mendukung demonstrasi yang dilakukan mahasiswa (Ishadi, 2014). Lebih lanjut, Ishadi berkesimpulan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, televisi berperan sebagai alat politik, pendukung kritis, dan pembangkang. Interaksi warga dengan informasi media tidak bertujuan membangun kesepahaman dialektik, melainkan konstruksi sepihak yang menghendaki ketertundukan dan menerima tanpa syarat atas apa yang disampaikan. Selama 25 tahun pemerintahan Orde Baru, birokrasi Indonesia menjadi sumber informasi utama (Dhakidae, 1996).

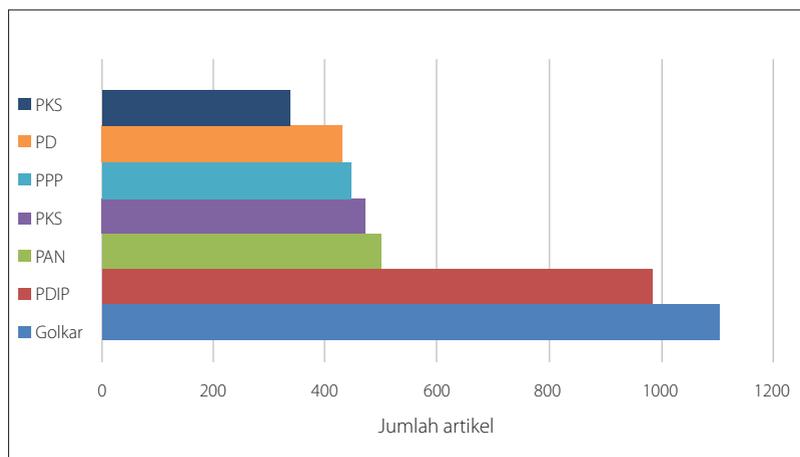
Media massa di Indonesia sejak era Orde Baru sudah menunjukkan pengaruh elektoralnya. Kemenangan Golkar tidak hanya disokong oleh kekuatan militer, tetapi juga media massa yang berpengaruh signifikan. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada masa kampanye pemilu 1987, dibanding peserta pemilu yang lain, PDI dan PPP, Golkar memiliki frekuensi pemberitaan lebih banyak di lima media massa, yaitu Kompas, Suara Pembaruan, Suara Karya, Merdeka, dan Prioritas.



Sumber: Suwardi (1993, 117)

Gambar 3.1 Berita Partai Politik selama Kampanye Pemilu 1987 (dalam %)

Kebangkitan Partai Golkar di pemilu pasca-Orde Baru pun tidak terlepas dari peran media yang memfigurasi ulang citra partai utama pengusung rezim tersebut. Peran media melahirkan kembali identitas politik partai Golkar dan menempatkan kembali sebagai partai signifikan salah satunya lewat porsi pemberitaan yang lebih besar sejak tahun 1999 hingga masa pemilu 2004. Tomsa (2007) mencatat contoh pemberitaan mengenai Partai Golkar di Jakarta Post sebagaimana terlihat dalam gambar 3.2.



Sumber: Tomsa (2007, 80)

Gambar 3.2 Distribusi Artikel Mengenai Partai Politik di Jakarta Post 1999–2004

Pemberitaan media massa tersebut mampu membuat Partai Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif 2004 mengungguli Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. Perolehan ini membuat Partai Golkar mampu membentuk aliansi dengan Partai Demokrat dan mampu menempatkan ketua umumnya, Jusuf Kalla, sebagai wakil presiden

dalam pemilihan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak menganut asas perwakilan lagi di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tabel 3.1 Perolehan Lima Besar Suara Pemilihan Legislatif 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi	%
1.	Golkar	24.480.757	21,57	127	23,27
2.	PDI-P	21.026.629	18,53	109	19,82
3.	PKB	11.989.564	10,56	52	9,45
4.	PPP	9.248.764	8,15	58	10,55
5.	PD	8.455.825	7,45	56	10,00

Sumber: Kompas (2022)

Pada pemilihan umum legislatif 2009, porsi pemberitaan mengenai PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Golkar di Waspada, Jawa Pos, koran Tempo, Sindo, dan Kompas lebih besar dibanding partai politik lainnya (Widyawati et al., 2009). Pemberitaan dilakukan dengan lebih menonjolkan persoalan persona daripada peristiwa. Budaya politik Indonesia yang berporos pada figur bisa menjadi faktor yang melatarbelakangi pola pemberitaan demikian. Ketiga partai ini akhirnya mempertarungkan masing-masing ketua umumnya pada pemilihan presiden 2009.

Masa awal Reformasi ditandai dengan kebangkitan semangat industrialisasi pers setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang memberi ruang kebebasan bagi pergerakan pers di Indonesia. Terlebih Presiden Abdurahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan yang menjadi administratif informasi publik di Indonesia. Surat kabar dan televisi swasta mulai bermunculan memberi alternatif sumber informasi dari yang sebelumnya terbatas. Jumlah media berizin telah mencapai angka lebih dari 1000 pada tahun 2000-an awal dan politisi bersumber daya besar mulai menunjukkan kekuasaannya dengan mempergunakan media yang dimilikinya dalam memasuki arena politik formal, seperti yang ditunjukkan oleh

Aburizal Bakrie (pemilik ANTV, TVOne, Viva news dan sebagai Ketua Umum Golkar), Surya Paloh (Pemilik MetroTV, Media Indonesia, dan sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat), Harry Tanoesudibjo (pemilik RCTI, Global TV, MNCTV, Trijaya FM dan sebagai salah satu petinggi Partai Nasional Demokrat (sebelum mendirikan Partai Persatuan Indonesia)), dan Dahlan Iskan (pemilik Grup Jawa Pos, dan sebagai Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) (Heryanto, 2015).



Sumber: Ruangrupa (2013)

Gambar 3.3 Sampul Film 'Di Balik Frekuensi'

Ucu Agustin merilis film dokumenter '*Di Balik Frekuensi*' yang menunjukkan frekuensi yang menjadi milik publik telah dimanfaatkan oleh para pemilik stasiun televisi untuk melakukan advertasi politik mereka atau menyerang lawan politik dengan berita. Gambar 3.3 adalah poster dari film dokumenter yang rilis pada 2013 tersebut. Perseteruan politik pemilik media, seperti Aburizal Bakrie, Hary Tano, dan Surya Paloh termanifestasi dalam artefak linguistik. Stasiun televisi milik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Surya Paloh dan Hary Tanoe kala itu menggunakan penyebutan '*lumpur Lapindo*' untuk menandai semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan perusahaan milik Aburizal Bakrie, Lapindo Brantas. Sementara itu, stasiun televisi milik Aburizal Bakrie berupaya membersihkan kesan kausalitas tersebut dengan membentuk frasa '*lumpur Sidoarjo*'. Kedua konstruksi frasa tersebut dibentuk oleh kuasa modal dan kedua konstruksi itu pula membuktikan bahwa ruang redaksi bukan ruang hampa yang mudah dimasuki agenda kepublikan tanpa melalui pertarungan kuasa.

Pemberitaan di tangan kuasa modal politisi adalah politik dalam keseharian (Wodak, 2009). Orientasi informasi yang diterbitkan tidak lain untuk memenangkan posisi politik dan sekaligus untuk menjegal lawan politik. Istilah orientasi informasi ini digunakan oleh Mallarangeng (2010) untuk mendefinisikan apa yang menjadi tujuan dari editorial atau tajuk rencana. Istilah ini dapat diperluas untuk mencakup keseluruhan produk jurnalistik, termasuk berita, mengingat perkembangan teoretik pun sudah pada tahap menganggap berita berorientasi untuk bersikap netral, mengkritik, atau mendukung suatu praksis sosial, seperti yang biasa diperagakan analisis wacana kritis atau analisis pemingkai. Tidak mengherankan, puncak kebangkitan industri media diwarnai kemunculan penanda lingual orientasi informasi pemberitaan, yaitu politik pencitraan. Politisi memanipulasi realitas dalam representasi bahwa apa yang disaksikan masyarakat adalah gambaran yang salah yang ditampilkan benar untuk menyembunyikan kelemahan, kesalahan, atau kepentingan pribadi atau kelompok (Haryatmoko, 2010). Kita bisa melihat gambaran pertarungan orientasi informasi dalam politik formal dari pemberitaan Jokowi dan Partai Demokrat di tahun 2014.

Kemunculan Jokowi pertama kali di kancah media nasional diwakili oleh pemberitaan besar-besaran mobil Esemka hasil rakitan sebuah sekolah menengah kejuruan di Solo, tempat Jokowi menjadi walikota. Media menjadikan mobil Esemka sebagai tema utama diskusi dalam beberapa minggu, bahkan menyebut mobil tersebut merupakan

tonggak awal kebangkitan industri otomotif nasional. Selang beberapa bulan, PDI-P mengusung Joko Widodo menjadi calon gubernur dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi calon presiden Indonesia. Pencapresan Jokowi memiliki kesamaan dengan kondisi Partai Demokrat pada tahun 2014. Kedua-keduanya sama mengalami *media effect*. Buku yang dieditori Widjajanti (2011) menunjukkan bahwa perbincangan mengenai kasus korupsi Nazarudin yang menyeret Partai Demokrat dalam prahara mendapat perhatian lebih besar dari publik. Publik yang mulai mendayagunakan internet, media sosial, dan blog untuk kepentingan partisipasi demokratis berbagi pandangan dan pengamatan mengenai kasus tersebut. Sumber informasi yang diperbincangkan tidak lain berasal dari pemberitaan media. Kondisi demikian menunjukkan adanya kesejajaran antara intensitas pemberitaan dan kesempatan pemberitaan tersebut menjadi perbincangan publik dan kemudian membentuk opini publik.

Perolehan Partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2014 hanya 10,19 persen atau 12.728.913 suara dari suara sah. Perolehan ini merosot dari 2009 yang mencapai 20,85 persen atau 21.703.137 suara. Demokrat kehilangan sekitar 9 juta suara tidak lepas dari pengaruh pemberitaan negatif seputar korupsi kader dan ketua umunya Anas Urbaningrum serta konflik internal yang dialami. Masifnya pemberitaan negatif ini terutama di media televisi hampir berbarengan dengan masifnya pemberitaan positif tentang Jokowi. Merupakan strategi politik PDI-P dengan mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum dilaksanakannya pemilihan umum legislatif sebagai katrol perolehan suara. Nyatanya strategi ini berhasil, PDI-P memperoleh 18,95 persen atau 23.681.471 suara menanjak dari perolehan pemilu 2009 yang hanya 14,03 persen atau 14.600.091 suara. Kenaikan 9 juta suara PDI-P ini merupakan pemilih Demokrat pada 2009 lalu. PDI-P berjaya adalah sintesa dari *media effect* atas Jokowi dan Demokrat. PDI-P merebut kembali suara pemilih yang dicuri Partai Demokrat pada Pemilu 2009 (Supriatma, 2009).

Sejak menjadi Gubernur Jakarta sorot kamera dan gerak pena jurnalis mengikuti gerak *blusukan* Jokowi. Fragmen Jokowi meninjau

gorong-gorong saluran air menjadi ikonik pola pemerintahannya. *Blusukan* menjadi *trademark* politik Jokowi sampai dia terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2014. *Blusukan* ini disebut menggeser paradigma pemerintahan yang dahulu berbasis laporan berjenjang dan birokratis ke arah pemerintahan berbasis aspirasi rakyat (Ubaidillah, 2015). Jokowi menjadi *media darling* kala itu.

Bagian ini akan menunjukkan kembali kerja media memberitakan figurasi citra politik Jokowi era menjadi gubernur Jakarta yang lekat dengan *blusukan* sebagai metode pengambilan kebijakan publik. Fragmen Jokowi meninjau gorong-gorong pada Desember 2012 menjadi pilihan untuk menilai kedekatan media massa dengan kerja politik Jokowi. Peninjauan gorong-gorong yang dilakukan dalam konteks penanganan banjir di Jakarta ini yang mengantarkan Jokowi untuk pertama kali dalam batas komunikasi simbolik menanam ekspektasi publik tentang kerja politiknya dengan kewenangan yang lebih luas, yakni menjadi presiden sebagaimana yang diberitakan Kompas (2014):

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

...

Jokowi menjamin, seluruh perencanaan transportasi yang telah dicanangkannya selama menjabat sebagai DKI-1 tidak akan terbengkalai jika nantinya ia menjabat sebagai RI-1. Ke depannya, Jokowi ingin agar Jakarta memiliki banyak moda transportasi

Kita melihat bagaimana peristiwa atas tindakan Jokowi dirayakan dengan ketakjuban oleh media-media daring. Tabel 3.2 menunjukkan penggunaan kata emotif mensifati persona Jokowi atau mengatribusi

tindakan pada peristiwa yang ditandai cetak tebal dalam kalimat-kalimat berita mengimplikasi makna figurasi simbolis yang menyusun citra politik Jokowi sebagai pemimpin DKI Jakarta.

Tabel 3.2 Figurasi Jokowi dalam Berita Masuk Gorong-gorong

Figurasi Simbolis	Berita
<p>Pemimpin berani dan tanggap</p>	<p>Tanpa tedeng aling-aling, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) nekat masuk ke dalam gorong-gorong di kawasan Bundaran HI. Kata Jokowi, gorong-gorong sumber banjir itu kekecilan (Detik, 2012).</p>
	<p>Jokowi yang mengenakan batik korpri warna biru muda, tanpa ragu langsung masuk ke gorong-gorong sedalam 60 centimeter yang terletak di trotoar Bundaran HI arah Jalan Sudirman, tepatnya di depan Kedubes Jerman, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2012) (Tribunnews, 2012)</p>
	<p>... Rabu (26/12) kemarin, pria yang akrab disapa <u>Jokowi</u> itu benar-benar menunjukkan niat seriusnya memerangi banjir di Jakarta. Dia rela masuk ke dalam gorong-gorong yang ada di kawasan Jl MH Thamrin. Blusukan ke gorong-gorong itu bukan tanpa alasan. Sebab pada hari Jumat dan Sabtu lalu, ruas jalan itu nyaris lumpuh dari lalu lalang kendaraan akibat genangan air. Untuk memastikan <u>anak</u> buahnya telah membersihkan gorong-gorong dari sampah, maka Jokowi melakukan pengecekan langsung (Merdeka, 2012)</p>
	<p>Masih mengenakan batik Korpri, tanpa ragu Gubernur DKI Jakarta Jokowi masuk ke gorong-gorong di depan Hotel Mandarin, Jakarta. Menurut Kepala Dinas PU, Ery Baskoro saluran air itu sudah lama dibangun. (Liputan6, 2012).</p>
	<p>Mantan Walikota Solo ini juga menjelaskan, akan masuk untuk melihat langsung gorong-gorong yang ada. Meskipun diketahui pula ada beberapa titik gorong-gorong yang beracun (Sindonews, 2012)</p>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Wilayah sentral seperti Sudirman-Thamrin yang nota-bene adalah "Ring I" sebelum sampai ke Istana negara sebisa mungkin memang harus steril dari banjir, namun kenyataannya bertolak belakang. Pasca kejadian itu, Jokowi **langsung** mengecek gorong-gorong yang berlokasi di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Untuk mengatasi banjir di wilayah ini, orang nomor satu di Jakarta itu berencana membuat **terobosan** untuk membangun deep tunnel atau waduk air bawah tanah. (Kontan, 2012).

Jokowi **berencana** membangun terowongan air bawah tanah atau deep tunnel dengan daya tampung air yang lebih besar lagi. Selama ini gorong-gorong di Ibu Kota hanya berdiameter 60 sentimeter yang sangat memadai untuk mengimbangi curah hujan hingga 100 milimeter per jam. "Jakarta ini kronis, harus satu-satu diselesaikan," tutur Jokowi saat meninjau gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2012) (Bisnis, 2012)

Pemimpin visioner

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) **kecelek** setelah mengecek dan masuk gorong-gorong di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat (Republika, 2012)

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memantau kondisi gorong-gorong di sekitar Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin. Jokowi **mengira** gorong-gorong di DKI Jakarta luas, namun kenyataannya berbeda. (Solopos, 2012)

Kepada wartawan, Jokowi menuturkan bahwa ukuran gorong-gorong yang ada di kawasan HI **terlalu kecil**. "Ukuran gorong-gorong di sini terlalu kecil, hanya 60 sentimeter, kurang besar. Jelas saja tidak bisa menampung air hujan yang sangat deras akhir-akhir ini," katanya. Maka dari itu, Jokowi **berencana** untuk memperbesar diameter gorong-gorong tersebut.... (Antara, 2012)

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memantau kondisi gorong-gorong di sekitar Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin. Jokowi **mengira** gorong-gorong di DKI Jakarta luas, **namun kenyataannya berbeda** (Viva, 2012).

Figurasi pemimpin berani dan tanggap ini dilakukan dengan menunjukkan bahwa Jokowi memiliki sifat yang tidak takut menerjang ketidaknyamanan, kemandekan birokrasi, bahkan keadaan bahaya. Dia tanggap terhadap keadaan dan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan keadaan demikian. Berkelindan dengan figurasi tersebut, keberanian Jokowi ini tidak lahir spontan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan rencana besar dalam menyelesaikan masalah. Karakter visioner Jokowi ini ditampilkan melampaui besarnya masalah, atau bahkan kondisi yang dihasilkan oleh pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, ekspektasi Jokowi dibenturkan dengan realitas kata *kecele* untuk menunjukkan perkiraan Jokowi lebih besar dari kondisi realitas. Media-media dari lintas grup perusahaan media di atas membentuk figurasi demikian.

Logika *blusukan*, penjarangan aspirasi dan kesesuaian dengan realitas lapangan sebagai metode pengambilan kebijakan publik oleh Jokowi, terutama era kepresidenan, dapat diuji dengan kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Istilah pengalihan subsidi di sini mengikuti istilah resmi yang dikeluarkan pemerintah, mengganti pengurangan subsidi atau pencabutan subsidi. Pengambilan pengalihan subsidi BBM sebagai penguji logika pemerintahan berbasis *blusukan* penting, karena apakah memang presiden telah mengumpulkan aspirasi warga negara Indonesia sebagai legitimasi kebijakan? Atau masih mengandalkan laporan akan hitungan para pakar tentang pola perekonomian yang sehat dan baik untuk masyarakat?

Jika dirunut secara kronologis, kebijakan pengalihan subsidi BBM oleh Presiden Joko Widodo, sudah tercantum dalam daftar program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Makin nampak niatannya itu, saat dia masih berstatus presiden terpilih yang belum dilantik, dia meminta presiden yang masih menjabat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi beban subsidi BBM pada APBN 2014. Alasannya, subsidi itu telah menguras anggaran serta mempersempit ruang fiskal sebagai modal untuk membangun infrastruktur.

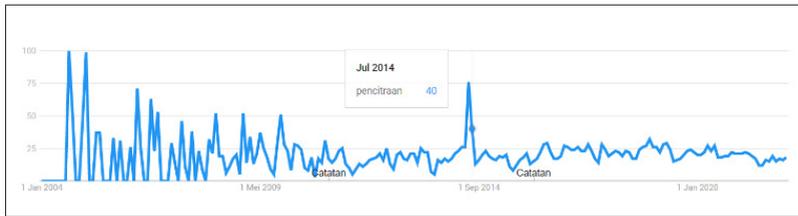
Rumusan kesimpulan tentang kembalinya kedaulatan rakyat melalui *blusukan* bisa dikatakan sebagai legitimasi kebijakan terganggu dengan rangkaian realitas yang disusun dalam rangka mendeteksi perjalanan ide dari sebuah kebijakan. Hasil perbincangan para pakar di ruang diskursif politik masih menjadi ruh kebijakan. Sedangkan rakyat tetap berada pada posisi pasif. Namun demikian, *blusukan* telah menjadi leksikon politik. Kata ini kerap menempel dalam pemberitaan kerja-kerja politik pejabat publik ketika melakukan peninjauan langsung.

A. POLITIK PENCITRAAN DAN DISINFORMASI

Politik citra mengandung unsur manipulasi yang digerakkan oleh motor kapital menjadi landasan bagi masyarakat untuk mafhum terhadap disinformasi. Manipulasi atau dapat diperhalus penyebutannya menjadi pengukuran komposisi pemberitaan yang mampu mencapai orientasi informasi yang direncanakan memiliki kesepadanan dengan disinformasi. Pencitraan seperti yang tampak dalam kontruksi '*lumpur Lapindo*' maupun '*lumpur Sidoarjo*' memang mengandung fakta empirik yang mampu dirujuk, tetapi nilai dari realitas empirik itu telah dikonstruksi sedemikian rupa agar hadir di hadapan pembaca sesuai dengan kepentingan politik atau ekonomi.

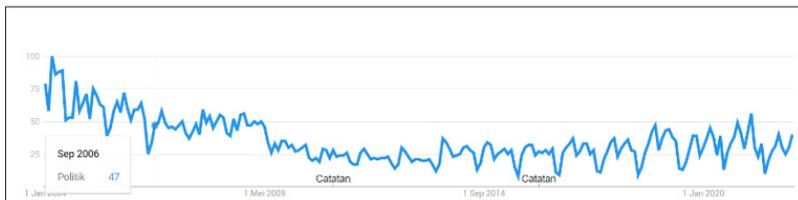
Politisasi yang berujung pada terbentuknya kubu berseberangan membuat makna publik dalam kredo kerja jurnalistik yang mengatasnamakan kepentingan publik bermakna tersegmentasi. Kebenaran informasi akhirnya tidak lagi bernilai universal dan sangat terikat konteks produsen, distributor, dan konsumennya. Kondisi ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat Donald Trump berkuasa. Pendukung Trump menganggap berita yang diterbitkan oleh Fox atau Breitbart bernilai benar dan patut dipercayai. Sementara pemberitaan dari media lain perlu dicurigai bahkan diabaikan karena dianggap menggembosi legitimasi langkah politik Trump. Begitu pun yang berlaku bagi kelompok oposisi. Polarisasi sudah mendahului disinformasi dalam menciptakan keadaan misinformatif.

Hasil penelusuran Google Trends Indonesia terhadap kata *pencitraan* di mesin pencari dalam gambar 3.4 dan 3.5 menunjukkan bahwa grafik mengalami peningkatan seiring tahun-tahun politik, seperti 2004, 2009, dan 2014. Konteks yang mengikuti penggunaan kata *pencitraan* dalam mesin pencari ini memang masih bercampur dengan konteks selain politik. Paling besar komposisinya adalah pencitraan sebagai teknik figurasi dalam puisi. Namun, masuknya konteks politik pun menunjukkan penetrasi demokrasi yang termediasi membuat politisi menyusun strategi penampilan diri, baik di media massa maupun media sosial.



Sumber: Google Trends (2022)

Gambar 3.4 Kata Pencitraan pada Google Trends



Sumber: Google Trends (2022)

Gambar 3.5 Kata Pencitraan dengan Topik Politik pada Google Trends

Proyek pencitraan diri ini adalah konsekuensi dari kerja-kerja politik berorientasi pada akumulasi kekuasaan dan tidak memberi tempat terhadap agenda kerakyatan dan kepublikan. Dengan citra tersebut, defisit kepercayaan rakyat hendak ditutupi atau dicarikan

kompensasi (Haryatmoko, 2010). Maka tidak heran, identitas keagamaan atau etnisitas yang memiliki jangkar psikologis kuat di masyarakat dimanfaatkan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa mereka memiliki pemimpin merepresentasikan kelompoknya. Kondisi psikologis semu timbul dari kerja-kerja manipulatif. Oleh karena itu, pada dasarnya sebelum fenomena disinformasi berkembang, masyarakat sudah diarahkan mengambil keputusan hidup dalam keadaan misinformatif. Disinformasi yang belakangan muncul hanya mempertegas pola komunikasi penguasa dan rakyat itu serta menjadi alternatif cara untuk menggiring opini publik. Penerima disinformasi digugah keterikatan primordialnya dan menginterupsi pemrosesan informasi.

Orientasi disinformasi demikian didukung oleh nalar urgensi atau tergesa yang terkandung dalam teknologi media sosial. Orang kini tidak menyediakan waktu cukup memproses informasi. Informasi dengan mudah mewujudkan sebagai kebenaran yang menggerakkan orang untuk memberi dukungan elektoral, seperti disinformasi anti-China yang berkontribusi untuk menyatukan Islamis militan dan konservatif dan nasionalis sayap kanan yang kemarin bertarung di Pilres 2019 (Ubaidillah & Hartanto, 2020).

B. POPULISME TERMEDIASI

Populisme dan media adalah percampuran yang berbahaya karena dapat menjatuhkan kepercayaan terhadap media arus utama dan menjadi kekuatan teknologi untuk memfasilitasi penyebaran berita ultra-partisan dan bahkan disinformasi (Freedman, 2021). Dalam konteks Indonesia, disrupsi digital yang berlangsung justru membuat industri media makin tersentralisasi dan terintervensi oleh politik dan peraturan (Tapsell, 2020). Kegagalan kebijakan media dalam menahan laju konsentrasi kepemilikan media dan mengembangkan independensi media dalam melayani kepentingan publik. Orientasi informasi yang diberitakan hanya diarahkan untuk memastikan kepentingan politik populis tercapai. Liputan independen dan

kritis terhadap elit-elit politik menjadi sulit ditemukan. Masyarakat berpindah ke media sosial atau kanal pesan pribadi menciptakan pasar bawah tanah bertukar ‘informasi yang disembunyikan media’. Terlebih disrupsi digital menginfrastrukturasi pasar bawah tanah tersebut.

Inovasi otoritarian di Indonesia telah sampai pada tahap mampu mengeksploitasi pemerintahan untuk meningkatkan kepemilikan di media (Mietzner, 2018). Maka tidak heran, respons publik tidak terdengar terhadap kebijakan administrasi Jokowi yang menekan kelompok Islamis yang berposisi (Warburton dan Aspinall, 2019). Pemberitaan diarahkan untuk menormalisasi pilihan kebijakan tersebut dengan menyodor narasi bahaya dan ancaman. Media menjadi salah satu instrumen politik ketakutan (*politic of fear*) untuk meneguhkan langkah-langkah yang dibungkus sentimen nasionalis itu dapat dibenarkan (Wodak, 2015).

Perkembangan konfigurasi aliansi politik pemilik media menunjukkan ujung yang timpang ke arah Presiden Jokowi pada 2019. Kini lima nama pemilik media dalam tabel 3.3 berada di barisan pendukungnya, Surya Paloh, Wisnutama Kusumabandio, Erick Thohir, Harry Tanoesudibjo, dan Chairul Tanjung.

Tabel 3.3 Daftar Media Massa yang Berelasi Ekonomi-Politik dengan Jokowi

Surya Paloh	Wisnutama Kusumabandio	Erick Thohir	Harry Tanoesudibjo	Chairul Tanjung
Metro TV, Medcom.id, koran Media Indonesia.	Net TV Indika FM	Gen FM Jak FM, Jak TV, koran Republika TV One, ANTV, Vivanews.com	<i>RCTI</i> , MNCTV, GTV, iNews TV Koran Sindo Okezone.com, Sindonews. com Radio MNC Networks	Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Detik.com, CNNIndonesia. com, CNBCIndonesia. com.

Sumber: Sukirno (2019)

Aliansi politik pemilik media ini menghasilkan konsesi politik yang berbeda. Surya Paloh mampu menempatkan politisi senior partai yang didirikan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny Gerald Plate, sejak 2019. Putri Harry Tanoesudibjo menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mendapat dukungan pemerintah dengan menetapkan proyek MNC Lido, Bogor sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wisnutama sempat menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019–2020. Sementara, putri Chairul Tanjung pun menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN dan sejak 2019 dia berbagi kepemilikan Viva Grup dengan Aburizal Bakrie. Tersisa Kompas Gramedia Group, Tempo Group, dan Jakarta Post yang tidak memiliki aliansi formal melalui relasi ekonomi-politik dengan Presiden Joko Widodo. Konfigurasi ini mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi publik dan justru meningkatkan sikap resistansi terhadap media massa yang dianggap sebagai sumber otoritatif informasi publik.

Kini setelah Erick Thohir hadir di peta kepemilikan Viva Group, pendukung Presiden Jokowi mengolok-olok Tempo yang beberapa kali menerbitkan edisi majalah yang kritis terhadap kebijakan yang diambil. Relawan Jokowi Mania melaporkan Majalah Tempo edisi *Janji Tinggal Janji* yang menampilkan sampul bergambar Jokowi dengan siluet bayangan hidung memanjang ke Dewan Pers (Tempo, 2019). Edisi yang memuat dinamika rancangan undang-undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tersebut dianggap menghina presiden karena memfigurasinya mirip pinokio, sosok pembohong yang selalu bertambah panjang hidungnya jika berbohong. Ninoy Karundeng (2019), seorang penulis blog dan relawan Jokowi yang pernah diundang di Istana Negara pada 2015, menyebut Tempo membela bigot KPK dan menghina simbol negara. Perubahan arah politik media pun dilakukan seturut dengan perubahan aliansi pemiliknya. Hary Tanoesudibjo semula adalah salah satu konglomerat media pendukung Prabowo. Namun, setelah tahun 2017 dia mengalihkan dukungan kepada Jokowi setelah skandal

pengancaman yang dilakukannya kepada penyidik untuk perkara hukum mengemuka (Power, 2018; Aspinall & Mieztner, 2019).

Perkembangan media baru, internet, membuat variasi medium penyebaran narasi yang menggugah keterancaman makin masif. Karakter produksi wacana di internet dan media sosial yang *mass-self communication* membuat pola penarasian terselubung anonimitas. Hubungan saling pengaruh antara media massa dan media sosial pun muncul. Pemberitaan menjadi viral setelah menjadi perbincangan di media sosial dan sebaliknya, perbincangan di media sosial makin viral setelah masuk ke meja redaksi kemudian diberitakan media massa. Narasi yang menggugah keterancaman masyarakat Indonesia yang beragam secara agama salah satu bentuknya adalah mempersonifikasi Prabowo Subianto sebagai bagian dari kelompok Islam garis keras yang mendukung terorisme dan mengancam Indonesia berubah menjadi negara Islam. “*Saya dituduh Islam garis keras, besoknya saya dituduh zionis. ...*” pernyataan Prabowo Subianto menanggapi tuduhan tersebut (Putri, 2018)

Nasib serupa menimpa Jokowi. Dia digambarkan sebagai ancaman bagi eksistensi Islam dan umat Islam di Indonesia sebagaimana tampak dalam gambar 3.6. Dari disinformasi sampai narasi kampanye menempatkan demikian. Amien Rais, pendiri dan politisi senior Partai Amanat Nasional, memberikan dikotomi koalisi pendukung kandidat calon presiden 2019 dengan istilah *partai Allah* dan *partai setan*.

“Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,” (CNN Indonesia, 2018).



Sumber: Kominfo (2019)

Gambar 3.6 Hoaks Jokowi Anti-Islam

Narasi kedua kubu sama-sama memelintir perasaan ketakutan dan keterancaman publik. Perbedaannya hanya berada di titik tematik. Sentimen keumatan dan nasionalistik diadu keampuhannya untuk terkonversi menjadi transformator dukungan elektoral di bilik suara. Nyatanya kemenangan berada di pihak Joko Widodo.

Ma'ruf Amin, ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rais Aam PBNU, dipilih untuk mendampingi Joko Widodo setelah setahun sebelumnya kelompok oposisi Islamis mendeklarasikan dan masif mengampanyekan #2019GantiPresiden baik secara langsung atau melalui media sosial. Pengurus Besar Nahdatul Ulama secara terbuka mendesak Joko Widodo untuk memilih wakil presiden dari kalangan Nahdlatul Ulama karena *'warga Nahdiyyin tidak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 bila calon wakil presiden yang dipilih Jokowi bukan berasal dari kalangan NU'* (Rizki, 2018). Setelah Pilpres 2019 ini, elemen keagamaan kembali mendapati wakilnya di jajaran puncak eksekutif setelah sekian lama, sejak Presiden Abdurrahman Wahid

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(1999–2001) dan Wakil Presiden Hamza Haz (2001–2004), seorang kader NU dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

Kebangkitan kesadaran beragama tidak memiliki hubungan langsung dengan politik Islamisasi. Dengan tesis seperti itu, Hadiz (2019) menawarkan pemahaman narasi politik Islamisasi dengan formalisasi syariat Islam dalam aturan semacam peraturan daerah bahkan pendirian negara Islam justru banyak ditentang oleh kalangan Islam sendiri, terutama oleh kalangan yang mendapat keuntungan dari demokrasi dan pembangunan kapitalistik. Fragmentasi sosiologis yang dibayangkan oleh Hadiz tersebut setidaknya terbukti bahwa suara pemilih muslim terpecah saat pemilihan presiden 2019 yang menyajikan pertarungan aliansi kelompok Islam konservatif dan narasi keumatan yang diusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan masuknya Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo. Ma'ruf Amin berhasil menahan laju amblesnya perolehan suara Joko Widodo dari pemilih muslim (Burhani, 2020).

Proses dan pilihan politik Presiden Joko Widodo telah berkontribusi membentuk atmosfer dan lanskap keberagamaan di ruang publik dan politik. Keputusan dia membubarkan dan melarang dua organisasi Islam konservatif di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (tahun 2017) dan Front Pembela Islam (tahun 2020) dapat diandaikan sebagai letusan kekuatan populisme nasionalistik yang secara perlahan terbentuk. Eksponen kedua organisasi keagamaan tersebut menjadi bagian inti kelompok Islamis yang mendukung Prabowo dengan narasi keumatan. Kekalahan Prabowo pada Pilpres 2019 membuat mereka makin terkucil dalam politik Indonesia. Kelompok ini harus menghadapi serangkaian penangkapan atas tokoh-tokoh pentingnya atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian dan kabar bohong, berafiliasi dengan pelaku terorisme, sampai melakukan makar. Momentum kekalahan Prabowo adalah awal kemunduran posisi kelompok Islamis yang menanjak setelah demonstrasi besar-besaran menuntut pertanggung jawaban hukum pernyataan Basoeki Tjahja Purnama (Ahok) pada 2016 yang dianggap menghina umat Islam. Terlebih keputusan Prabowo bergabung dalam kabinet yang dibentuk

Jokowi sebagai menteri pertahanan telah membuat mereka kehilangan figur utama yang menjadi saluran politik praktis.

Momentum Pilpres 2019 menjadi signifikan untuk dilihat sebagai pergeseran wacana relasi agama dan negara. Figur-figur utama pemerintahan Jokowi periode pertama kembali memperbincangkan dalam forum akademik maupun dialog televisi posisi tengah Indonesia antara negara agama dan sekuler dengan Pancasila sebagai dasar sintesanya. Mahfud MD, yang kala itu menjabat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menjadi salah satunya tokoh tersebut. Dia kembali mengungkit proses pembentukan Indonesia dengan ideologi Pancasila pada Januari 2017, enam bulan sebelum Hizbut Tahrir Indonesia dilarang dan dibubarkan, *“terjadi pertentangan (perdebatan) itu lalu ketemulah kompromi, permufakatan itu Indonesia bukan negara agama seperti yang diinginkan Natsir (Mohammad Natsir), Muhammadiyah, dan NU tetapi juga bukan negara sekuler yang diinginkan Bung Karno, ketemuanya di Negara Pancasila”* (Republika, 2017).

Di bulan yang sama dengan pembubaran dan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (Juli 2017), Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan ulama-ulama berpengaruh di Indonesia di hotel Borobudur, Jakarta. Secara implisit memberi keterangan mengenai situasi penyebab pembubaran HTI.

“Pancasila dan Islam bukan untuk dipertentangkan. Bukan untuk dipisahkan. Pancasila itu dasar negara. Islam itu aqidah yang harus dipedomani. Sila pertama Pancasila adakah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila menghormati dan mengakui nilai-nilai ketuhanan yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Pancasila berdampingan dengan Islam dan agama-agama lain yang dianut bangsa dan rakyat Indonesia. Saya mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk kembali pada semangat ta’awun (tolong menolong, red), bekerjasama, saling tolong menolong dalam semua aspek kehidupan, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, bermartabat,

berkepribadian, adil dan makmur. Kita harus pegang komitmen kebangsaan kita, tidak ada lagi yang boleh mempunyai agenda lain – agenda politik yang tersembunyi atau terang-terangan untuk meruntuhkan NKRI yang berbhineka tunggal ika. Tidak boleh lagi di antara kita ada yang memiliki agenda untuk mengganti sistem negara kita dengan sistem yang bertentangan dengan Pancasila”, (VOA Indonesia, 2017).

Beberapa bulan setelah pelarangan dan pembubaran HTI tersebut, Mahfud MD kembali memberi pernyataan senada, “*Indonesia bukan negara agama bukan pula negara sekuler, tetapi bangsa berketuhanan*”, dalam Kongres Pancasila X yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (Universitas Gadjah Mada, 2018). Saat telah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD di periode kedua Presiden Jokowi menyebut “*Indonesia bukan negara agama sehingga tak bisa memberlakukan hukum suatu agama tertentu. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler sehingga agama-agama yang jadi kesadaran hidup dan keyakinan warga negara harus dilindungi dan membimbing pengelolaan negara*” (CNN Indonesia, 2021). Abdul Malik Fajar, anggota Dewan Pertimbangan Presiden bahkan mewacanakan untuk merekonstruksi relasi agama dan negara (Dewan Pertimbangan Presiden, 2018). Rangkaian pernyataan Presiden Jokowi dan figur yang berada di bawah administrasinya menggambarkan bahwa diskursus mengenai relasi agama dan negara kembali menguat secara sistematis.

Ada peralihan poros wacana populisme yang berkembang; semula Hadiz mendeteksi penggunaan kata *umat* untuk menggantikan kata *rakyat* oleh politisi populis Islam, sekarang populisme di Indonesia kembali ke kata ‘*rakyat*’, misalnya yang terimplikasi dari slogan pemilihan presiden 2014, *Jokowi adalah kita*. Bahwa kondisi *nationalistic turn* ini patut ditambahkan dalam daftar pergeseran yang terjadi di Indonesia setelah Reformasi, tidak lagi hanya *Islamic turn*, *conservative turn*, dan *illiberal democracy*. Setelah kekalahan kelompok Islam konservatif yang mendukung Prabowo pada pilpres 2019, peragaan identitas keislaman berada di bawah bayang-bayang

wacana kebhinekaan, pluralisme, dan Pancasila yang menguat menjadi tersudut oleh label radikal karena dicurigai berafiliasi, merestui, berkontribusi, bahkan melakukan aksi terorisme.

Media massa menjadi salah satu agen sosialisasi narasi nasionalistik yang secara langsung maupun secara indikatif menyudutkan kelompok Islamis tersebut. Hal demikian menimbulkan sikap resistansi dari kelompok tersebut. Stasiun televisi Metro TV milik Surya Paloh yang juga pendiri Partai Nasional Demokrat, pendukung Jokowi sejak pilpres 2014 sampai 2019, menjadi salah satu media massa yang merasakan sikap resistansi tersebut sebagaimana tampak dalam gambar 3.7. Sikap yang tumbuh sejak demonstrasi 212 yang berakibat pemenjaraan Basoeki Tjahja Purnama. Metro TV disebut banyak memberitakan berita bohong. *“Bukan yang pertama Jurnalis Metro TV diusir peserta Aksi Bela Islam, lantaran terlalu sering memberitakan fakta bohong, tendensius, mengadu domba, dan memojokkan umat Islam* (Panjimas, 2017).



Sumber: Panjimas (2017)

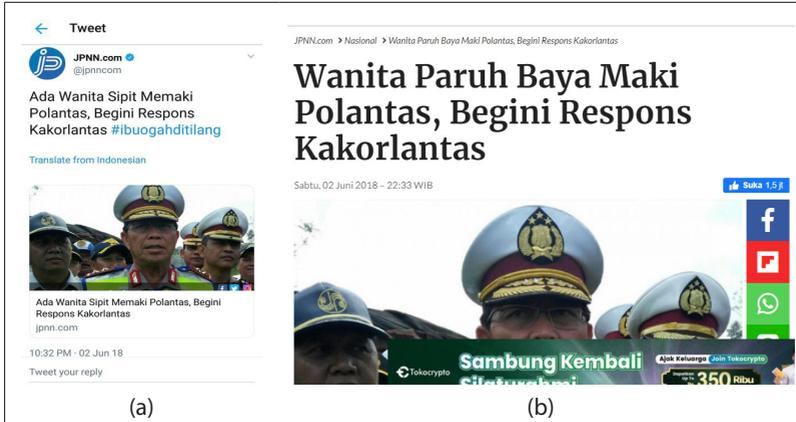
Gambar 3.7 Demonstran membawa poster menolak Metro TV dan Kompas.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penolakan tersebut tidak hanya terjadi di jagat fisik. Di jagat maya, tagar #BoikotMetroTV pernah tersebar secara masif. Plesetan bernada peyoratif dari nama stasiun televisi tersebut pun menandai sikap kelompok Islamis terhadap media massa tersebut, yaitu *Metro Tipu*. Aliansi politik Surya Paloh dengan seteru kontestasi elektoral calon presiden yang didukung, berkontribusi terhadap berkembangnya sikap dari kelompok Islamis tersebut. Metro TV tidak mengakomodasi gerakan Islamisme yang ditandai dengan gerakan 212 berikut rangkaian gerakan lanjutan seperti reuni 212 dan tidak memberikan tempat bagi tokoh-tokoh dari gerakan tersebut, seperti Rizieq Sihab (Sanjaya, 2019).

Proses pengambilan keputusan redaksi pers tentang apakah akan mengabaikan atau melaporkan setiap konten memiliki banyak implikasi untuk memperkuat atau melemahkan demokrasi pemerintahan sendiri. Ambil contoh pada persoalan rasisme, pers justru terlibat dalam keberlangsungannya dan tidak jarang mengeksploitasi rasisme dengan mereproduksi prasangka rasial terhadap suatu kelompok (Van Dijk, 1991). Perkembangan media daring di Indonesia yang bertumpuh pada klik untuk mendapatkan pemasukan telah memengaruhi format berita menjadi *click-bait*. Pada format berita tersebut penggunaan kata-kata yang atraktif sangat signifikan membuat orang mengklik berita. Kata-kata berkonotasi rasial tidak jarang pula menjadi pilihan redaksi media massa sebuah media daring menggunakan atribusi “sipit” untuk mengatribusi seorang wanita yang memaki saat ditilang polisi. Judul berita media daring tersebut: *Ada Wanita Sipit Memaki Polantas, Begini Respons Kakorlantas* sebagaimana tampak dalam gambar 3.8. Berita yang diterbitkan awal Juni 2018 tersebut kemudian diubah menjadi *Wanita Paruh Baya Maki Polantas, Begini Respons Kakorlantas*.

Kata *sipit* dalam budaya Indonesia terasosiasi dengan kata *Cina* atau *Tionghoa* (Ubaidillah 2019b; 2020b). Mata sipit adalah bagian yang menonjol dari kelompok etnik tersebut. Dengan menggunakan siasat *sinekdok pars pro toto* (mengatakan sebagian untuk merujuk kepada keseluruhan), media daring tersebut mencoba merepresentasikan



Sumber: (a) Akun Twitter JPPN.com (2018); (b) JPNN (2018)

Gambar 3.8 Pemberitaan Bersentimen Rasial: (a) Judul Berita Awal; (b) Judul Berita Revisi

wanita ini arogan karena kecinaannya yang diprasangkai dengan keberlimpahan harta sehingga dia berhak arogan.

Celah ketidakpercayaan dalam pola konsumsi masyarakat terhadap berita serta pola produksi informasi oleh media massa sendiri kemudian diisi oleh disinformasi, hoaks, atau rumor. Konservatisme identitas keislaman yang diidentifikasi oleh kelompok Islamis ini dapat mengarahkan proses interpretasi informasi. Telah banyak studi yang mengungkapkan bahwa fenomena disinformasi dinaungi oleh dimensi yang lebih luas, yakni dunia pasca-kebenaran yang (*post-truth*) yang lebih menempatkan relasi kebenaran dengan perasaan dan identitas daripada dengan fakta (Ylä-Anttila, 2018; Bergmann, 2018; Cosentino, 2020).

Segregasi penerimaan media massa yang dilatari sentimen identitas atau politik ini mendapat penjelasan yang gayut dengan artikel Walter *et al.* (2019). Artikel tersebut ditulis dalam konteks demokrasi Amerika Serikat yang secara ideologi politik tersegregrasi dalam dua kanal politik; Demokrat dan Republik. Partai pertama dianggap

Buku ini tidak diperjualbelikan.

liberal dan konservatif untuk yang kedua. Artikel ini menunjukkan bahwa konservatisme politik yang terjadi di sana membuat efektivitas penanganan disinformasi menggunakan cek fakta menurun karena konservatisme politik tersebut membuat masyarakat merasionalisasi informasi yang didapatkan berdasarkan motivasi tertentu (*motivated reasoning*). Masyarakat sangat percaya terhadap klarifikasi disinformasi bila informasi tersebut menguntungkan afiliasi politiknya. Begitu pun sebaliknya, mereka menjadi ragu akan klarifikasi jika klarifikasi tersebut berdampak buruk bagi afiliasi politiknya. Pilihan informasi dan sumber informasi menjadi tindakan politik.

Cek fakta pada masa pemilu bisa menjadi kurang efektif karena orang berada dalam puncak keadaan merasionalisasikan sesuatu dengan motivasi politis tertentu. Meski bila dibandingkan dengan konteks Amerika Serikat yang polarisasi politiknya bersumber dari aspek formal-struktural karena sistem afiliasi dua partai, sementara Indonesia menggunakan sistem multi-partai, polarisasi di Indonesia lebih bersifat sosiokultural yang mengacu pada tokoh. Polarisasi pada Pilpres 2019 pun mengacu pada dukungan terhadap Prabowo Subianto atau Joko Widodo.

Konservatisme yang memberi rasa bangga, paling benar, dan keinginan untuk mempertahankan dapat membuat orang menilai suatu informasi bukan berdasarkan benar salah secara objektif, melainkan berdasar kegunaan informasi itu menyokong kepercayaannya. Belum ada riset yang mengatakan bahwa disinformasi menyebabkan konservatisme, tetapi konservatisme yang menyulut terjadinya polarisasi politik, misalnya meningkatkan kerentanan seseorang terjebak disinformasi (Walter et al., 2019) karena perselisihan partisan membuat orang haus akan penegasan keyakinan mereka (Portmess, 2018).

Uraian mengenai perkembangan pers di Indonesia ini mendasari pembahasan penanganan hoaks secara umum di internet dengan pendekatan struktural dan sistemik. Ketidakpercayaan publik terhadap otoritas bukan semata disebabkan oleh hoaks, tetapi justru melandasi tumbuh suburnya hoaks. Pendekatan struktural dan sistemik dilakukan

untuk meninjau ekosistem informasi dan partisipasi publik dalam proses pengelolaan negara. Pendekatan ini mengandaikan secara mandatori bahwa di negara demokratis publik berhak mendapat informasi serta berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut. Penjabaran mengenai persoalan yang membuat saluran informasi tertutup bagi partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penanganan hoaks di Indonesia. Dengan demikian, pola penanganan disinformasi mampu menghentikan perputaran ketidakpercayaan publik ini dan melakukan penindakan kepada empat kategori pelaku produksi dan viralisasi hoaks, yakni produsen, klien yang memberi order produsen, politisi dan pengamat yang kepentingan dan pandangan politiknya selaras dengan produsen, serta konsumen hoaks yang secara voluntaris menyebarkan hoaks (Gunawan & Ratmono, 2020). Penanganan hoaks secara komprehensif dapat menciptakan ekosistem pertukaran pesan terbuka, akuntabel, serta partisipatif di antara publik dan otoritas. Penanganan secara demikian mampu mengeliminasi prasangka bias mengenai pengelolaan negara yang koruptif yang dipercayai oleh publik.

Pendekatan struktural dan sistemik ini dapat diwujudkan dengan mencermati ekosistem informasi publik, baik yang termediasi melalui media massa, maupun saluran yang menghubungkan secara langsung antara publik dengan negara. Dalam konteks media massa, media berperan aktif dalam memediasi bias dan polarisasi dengan mempublikasi berita yang partisan, bahkan media massa memonetisasi hal tersebut (Starr, 2021). Berita partisan ini menjadi preseden bagi penyebaran hoaks di masa sekarang. Penggunaan media secara partisan terkait dengan proses sejarah yang lebih luas dari transformasi sosial, budaya, dan politik melalui imajinasi antagonistik masa lalu, sekarang, dan masa depan yang dihadapi Indonesia. Pemberitaan partisan ini menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi media karena relasi ekonomi-politik media massa tersebut. Hoaks atau disinformasi pun bukan fenomena khas era digital, secara evolutif perangkat dalam ekosistem komunikasi massa, baik radio, berita cetak, maupun televisi juga digunakan untuk menyebarkan hoaks.

Edisi khusus Harian Kompas ‘*Fenomena Banjir Informasi*’ yang terbit 28 Juni 2021 menjadi salah satu upaya untuk membangun kembali otoritas media massa yang sempat runtuh itu. Hoaks dan disinformasi menjadi titik nodal narasi urgensi membangun sumber informasi yang otoritatif, yang tidak lain bisa dibaca sebagai media massa. Maka dari itu, tidak heran pada peringatan hari Pers Nasional tahun 2017 di Maluku, perihal media sosial dan hoaks ini paling banyak diulas dalam diskusi dan pidato (Masha, 2020). Reputasi keluhuran kerja jurnalistik dibangun kembali melalui artikel ‘*Jurnalisme adalah kerja kemanusiaan*’ yang menjadi bagian edisi khusus Harian Kompas tersebut. Artikel tersebut senada dengan kisah yang pernah ditulis Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2003) bahwa Paus Johannes Paulus II di suatu kesempatan pada Juni 2000 mengatakan jurnalisme harus dihayati sebagai misi yang dalam batas tertentu dianggap suci, bertindak-tanduk dengan pemahaman bahwa cara berkomunikasi yang kuat dipercayakan kepada media massa demi kebaikan kita semua.

Otoritas media massa, terutama media daring dibangun pula dengan menyediakan kanal cek fakta yang mengonfirmasi disinformasi yang beredar. Mereka berjejaring dengan sesamanya, seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan konsorsium media dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dengan membangun kanal cekfakta.com. Media massa mengerahkan jurnalisnya untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi dari hoaks yang beredar.

cekfakta.com adalah sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang dibangun di atas API Yudistira oleh MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan bekerja sama dengan beberapa media online yang tergabung di AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) serta didukung oleh Google News Initiative dan Internews serta FirstDraft (cekfakta.com).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab 4

GENEALOGI WACANA BAHAYA DISINFORMASI

Perspektif pers Indonesia memandang fenomena polarisasi politik yang belakangan terjadi memiliki hubungan sebab-akibat dengan disinformasi. Suwarmin, Direktur Bisnis dan Konten Solopos Group yang sekaligus Koordinator Wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dalam diskusi daring dengan tim peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN pada 9 September 2021 menyebut *“polarisasi yang terjadi di masyarakat sebagian besar terjadi karena adanya hoaks atau disinformasi yang sering kali sengaja diproduksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu”*. Publik diarahkan kembali kepada mereka untuk mendapatkan informasi yang benar. Mampukah upaya tersebut menarik kembali orang-orang untuk bergerak kembali mendekati pusat-pusat otoritas yang pernah mereka tinggalkan, sementara struktur ekosistemnya tidak banyak berubah?

Masa awal kemunculan Jokowi di panggung politik nasional sebagai calon presiden dari PDI-Perjuangan disertai dengan praktik manipulasi informasi dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. Informasi mengenai Joko Widodo dipelintir untuk menyudutkannya. Praktik ini masih disebut kampanye hitam atau fitnah pada 2014. Istilah *hoax* atau disinformasi belum populer digunakan secara publik. Dewan Pers menyatakan bahwa tabloid Obor Rakyat bukan merupakan produk pers, salah satunya disebabkan oleh persoalan penyusunan substansi beritanya.

“Isi Obor Rakyat hanya didasarkan pada asumsi dan opini semata. Tak ada satupun prinsip-prinsip jurnalistik, seperti harus faktual, berimbang, tidak memuat hal-hal yang terkait dengan pertentangan SARA, kewajiban melakukan verifikasi, tidak menghakimi serta harus *cover both sides* yang dipenuhi Obor Rakyat,” (Dewan Pers, 2014)

Persona Jokowi dikaitkan dengan agama non-muslim, beretnis Tionghoa, dan memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia sebagaimana tampak dalam artikel Obor Rakyat dalam gambar 4.1. Menurut Ubaidillah dan Hartanto (2020), topik komunisme digunakan karena telah menjadi *memoria passionis* (ingatan akan penderitaan) bagi umat Islam Indonesia sehingga mereka tidak memilih Jokowi saat pilpres 2014 karena menimbulkan persepsi bahwa Jokowi adalah ancaman bagi eksistensi umat Islam di Indonesia.



Sumber: Obor Rakyat (2014)

Gambar 4.1 Cuplikan Artikel Tabloid Obor Rakyat

Pemberitaan yang mengaitkan Jokowi dan PDI-Perjuangan dilakikan pula oleh TV One. Pemberitaan membuat massa pendukung

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Tempo (2014)

Gambar 4.2 Perusakan Kantor Perwakilan TV One Yogyakarta

Jokowi melakukan perusakan kantor wilayah TV One di Yogyakarta sebagaimana tampak dalam gambar 4.2. Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Daerah Istimewa Yogyakarta, Foki Ardiyanto, menyebut aksi perusakan ini dilakukan karena massa bersimpati pada PDI-Perjuangan dan Jokowi yang terus-menerus menjadi korban berita bohong (Tempo, 2014).

Gambar 4.3 menunjukkan Presiden Joko Widodo mulai memberi klarifikasi terhadap narasi yang mengiringi karir politiknya ini pada 2018. Dia menunjukkan salah satu foto yang digunakan dalam narasi hoaks mengenai dia. Beberapa kali Presiden Joko Widodo merespons tuduhan tersebut. Pada kesempatan lain dia mengatakan “*iya saya 4 tahun digitukan diam saja, sekarang saya mau ngomong, PKI bubar tahun 1965 dan tahun 1966, saya lahir tahun 1961, umur saya baru 4 tahun, ada PKI balita?*” (Asmara, 2019).

Masa awal pilpres 2014 dapat dianggap sebagai masa awal kabar bohong atau *hoax* menjadi leksikon politik. Leksikon-leksikon ini mewarnai diskursus elektoral dan politik pemerintahan pada masa-



Sumber: Viva (2018)

Gambar 4.3 Presiden Jokowi mengklarifikasi hoaks PKI mengenai dirinya.

masa setelahnya. Pada tahun 2015, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat edaran yang menetapkan kabar bohong atau *hoax* sebagai salah satu bentuk ujaran kebencian yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Bentuk ujaran kebencian yang diatur dalam surat edaran tersebut antara lain.

- 1) penghinaan,
- 2) pencemaran nama baik,
- 3) penistaan,
- 4) perbuatan tidak menyenangkan,
- 5) memprovokasi,
- 6) menghasut,
- 7) penyebaran berita bohong (Kapolri, 2015, 3).

Menko Polhukam, Wiranto pada 2018 menyebut *hoax* memengaruhi kerukunan beragama dan merupakan ancaman terbaru di bidang siber, meski masih dalam tahap '*hoax sendiri hingga kini*

dipandang belum sampai mengganggu kerukunan sebagai bangsa (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2018).

Presiden Joko Widodo terbilang sering menyinggung soal hoaks atau disinformasi yang marak sekarang. Contohnya saat perayaan Hari Pers Nasional 2017, dia menyebut semua pihak untuk menghentikan penyebaran berita bohong, fitnah, atau yang memecah belah masyarakat (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017). Saat menghadiri peringatan hari lahir Partai Persatuan Pembangunan ke-46 tahun 2019, Jokowi juga memberi pernyataan *“karena urusan politik pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, aset terbesar, modal terbesar kita, persatuan jadi terganggu gara-gara hoaks, gara-gara fitnah, gara-gara ghibah, gara-gara kabar-kabar bohong yang sekarang ini tidak hanya muncul di medsos, tapi muncul dari pintu ke pintu, rumah ke rumah,”* (Sindonews, 2019). Administrasi di bawahnya mengikuti penarasian demikian. Wakil Kepala Intelejen dan Keamanan Polri, Irjen Pol. Suntana dapat menjadi contoh artikulasi narasi tersebut di tingkat pejabat negeri yang menyebut disinformasi sebagai ancaman baru yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa (Tribunnews, 2019). Dalam barisan yang sama, Budi Gunawan dan Barito Mulyono Ratmono (2020) menyebut dalam penyebaran hoaks, disinformasi dan ujaran kebencian, kebebasan berpendapat berubah menjadi kebebasan menyampaikan kebencian (*freedom of hate*) serta merupakankses negatif dari kritik dan sikap resistansi terhadap kebijakan penguasa. Dengan simpulan demikian, penanganan hoaks berbetuk pengetatan komunikasi publik menjadi mungkin.

A. PENANGANAN DISINFORMASI: DARI CEK FAKTA SAMPAI PEMUTUSAN AKSES INTERNET

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kanal cek fakta di situs resminya. Proses klarifikasi informasi didasarkan pada kewenangan yang dimiliki suatu lembaga. Kebenaran tersebut bersifat

final sampai ada klarifikasi lanjutan dari lembaga tersebut. Suara otoritas adalah kebenaran itu sendiri. Saat kerusuhan di Papua 2019, kanal cek fakta Kominfo melansir klasifikasi hoaks atas pemberitaan kematian enam warga sipil yang diberitakan beberapa media daring, baik lokal Papua maupun nasional. Dasar klasifikasi hoaks dalam gambar 4.4 adalah pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal yang menyatakan informasi itu bohong dan dia akan memeriksa penyebar hoaks tersebut (Kominfo, 2019).



Sumber: (a) Belau (2019); Kominfo (2019)

Gambar 4.4 Pelabelan Hoaks Kerusuhan Papua: (a) Berita Awal; (b) Berita Klarifikasi

Selain melalui kanal cek fakta milik Kominfo, lembaga pemerintah secara inisiatif sendiri memberi klarifikasi dan klasifikasi hoaks atas suatu informasi. Contohnya, label hoaks yang disematkan kepolisian melalui akun Twitter Divisi Humas Polri terhadap informasi pengempungan Desa Wadas, Purworejo. Meski ada yang menyanggah label tersebut dengan menyampaikan informasi klarifikasi, otoritas lain justru mengokohkan klaim kepolisian dengan menyebut terjadi ketegangan antara warga yang setuju dan tidak setuju dengan penambangan, seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa polisi sudah bertindak sesuai prosedur di Desa

Wadas, tidak ada kekerasan, tidak ada penembakan (liputan6, 2022). Kepolisian justru hadir sebagai pihak ketiga yang melerai ketegangan horizontal.

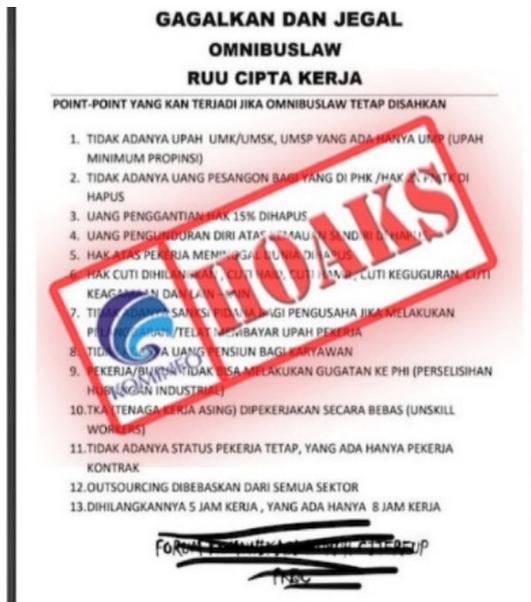
Pola verifikasi yang dilaksanakan lembaga pemerintah tersebut dapat dibandingkan dengan praktik yang dilakukan oleh MAFINDO yang juga menyelenggarakan cek fakta. Pada 2021 lalu, tim peneliti penanganan disinformasi dan keamanan siber dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, BRIN (dahulu LIPI) menyelenggarakan beberapa kali diskusi terpumpun dengan MAFINDO mengenai mekanisme verifikasi cek fakta dan perkembangan lembaga cek fakta di Indonesia. Verifikasi informasi tidak dilakukan terhadap satu sumber saja. Pihak otoritas hanya menjadi salah satu sumber yang ditanyai, seperti halnya sumber yang berbasis kepakaran ilmiah atau tinjauan langsung ke tempat yang diinformasikan melalui mekanisme kerja sama dengan media massa yang dapat mengirimkan jurnalisnya ke sana. Setidaknya, ada tiga sumber yang dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran terhadap satu informasi.

MAFINDO juga menjelaskan bahwa lembaganya menjalankan mekanisme cek fakta yang terbuka. Publik dipersilakan untuk menyampaikan verifikasi atas verifikasi yang dilakukan MAFINDO sejauh memiliki basis faktual. Apabila verifikasi publik terbukti faktual, cek fakta dapat diubah dengan disertai penjelasan kronologis perubahan. MAFINDO menjalankan mekanisme cek fakta ini dengan kesediaan disertifikasi dan diaudit oleh pihak ketiga. Sehingga prinsip *fairness* dan transparansi pun terjaga. Kredibilitasnya sebagai lembaga tercipta secara *accountable*.

Peristiwa paling monumental dalam penanganan disinformasi di Indonesia adalah saat Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa banyak hoaks dan kabar bohong mengenai substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Substansi informasi yang keliru membuat orang menolak dan memprotes RUU tersebut, termasuk demonstrasi yang dilakukan elemen mahasiswa dan buruh di Jakarta dan di beberapa daerah lain pada Oktober 2020. Setelah demonstrasi, sekitar 1000 orang ditangkap.

“Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial,” (pernyataan Presiden Jokowi dikutip dari Kompas.com(2020)).

Satu hari sebelum Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut, Kominfo lebih dahulu merilis klasifikasi informasi mengenai RUU Cipta Kerja melalui situs resminya sebagaimana tampak dalam gambar 4.5 (Kominfo, 2020).



Sumber: Kominfo (2020)

Gambar 4.5 Pelabelan Hoaks RUU Cipta Kerja

Pernyataan ini sama halnya mendelegitimasi sumber epistemologi aksi protes yang dilakukan. Sumber epistemologi yang tidak valid

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi landasan bagi negara untuk mengabaikan protes publik terhadap rancangan undang-undang tersebut. Tidak ada kewajiban untuk merespons sesuatu yang keliru. Persoalan protes dan aspirasi yang semula merupakan perkara politik kenegaraan antara warga dengan negara, diubah menjadi perkara hukum-administratif dengan pernyataan lanjutan Presiden Joko Widodo bahwa bila ada yang tidak sepakat dengan rancangan undang-undang, dipersilakan untuk menempuh upaya uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Operasi kontra-disinformasi RUU Cipta Kerja pun dilakukan oleh kepolisian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan perintah dalam bentuk surat telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 terkait pemantauan dan pengendalian komunikasi publik. Perintah tersebut diwujudkan dengan melakukan *'patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemic Covid-19 dan melakukan kontra narasi isu-su yang mendiskreditkan pemerintah'*.

Pelabelan disinformasi pun pernah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap pemberitaan mengenai kerusakan 2019 di Papua yang menyebabkan korban jiwa yang dilakukan oleh kantor berita Reuters. Fenomena kontestasi kebenaran antara lembaga-lembaga otoritatif seperti ini, bila ditempatkan dalam konteks klarifikasi cek fakta justru menimbulkan kebingungan. Keduanya memiliki landasan bagi informasi klarifikatif, Reuters bertopang pada asas kerja jurnalisme dan Pusat Penerangan TNI berlandaskan kewenangan formalnya dalam bidang pertahanan. Pelabelan hoaks terhadap informasi yang disalurkan aktor non-negara menjadi lazim. Dua peristiwa pelabelan hoaks yang belakangan terjadi adalah dilakukan Polri baik instansi pusat maupun satuan vertikalnya untuk pemberitaan oleh Project Multatuli mengenai kasus perkosaan terhadap tiga anak di Luwu Timur dan konflik agraria di Desa Wadas, Purworejo. Tiga praktik pelabelan hoaks tersebut tersusun dalam gambar 4.6.



Sumber: (a) Remotivi (2019); (b) Gunadha dan Indriani (2021); (c) Gunadha dan Indriani (2022)

Gambar 4.6 Pelabelan Hoaks

Selain melakukan operasi kontra-narasi, pembatasan akses internet pun pernah dilakukan pada kerusuhan Jakarta dan Papua 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan pembatasan internet di Jakarta pada 2019 dilakukan untuk mencegah unggahan video, meme, dan foto mengandung hoaks mengenai demonstrasi penolakan atau ketidakpuasan hasil Pilpres 2019 melalui media sosial (Detiknews, 2019). Pemutusan internet di Papua pun didasari pertimbangan yang sama, yakni untuk meredam hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di Papua. Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, menyatakan bahwa dia dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan tindakan itu atas nama keamanan nasional dan situasi darurat (CNN Indonesia, 2020).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan upaya pembatasan internet tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada pertengahan 2020, hakim memvonis bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kebijakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembatasan akses tersebut (CNN Indonesia, 2020). Saat pemutusan akses internet dilakukan, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis pernyataan bahwa tindakan tersebut memiliki dasar hukum dari tingkat konstitusi UUD 45, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019). Meski dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pengadilan, sepanjang 2020, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia masih menerima laporan terjadi empat kali perlambatan akses internet di Papua, seiring memanasnya konflik di Nduga dan Maybart (CNN, 2021). Termutakhir, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menerima laporan bahwa konflik agraria di Desa Wadas, Purworejo diwarnai pemutusan akses telepon seluler dan internet (YLBHI, 2022).

B. POLISI DAN SKANDAL INFORMASI

Kepolisian menjadi salah satu lembaga negara yang aktif menangani disinformasi atau hoaks di Indonesia. Kepolisian melakukan labelisasi hoaks seperti melalui akun Instagram Divisi Humas Polri dan penanganan secara pidana. Pada masa penyusunan sampai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kepolisian secara aktif di media sosial melakukan kontra-narasi terhadap informasi yang beredar. Kapolri menerbitkan telegram untuk tindakan tersebut. Begitu pun pada 2021, polisi virtual memantau perbincangan publik di media sosial (Tempo, 21).

Hoaks dan ujaran kebencian menjadi leksikon untuk menertibkan politik warga negara. Menurut Tapsell (2019) dalam artikel '*Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised*' yang diterbitkan ISEAS-Yusof Ishak Institute, pelaksanaan aturan pidana dari aturan ujaran kebencian dan hoaks ini berjalan ke arah politis. Lawan-lawan politik rezim lebih lancar diproses hukum pidana. Laporan pidana atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Siregar, salah satu relawan Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019 lalu, sejak

pelaporan pada 2020 –2022, masih berada di tahap pelimpahan dari Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya dan masih dilakukan pendalaman penyelidikan (Warta Ekonomi, 2022).

Kita perlu mundur satu langkah dari serangkaian proses komunikasi penanganan hoaks atau ujaran kebencian dan memberi sorotan pada kasus penembakan Brigadir J yang menggegerkan Indonesia pada pertengahan 2022 serta rangkaian kronologi dan efek lanjutan pada relasi kepolisian dan informasi. Peristiwa ini paling tidak memengaruhi keandalan Polri dalam memproduksi informasi publik. Kita bisa melihat gambaran mengenai itu dari komentar publik di unggahan akun Instagram Divisi Humas Polri. Publik menggugat kinerja Polri, seperti perlakuan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang menjadi tersangka, tetapi tidak ditahan. Keandalan ini menjadi modal sosial vital di era masyarakat informasional. Pembohongan publik terkesan terjadi secara institusional bahkan lintas institusional. Beberapa skandal komunikasi publik melibatkan Polri menunjukkan kebangkitan (kembali) politik warga negara yang beberapa tahun ini disibukkan oleh wacana populis yang terbelah.

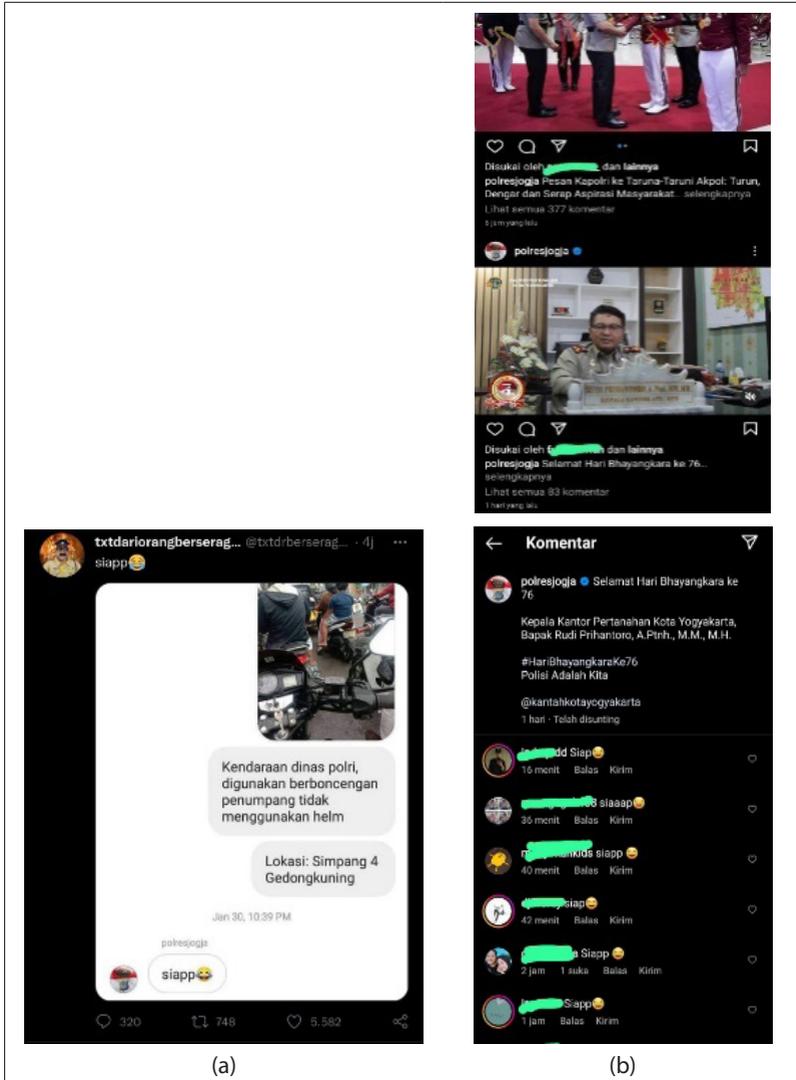
Semenjak tahun 2022, terjadi beberapa skandal kepolisian yang menunjukkan politik warga negara kembali signifikan memengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Terlebih, di masa bersiap untuk 2024 ini, konfigurasi koalisi partai politik dan politik media mulai mencair untuk menemukan ruang-ruang kemungkinan baru tahun politik mendatang. Politik perhatian publik terhadap skandal kepolisian disokong atau didayungi oleh politisi. Pada titik tertentu, kehadiran politisi dalam arus wacana publik memberikan daya dorong terhadap perubahan sosial. Bagian ini menyajikan tiga skandal kepolisian yang mencuat, salah satunya karena menjadi perhatian publik di media sosial.

Skandal pertama tentu saja kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Awal-awal kemunculannya ke publik, skandal ini diwarnai informasi manipulatif yang tersalurkan melalui lembaga

otoritatif. Kita lihat saja konferensi pers Polres Jakarta Selatan yang menyebutkan kematian Brigadir J akibat insiden tembak-menembak (Tribunnews, 2022) dan pernyataan anggota Komisi Kepolisian Nasional, Benny Mamoto menyokong informasi tersebut (Liputan6, 2022). Baru belakangan diketahui bahwa informasi yang disampaikan pada para aktor otoritatif ini ternyata hasil rekayasa Ferdy Sambo. Pembohongan publik terkesan terjadi secara institusional bahkan lintas institusional.

Dalam waktu yang berdekatan, mencuat pula kasus pembunuhan terhadap purnawirawan TNI di Jawa Barat. Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat pada keterangan pers yang ditayangkan KompasTV, menyatakan bahwa pembunuhan itu terjadi berawal dari perkelahian. Namun, setelah publik menaruh perhatian terhadap kasus ini dalam perbincangan media sosial dan media massa turut mengarahkan sorot kamera dan pena, pendalaman dilakukan lagi. Keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat berubah dan menyebut saksi dan tersangka berbohong pada keterangan awal (Republika, 2022). Sangkaan pasal pidana pun berubah dan penanganan kasus ini pun diambil alih oleh Polda Jawa Barat yang semula ditangani oleh Polsek dan Polres Cimahi.

Instansi vertikal Polri lain yang merasakan kekuatan pengawasan diam-diam masyarakat daring adalah Polres Kota Yogyakarta sebagaimana tampak dalam gambar 4.7. Unggahan akun media sosial baik Instagram dan Twitter Kepolisian Resor Kota Yogyakarta banjir komentar asimetris dengan substansi unggahannya. Masyarakat daring hanya menulis 'siaap 😂 (emoji tertawa terbahak)'. Mereka menirukan respons pesan akun polresjogja saat menanggapi laporan warga melalui fitur pesan akun Instagram. Emoji tertawa terbahak menjadi kunci mengapa masyarakat menumpahkan komentar di unggahan-unggahan akun polresjogja. Pelaporan yang dilakukan warga mendapat kesan diejek. Emoji itu menunjukkan laporan masyarakat tidak direspons secara serius.



Sumber: (a) Akun Twitter @textdariorangberseragam (2022); (b) Akun Instagram @polresjogja (2022)

Gambar 4.7 Protes Masyarakat Daring

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tangkapan layar aduan warga yang dilakukan di Instagram tersebut kemudian diunggah akun Twitter yang biasa mengunggah aneka perilaku digital aparat berseragam. Unggahan di Twitter tersebut mendapat respons masif. Setelah itu, masyarakat daring mulai memberikan komentar yang meniru respons akun Instagram polresjogja di setiap unggahannya. Masyarakat membalas dengan menertawakan dan menyepelekan substansi unggahan akun polresjogja. Peredaran transmedia sosial telah memberi kekuatan aduan yang dilakukan untuk direspons secara benar. Akun Twitter polresjogja mulai menjelaskan perihal substansi aduan.

Tidak hanya negara yang mengembangkan teknologi, cara, dan kebijakan pengawasan terhadap kehidupan publik di internet dan media sosial., masyarakat pun melakukan hal yang sama. Masyarakat informasional mengembangkan teknologi pengawasan dengan memanfaatkan fitur media sosial dan membagikan hasil pengawasan terhadap sesamanya. Kita bisa melihat fenomena tersebut dalam akun Twitter anonim yang membahas tindak tanduk orang berseragam. Instansi vertikal Polri, Kepolisian Resor Jogja pernah merasakan getah dari pengawasan masyarakat.

Tangkapan layar yang dibagikan menggerakkan masyarakat lain untuk *spamming* akun Instagram Polres Jogja. Pada titik ini, *spamming* adalah tindakan politik warga negara untuk mendorong lembaga negara menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Setelah aduan yang disepelekan viral di Twitter dan *spamming* di akun Instagram, muncul klarifikasi soal laporan. Pola kerja menanggapi laporan masyarakat yang cenderung berliku ini akhirnya melahirkan anekdot yang ironis: *kalaupun sesuatu terjadi, jangan lapor polisi, lapor netizen saja karena viral dulu baru diurusin*. Viralitas menjadi alat politik masyarakat sebagaimana tampak dalam cuitan yang terdapat dalam gambar 4.8.

Tindakan *spamming* menjadi upaya minimal yang bisa dilakukan oleh warganet untuk ambil bagian dalam mengawasi kerja negara. Tragedi kematian ratusan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang dipicu penembakan gas air mata oleh kepolisian



Sumber: Akun Twitter @mouldie_sep (2022)

Gambar 4.8 Viralitas menjadi alat politik.

sehingga memicu gangguan napas dan kepanikan di area tribun penonton disertai komentar instansi vertikal Polri, Polsek Srandakan, Bantul, Yogyakarta. Akun polseksrandakan memberikan komentar ‘*modyarr*’ dalam gambar 4.9 dan ‘*salut sama pak tentara, musnahkan*’ di unggahan yang menayangkan situasi kacau di stadion. Belakangan pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa akun tersebut dibajak.



Sumber: Merdeka (2022)

Gambar 4.9 Unggahan Polsek Srandakan

Kompol Sudarsono, Kapolsek Srandakan menjelaskan itu setelah ujaran tersebut viral di media sosia (CNN Indonesia, 2022). Namun, akhirnya Polres Bantul memberikan pernyataan bahwa ujaran tersebut memang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang memegang akses ke akun polseksrandakan tersebut (Detik, 2022).

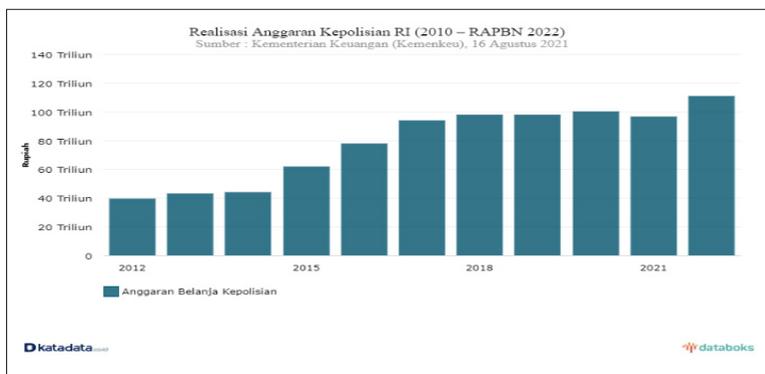
Transformasi digital yang telah didiskusikan oleh banyak ilmuwan mengundang perilaku pengawasan oleh kekuatan dominan, seperti negara maupun korporasi multinasional yang menguasai teknologi telekomunikasi. Pada dasarnya, masyarakat pun melakukan pengawasan serupa terhadap kekuatan-kekuatan dominan tersebut. Hanya tindak lanjut dan hasil pengawasan masyarakat berbeda dengan yang dilakukan oleh negara. Negara dapat membuahkan peraturan dan penjatuhan sanksi dari pengawasan tersebut. Warga menghasilkan olok-olok satir, rumor di kerumunan daring, atau bahkan pengorganisasian petisi. Gambar 4.10 merupakan salah satu contoh meme yang berisikan humor satir terkait kasus Sambo.



Sumber: Akun Twitter @nem_chanel (2022)

Gambar 4.10 Meme Kasus Sambo di Twitter

Penguatan peran polisi di era Presiden Joko Widodo menjadi bagian penting dari konteks penilaian kehidupan demokrasi. Kepolisian Republik Indonesia menjadi bagian dari tiga besar pengguna APBN. Untuk tahun 2023, Komisi III DPRP RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp23.414.397.860.000 sehingga menjadi Rp131.177.499.438.000 (Tirto, 2022). Secara trajektori, memang sejak tahun 2015 atau tahun awal pemerintahan Presiden Jokowi, Polri dapat menyusun APBN-nya sendiri⁴. Polri mengalami tren kenaikan anggaran yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat dari gambar 4.11 yang dikutip dari Kusnandar (2021). Presiden Jokowi memperkuat posisi kepolisian baik sebagai kekuatan keamanan maupun kekuatan politik (Supriatma, 2020).



Sumber: Kusnandar (2021)

Gambar 4.11 Anggaran Kepolisian 2010-RAPBN 2022

Narasi menjaga keamanan dan ketertiban yang melandasi kerja kepolisian baik di lapangan fisik maupun virtual memengaruhi ekspresi dan perbincangan warga negara. Humor tukang bakso membawa *walkie talkie* dalam gambar 4.12 adalah situs yang menggambarkan

4 Presiden Joko Widodo dilantik pada 20 Oktober 2014. Oleh karena itu, APBN yang berjalan merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

bagaimana publik di media sosial memparodikan situasi penuh pengawasan dalam keseharian mereka bermedia sosial.



Sumber: Akun Twitter @_kimjongunch (2020)

Gambar 4.12 Meme dan Unggahan tentang Tukang Bakso yang Membawa *Walkie Talkie*

C. DISINFORMASI DAN KONFLIK

Disinformasi mengancam keamanan nasional dan mengakibatkan konflik kekerasan menjadi argumen utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengambil berbagai tindakan penanganannya. Bagian ini akan menguraikan kronik dan penyebab laten sebuah rumor yang dapat sangat membahayakan. Bagian ini disusun untuk menjadi perbandingan dengan logika internal yang terkandung dalam pilihan wacana dan kebijakan administrasi era Presiden Jokowi. Apakah pilihan tersebut sudah menysasar permasalahan pokok yang menyebabkan konflik meletus hanya karena sebuah rumor. Rangkaian peristiwa yang diperbandingkan berasal baik dari pengalaman Indonesia sendiri maupun dari dunia global.

Uraian kronologis berikut dapat membantu memahami klasifikasi dampak disinformasi yang dilakukan Karpf (2020). Dia membagi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung

dari disinformasi sendiri disebutkan kecil, akan tetapi dampak tidak langsung atau lanjutan ini yang mampu merusak kehidupan dan proses demokrasi, bahkan menjadi dasar bagi elit politik membangun impunitas. Tindakan kekerasan merupakan salah satu bagian dari dampak lanjutan tersebut.

Dua peristiwa kekerasan di Prancis pada 2019 dan 2020 dapat menjadi contoh dampak kekerasan dari disinformasi. Pada 2019 beredar kabar palsu di media sosial Facebook dan Snapchat bahwa telah terjadi penculikan anak berantai di Prancis. Kabar ini memicu serangan terhadap pemukiman orang-orang Roma di sana. Orang-orang keturunan Roma ini menjadi sasaran kekerasan yang dipicu stereotipe bahwa kelompok Gipsi adalah kelompok pencuri dan penculik anak-anak yang berkembang sejak abad pertengahan⁵. Kelompok Gipsi ini telah menjadi korban Holocaust dahulu, tetapi saat ini tetap menjadi sasaran kebencian dan dehumanisasi, sebagai orang yang paling tidak diinginkan di Eropa (Malik, 2018).

Kekerasan yang diakibatkan persebaran kabar bohong kembali terjadi di Prancis 2020 lalu. Seorang guru, Samuel Paty dipenggal oleh seorang muslim keturunan Rusia, Abdullakh Anzorov, setelah seorang murid berbohong bahwa guru tersebut menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya di kelas⁶. Insiden ini menjadi perhatian nasional Prancis dan internasional. Masjid-masjid di Prancis ditutup oleh pemerintah selama enam bulan menyusul salah satu

5 The Guardian melaporkan bahwa kelompok Gipsi ini telah menetap di Prancis telah berabad-abad silam. Namun sejak tahun 1980-an sekitar 20.000 orang, terutama yang berasal dari Rumania dan Bulgaria datang dan membentuk pemukiman kumuh di Prancis dan memicu ketegangan di sana. Kekerasan terhadap kelompok ini terjadi secara serial di beberapa tempat, seperti Colombes, Clichy-sous-Bois, dan Bobigny. The Guardian. 2019. Roma attacked in Paris after fake news reports. <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/27/roma-call-for-protection-after-vigilante-attacks-inspired-by-fake-news>

6 Kronologi kabar bohong yang mengakibatkan kematian Samuel Paty itu bermula seorang murid menceritakan kepada ayahnya bahwa Samuel Paty meminta siswa muslim untuk meninggalkan kelas saat mengajar mengenai kebebasan berpendapat dan penistaan. Sang ayah kemudian mengisi pengaduan hukum terhadap Samuel Paty dan mengampunye secara daring insiden yang diceritakan oleh putrinya. laporan lengkap dapat diakses melalui 'Samuel Paty: French schoolgirl admits lying about murdered teacher, <https://www.bbc.com/news/world-europe-56325254>

masjid di Prancis bagian utara membagikan video di Facebook yang menyerukan untuk mengambil tindakan atas apa yang dilakukan oleh Samuel Paty. Presiden Rusia, Vladimir Putin menyebut insiden ini sebagai pembunuhan barbar. Sulit untuk tidak melihat kekerasan yang timbul akibat persinggungan identitas simbolik ini dalam rentang historis. Meski bukan disebabkan oleh kabar bohong, penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah Prancis, Charlie Hebdo, membuat serangkaian aksi kekerasan menasar kantor redaksi tersebut pada 2011 dan 2015 yang mengakibatkan kerusakan gedung dan korban jiwa.

Dua peristiwa di Prancis sendiri dapat digolongkan dalam dua varian kekerasan yang dipicu oleh misinformasi bila mengikuti klasifikasi Banaji et al. (2019) yang membagi kekerasan dipicu oleh prasangka dan kekerasan dipicu oleh rumor. Meski dalam misinformasi penculikan anak tidak disebutkan mengenai pelakunya adalah kelompok Gipsi, tetapi hasil interpretasi pesan yang memiliki keselarasan dengan prasangka membuat keputusan tindakan diarahkan kepada mereka. Oleh karena itu, peristiwa ini masuk kategori pertama. Sementara itu, kasus yang menimpa Samuel Paty masuk kategori yang kedua karena dia disebut secara eksplisit dalam misinformasi yang beredar.

Dua insiden kekerasan terkait misinformasi yang beredar ini setidaknya menyisakan pertanyaan mengenai bahaya disinformasi atau kabar bohong yang mewabah seiring personalisasi saluran publik yang diinfrastrukturi oleh media sosial dan internet. Dalam konteks demikian apakah semua disinformasi mampu menggerakkan orang? atau hanya disinformasi yang beririsan dengan riwayat sejarah yang dialami atau diyakini oleh seseorang? Jawaban atas pernyataan ini dapat memberi wawasan dalam melakukan penanganan disinformasi secara komprehensif, yang selama ini bertumpu pada dua hal yakni penindakan pidana serta literasi digital semata. Dimensi kultural yang terbentuk secara historis belum disinggung atau tercakup dalam skema penanganan ini karena memandang perilaku tindakan secara individual dan tidak terkait dengan dinamika atau formasi sosial.

Sebagaimana ujaran kebencian, menurut Butler (1997) memiliki jangkang pada realitas sosial masyarakat yang artinya pelaku ujaran kebencian hanya mengulang aransemen yang tersedia, apakah disinformasi pun hanya mengaransemen ulang stereotipe antar-kelompok yang terbentuk dalam riwayat konflik? Keajekan tema dan antagonisme dalam *existing narratives* perlu dicermati karena kedua aspek tersebut telah ada di ingatan kultural (Ubaidillah & Hartanto, 2020) karena kesejajaran antagonisme dapat membuat bias yang telah terbentuk sebelumnya disertakan dalam proses interpretasi suatu pesan dan pengambilan keputusan pasca-interpretasi.

Dua peristiwa Indonesia kontemporer yang senuansa dengan dua peristiwa di Prancis adalah peristiwa pembakaran klenteng dan vihara di Tanjung Balai 2016 lalu, dan kerusuhan di Wamena 2019. Perusakan tempat ibadah yang dianggap representasi dari kelompok etnik Tionghoa menyusul beredarnya disinformasi '*orang cina melarang adzan*'. Peristiwa individual melibatkan kebertetangaan orang-orang tertentu berubah menjadi kemarahan massal berbasis identitas. Peristiwa yang menggambarkan ketegangan relasi sosial dua kelompok masyarakat ini sudah tergambar sejak awal tahun 2000-an. Sejak peresmian patung Buddha Amithaba 2009 setinggi enam meter, sudah menimbulkan penolakan dari berbagai pihak terutama karena membuat nuansa ruang publik kota Tanjung Balai menjadi tidak islami yang akhirnya Kementerian Agama sebagai representasi negara memilih jalan meminta untuk memindahkan patung tersebut demi perdamaian (Halimatus'adiyah, 2020). Peristiwa itu pun memiliki lapisan konteks multidimensional yang menyangkut riwayat konflik sebelumnya pada 1946, 1966, dan 1998 di wilayah tersebut, kecemasan ekonomi, pola interaksi masing-masing aktor sosial, termasuk pula aktor negara (Mulyartono et al., 2017).

Sementara itu, kerusuhan Wamena yang dipicu disinformasi '*seorang guru memanggil murid dengan sebutan kera*' berada dalam konteks ketegangan demonstrasi anti-rasisme yang terjadi di Papua dan kota-kota di Indonesia menyusul peristiwa aparaturnegara memaki mahasiswa Papua di Surabaya dengan sebutan monyet.

Tindakan rasisme yang berkelindan dalam operasi otoritas di Papua memberikan corak sistemik dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Surabaya tersebut. Dalam buku '*Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Papua*' yang memuat memoar Filep Karma dan menceritakan rasialisme sebagai jantung persoalan pun dipraktikkan dalam kekerasan oleh aparaturnegara (Karma, 2014). Pemakian dengan kebinatangan, seperti babi, anjing, dan monyet pun dilakukan oleh aktor yang sama (Hernawan, 2015).

Kerusuhan di Kabupaten Sumbawa pada 2013 pun tidak lepas dari pengaruh faktor struktural. Keluarga korban gadis Samawa percaya bahwa kematian disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya, seorang polisi beretnis Bali-Hindu, karena menemukan bekas luka lebam di jenazahnya. Masyarakat lain yang ikut berunjuk rasa pun percaya karena foto gadis tersebut tersebar melalui SMS Multimedia dan aplikasi pesan Blackberry Messenger. Keterangan pers polisi tersebut tidak diterima oleh keluarga maupun pengunjung rasa. Masyarakat Sumbawa, terutama elemen mahasiswanya memiliki pengalaman konfliktual yang dipicu kematian seorang mahasiswa setelah ditangkap polisi pada 2003. Pengalaman itu menimbulkan persoalan kepercayaan terhadap transparansi kerja kepolisian di Kabupaten Sumbawa. Persoalan kepercayaan ini memperburuk kondisi yang ada pada masa krisis 2013. Masyarakat seolah memiliki preseden bahwa keterangan yang diberikan kepolisian bukanlah fakta senyatanya tetapi penyembunyian kebenaran. Mereka tetap percaya bahwa gadis Samawa itu diperkosa dan dibunuh, dan yang dilakukan kepolisian dengan keterangan persnya hanya melindungi koleganya.

Pelaku yang disangka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan ini memiliki identitas ganda yang sama-sama memiliki riwayat konfliktual dengan etnis Samawa. Selain sebagai polisi, dia juga beretnis Bali dan beragama Hindu. Sementara, etnis Samawa beragama Islam. Kedua etnis memiliki riwayat konflik yang berulang dan banyak disebabkan oleh persoalan yang sama seperti kerusuhan 2013, yaitu percintaan dan wanita. Kerusuhan 2013 terbilang lebih kecil dibandingkan konflik keduanya pada 1980 yang mengakibatkan

korban jiwa. Massa pengunjung rasa beralih menyoar Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka yang terletak di jantung kota Sumbawa Besar setelah mereka tidak merasa terpenuhi tuntutan mereka oleh kepolisian. Mereka yang berusaha menemui pemerintah kabupaten pun hanya berjumpa dengan gedung kosong karena bupati beserta aparaturnya tengah mengikuti apel peringatan ulang tahun Kabupaten Sumbawa di lapangan sekitar Istana Dalam Loka.

Peralihan tujuan penyampaian tuntutan dari kepolisian dan pemerintah kabupaten ke lembaga etnis Bali-agama Hindu ini menandai otoritas formal telah ditinggalkan oleh pengunjung rasa. Salah seorang demonstran berorasi di depan Banjar Suka Duka dan Pura Agung Girinatha, *'kita sudah tidak percaya dengan polisi karena polisi sering merekayasa kasus, saudara-saudara tolong untuk tidak meninggalkan tempat. Polisi jangan menangkap kami karena kami bukan penjahat dan kita harus menuntut tuntas'*. Kronik semacam ini perlu mendapat perhatian lebih karena mengasumsikan otoritas sebagai pusat-pusat yang menaungi justru ditinggalkan saat menghadapi masa krisis. Kita bisa membayangkan hukum sentrifugal dan sentripetal berlangsung sekaligus. Saat pusat-pusat lama ditinggalkan berarti pula masyarakat bergerak mencari pusat-pusat yang baru. Menurut Elecheroth dan Reicher (2017) suatu kelompok tidak akan selalu melakukan tindakan berdasar kebencian, terutama bila ada pusat kekuatan yang mampu menahan gerakan sentrifugal. Kekuatan mereka diredam dalam naungan kekuatan pusat tersebut. Mereka menasibkan keyakinan mereka sendiri sebagai pusat yang menggerakkan keputusan-keputusan hidup. Itu berarti pelepasan diri dari norma yang melingkungi diri sebelumnya, mereka memperhadapkan diri langsung dengan yang ditujunya. Negara sebagai pihak ketiga yang menengahi relasi antar-orang dan antar-kelompok dianggap gagal mengakomodasi kepentingan mereka. Kini yang berhadapan hanya orang Samawa dan orang Bali-Hindu yang dipisahkan tembok dan gerbang Banjar Suka Duka hingga meletusnya kerusuhan dan menyebar ke seluruh kota Sumbawa Besar.

Tabel 4.1 Periode Rumor di Indonesia Pascareformasi

Kerusuhan	Lisan	Cetak	SMS	Media Sosial	Pers
Banyuwangi (1998)	√				√
Maluku Utara (1999; 2000)	√	√			
Poso (1999–2001)	√	√			
Ambon (2011)	√		√		
Sumbawa (2013)	√		√	√	
Yogyakarta (2014)				√	√
Tanjung Balai (2016)	√			√	
Jakarta (2019)	√	√		√	√
Wamena, Papua (2019)	√			√	

Sumber: Herriman (2010; 2015), Retsikas (2006), dan Bubandt (2000; 2008)

Tabel 4.1 menunjukkan evolusi persebaran rumor dalam kerusuhan atau konflik yang terjadi di Indonesia setelah Reformasi. Rumor ninja di Banyuwangi pada 1998 yang pertama menimbulkan pembunuhan terhadap orang-orang disangka dukun santet. Eskalasi penyebaran dan dampak lanjutan rumor ini tidak lepas dari peran media massa yang kala itu mengalami industrilisasi masa awal (Herriman, 2010; 2015). Meski tidak secara langsung terkait dengan politik kekuasaan Indonesia kala itu, rumor ini tetap menantang legitimasi negara karena lambannya penanganan digugat oleh Nahdlatul Ulama (Retsikas, 2006). Target pembunuhan dari aksi ninja tersebut banyak berasal dari kalangan ulama dan kiai Nahdiyin. Pola persebaran yang menunjukkan saling pengaruh antara pers dan medium komunikasi lain, seperti lisan atau media sosial, terjadi pula pada kerusuhan elektoral pada 2014 dan 2019.

Pada 2014 stasiun televisi TV One memberitakan rumor mengenai hubungan Jokowi dengan Partai Komunis Indonesia yang muncul di media sosial dan tabloid *Obor Rakyat*. Pemberitaan ini menimbulkan aksi perusakan kantor perwakilan TV One di Yogyakarta oleh simpatisan PDI-P dan relawan Jokowi. Jokowi membela aksi tersebut dan menyalahkan media yang terkesan menyebarkan fitnah.

“Kalau media bukan ngebanu dan manas-manasin ya gimana? Tiap hari gitu, hanya dipanas-panasi, gimana relawan kita enggak panas,”

“Salah yang manas-manasin. Jangan salahin relawannya, salahin yang buat isu, fitnah dan buat panas,” pernyataan Jokowi yang dikutip Merdeka (/2014)

Peristiwa 2019 pun demikian. Rumor mengenai kecurangan pemilu presiden yang ditemukan terstruktur, sistematis, dan masif oleh calon petahana Jokowi, tersirkulasi juga di media massa dan media sosial. Tuntutan pembatalan hasil pemilu yang dicurangi ini menjadi agenda demonstrasi kelompok Islamis di Jakarta pada Mei 2019. Demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Sembilan orang tewas dalam kerusuhan tersebut dan menurut kepolisian, dua di antara korban jiwa tersebut tewas ditembak orang tidak dikenal (BBC, 2019). Masing-masing peristiwa kerusuhan yang ada dalam tabel 4.1 memiliki faktor pendorong kultural dan struktural, tidak semata persebaran rumor yang menyebabkan. Faktor struktural ada sebelum rumor tersebar maupun setelah rumor tersebut dalam bentuk pola penanganan dan pengendalian terhadapnya.

Bab 5

POLITIK HOAKS DALAM TIPOLOGI DEMOKRASI ILLIBERAL DI INDONESIA

Fenomena disinformasi di Indonesia sudah berada di titik menciptakan polarisasi kebenaran. Satu pihak melabeli pihak lain telah menyampaikan disinformasi kemudian pihak yang dilabeli pun balik melakukan pelabelan. Kontestasi kebenaran yang lazim dalam diskursus publik berakhir di jalan yang paralel tanpa titik temu. Satu kebenaran dianggap benar hanya jika mendapat topangan kekuasaan, terutama kekuasaan formal. Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan stasiun televisi, Jhonny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi menyebut *'kalau pemerintah sudah bilang hoaks, ya dia hoaks, kenapa membantah?'* pada 2020 lalu. Situasi belakangan ini jauh dari gambaran yang disimpulkan oleh Herriman (2015) bahwa kajian media dan komunikasi publik di Indonesia perlu diarahkan pada saling pengaruh antara komunikasi yang terteknologi dengan komunikasi oral. Pembahasan mengenai kontrol dan kuasa sensor negara tidak lagi relevan sejak kejatuhan Soeharto pada 1998. Bahaya disinformasi menjadi mitos politik yang melegitimasi otoritas negara mendayakan kuasanya untuk mengklasifikasi mana informasi yang benar dan mana yang hoaks, bahkan sampai memutus akses jaringan telekomunikasi di suatu wilayah.

Kekuasaan yang melatarbelakangi kebenaran dalam dunia *illiberal* memiliki implikasi beruntun terhadap dasar-dasar berdemokrasi lainnya. Henry Subiakto, Guru Besar Universitas Airlangga yang juga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjabat staf ahli Menteri Komunikasi dan Informasi, adalah contoh satu di antara orang yang mendapat impunitas di luar undang-undang. Meski cuitan yang dia sampaikan di Twitter pada 16 Desember 2021 dalam gambar 6.1 terverifikasi keliru karena mengandung foto dengan keterangan teks tidak tepat, dan belum ada asas pengecualian yang merinci tentang disinformasi yang berterima secara hukum dan dianggap melanggar hukum, dia tidak diproses pidana.



Sumber: Satrio (2021)

Gambar 5.1 Cuitan Herry Subiakto di Twitter yang Terklarifikasi Keliru

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Cuitan keliru Herry Subiakto ini ramai-ramai diverifikasi oleh warganet. Menanggapi respons tersebut, Henry memberi klarifikasi yang menarik. Dia menjadikan *subliminal message* soal kedamaian yang tidak mampu ditangkap oleh warganet sebagai jalan keluar dari kemelut. Bukan hanya digunakan untuk menyelamatkan muka, pesan damai ini juga digunakan untuk menyerang balik orang-orang yang meributkan cuitan kelirunya dengan melabeli mereka sebagai '*orang-orang pecinta keributan*'. Lengkapnya, dia menuliskan '*sy akui foto itu salah sejarahnya, tp pesan utuhnya adlah perang akan bawa penderitaan ke bnyk orang, mk kita hrs jaga negeri ini agar damai, foto hanya ilustrasi. Bagi orang2 pecinta keributan bkn pesan damainya yg ditangkap, tp kekeliruan sejarah fotonya yg dianggap pidana*'.

Herriman (2010; 2015) mengajukan bahwa saling pengaruh antara komunikasi oral dengan industrialisasi pers memperbesar cakupan dan dampak rumor ninja yang tersebar pada 1998 dan mengakibatkan kematian orang yang disangka dukun santet. Bagian ini menggunakan logika kesinambungan dan perubahan yang sama seperti Herriman. Hanya saja dalam bagian ini menyoroti interaksi teknologi digital dan corak kuasa di negara pasca-otoritarianisme yang tidak mudah mengambil wujud demokratis sepenuhnya. Ilustrasi dua aktor dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas menjadi pembuka bagaimana sel-sel *illiberal* masih hidup di tubuh demokrasi Indonesia pascareformasi. Gejala-gejalanya makin muncul dan kentara di era digital ini. Gejala mengklaim kembali otoritas tanpa interupsi.

Indonesia memiliki pengalaman kekerasan bahkan kerusuhan yang diwarnai peredaran rumor atau disinformasi, seperti di Ambon (2011), Kabupaten Sumbawa (2013), Tanjung Balai (2016), Jakarta (2019) dan Wamena (2019). Meski demikian, beberapa ilmuwan menautkan disinformasi dengan politik, seperti Tapsell (2019) yang menyebut penanganan hoaks atau informasi palsu dan menyesatkan, secara pidana umum, lebih bersifat politis karena penangkapan yang dilakukan lebih banyak terhadap pelaku yang mendiskreditkan

Presiden Joko Widodo. Praktik disinformasi bukan saja dilakukan oleh individu secara voluntaris, tetapi dilakukan secara terorganisir sebagaimana dilaporkan oleh temuan penelitian Internet Institute of Oxford (Bradshaw & Howard, 2019). Dari penelitian yang sama, Indonesia termasuk dari 75% negara yang menggunakan strategi disinformasi dan manipulasi yang dijalankan oleh *cyber troops* untuk kepentingan politik. Untuk konteks Indonesia, praktik disinformasi dan manipulasi ini dilakukan oleh politisi, partai politik, dan konsultan yang diperkirakan menghabiskan dana 1-50 miliar rupiah.

Temuan investigasi kantor berita BBC dan Australian Strategic Policy Institute pun menggambarkan bahwa penggunaan robot siber untuk menyebarkan hoaks pro-pemerintah mengenai Papua dengan tujuan memengaruhi kebijakan internasional negara lain di forum-forum internasional, dapat menjadi contoh praktik disinformasi yang terorganisir (Strick & Syavira, 2019). Seiring rangkaian peristiwa demonstrasi yang masif di Papua dan bahkan meningkat menjadi kerusuhan, seperti di Wamena, sehingga menjadi perhatian internasional, strategi mendistorsi informasi mengenai Papua pun dilakukan menggunakan akun bot untuk menyebarkan konten dari akun utama di Twitter. Jaringan akun bot tersebut mengarahkan pembaca ke situs *westpapuaindonesia.com*.

Sementara itu, penggunaan iklan berbayar yang diperkirakan menghabiskan dana US\$300.000, atau sekitar Rp4,2 miliar ditempuh untuk platform Facebook yang menarget pengguna di luar Indonesia. Oleh karena itu, menurut Miller dan Robinson (2019), praktik disinformasi lebih dilakukan oleh aktor yang memiliki sumber daya kekuasaan, seperti dana, otoritas keilmuan atau politik. Sumber daya kekuasaan ini dapat membuat disinformasi disalah-kenali menjadi informasi yang pada gilirannya digunakan untuk menentukan keputusan hidup seseorang atau masyarakat. Narasi bahaya disinformasi menormalisasi tindakan *illiberal* dalam menangani disinformasi. Tekanan dan tarikan publik atas pilihan-pilihan tersebut mereproduksi keduanya.

A. DARI DEMOKRASI *ILLIBERAL* KE PEMBANGUNAN PERDAMAIAN *ILLIBERAL*

Bagian ini menawarkan elaborasi penanganan disinformasi era internet dengan corak dan perkembangan *illiberal* dari demokrasi Indonesia. Konteks makro *illiberal* demokrasi Indonesia yang telah banyak dibahas para ilmuwan politik sangat menolng dalam mengerangka pembahasan penanganan disinformasi era internet ini. Konteks ini memiliki genealogi dari era kolonialisme dan ajaran tradisional yang berkembang, kemudian bermetamorfosis secara sempurna pada pemerintahan Presiden Soeharto dalam balutan politik integralistik dan kekeluargaan (Bourchier, 2015). Hak-hak dasar warga negara disisihkan untuk membiayai kebaikan bersama atau berkembangnya demokrasi paternalistik.

Kondisi ini juga dipengaruhi faktor eksternal yang berasal dari promotor demokrasi global, yaitu Amerika Serikat. Promosi demokrasi Amerika Serikat mengandung paradoks *illiberal* saat bertemu dengan kepentingan untuk mengamankan investasi internasional di Indonesia dari gejolak sosial (Hadiz, 2004). Paradoks demokratisasi Indonesia: liberalisasi pasar yang memungkinkan kepemilikan pribadi terakumulasi dan investasi transnasional, di sisi lain rasionalisasi teknokratik menjadi pembenar kebijakan otoriter terhadap kekuatan masyarakat sipil yang mampu mempertanyakan ketimpangan yang dihasilkan oleh pasar bebas (Hadiz & Robison, 2005). Demokrasi yang tidak disertai perlindungan terhadap berbagai hak, termasuk untuk sebagian kalangan yang paling tidak disertai perlindungan tersebut (Hadiz, 2019). Pada era presiden Joko Widodo, corak demokrasi *illiberal* ini seakan mengalami pendalaman (Hadiz, 2017) dan tidak hanya dipraktikkan oleh negara, kelompok sipil, seperti kelompok (populis) Islam pun turut ambil bagian (Mietzner, 2018) dengan politik manipulasi hukum pencemaran nama baik, makar, penodaan agama, dan undang-undang ormas (Aspinall & Warburton, 2017).

Corak demokrasi Indonesia yang *illiberal* ini tidak hanya menjadi perhatian ilmuwan politik. Keberagamaan, terutama yang

berhubungan dengan kehidupan publik dan politik, berlangsung dengan corak yang sama. Burhani (2020) mengikhtisarkan bahwa sejak Reformasi 1998 telah terjadi tiga kali pergeseran kebangkitan keberagaman di Indonesia, yaitu *Islamic turn*, *conservative turn*, dan *illiberal democracy*. Kelompok konservatif mengambil strategi apropriasi terhadap diskursus dan pranata demokrasi Indonesia. Strategi ini memungkinkan mereka untuk menginterpretasi ulang wacana toleransi dan kerukunan beragama dengan tujuan konservatif mereka, bahkan mengusung formalisasi agama dalam sistem politik demokrasi dengan peraturan syariah atau NKRI bersyariah. Ilustrasi Burhani menunjukkan demokrasi sejatinya adalah arena pertarungan kelompok-kelompok sosial. Corak *illiberal* dibawa oleh pemenang-pemenang politik. Relasi yang terbangun dalam ilustrasi tersebut bersifat horizontal. Demokrasi *illiberal* menjadi terang tidak hanya dipraktikkan oleh negara dan perangkat aparatusnya, kelompok sipil pun turut ambil bagian, baik melalui proses politik maupun mempraktikkannya di kehidupan publik, seperti penyerangan komunitas sektarian dan penolakan penyelenggaraan atau pendirian rumah ibadah.

Karakteristik *illiberal* ini meresap dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di Indonesia (Wilson, 2020). Sebuah pilihan penyelesaian konflik dalam kerangka *illiberal* tidak terlepas pula dari meta-aturan kontestasi elit dan tawar-menawar dalam negara untuk mendistribusikan kekuasaan dan bea (Smith et al., 2020) dan memfokuskan upaya untuk menciptakan stabilitas politik tanpa menawarkan resolusi konflik yang dapat dinegoisasikan antara pihak-pihak yang terlibat (Smith, 2020). Imajinasi mengenai stabilitas politik, konsolidasi demokratik, dan pertumbuhan ekonomi ini meski jarang menjadi penyebab langsung kekerasan komunal, ketika bertepatan dengan momentum perselisihan antar-kelompok, tiga faktor ini menambahi daya letusnya (Wilson, 2015). Otoritas yang bekerja menyelesaikan konflik dengan ketiga orientasi itu lebih sering menghasilkan kondisi konflik yang lebih buruk atau paling tidak menghasilkan alasan untuk konflik di masa depan (Wilson, 2020).

Praktik pembangunan perdamaian secara *illiberal* sudah berlangsung sejak pra-Presiden Joko Widodo. Pada masa setelah kerusuhan di Kabupaten Sumbawa yang meletus pada awal 2013, kepolisian mengambil langkah taktis dengan mengendalikan informasi yang beredar di publik mengenai pembunuhan seorang gadis Samawa oleh pemuda beretnis Bali-Hindu pada akhir tahun 2013. Mencegah kerusuhan terulang menjadi dasar utama langkah tersebut. Kepolisian menampilkan inisial nama pelaku dalam pemberitaan berbeda dengan nama asli pemuda Bali tersebut. Di dalam dokumen pengadilan pun tidak tercantum nama alias yang mengindikasikan inisial dalam pemberitaan. Sementara itu, korban ditampilkan nama lengkapnya. Pemberitaan kasus ini dilakukan oleh media lokal maupun nasional melalui kanal daringnya. Langkah pengendalian ini bila ditilik dari lensa hak asasi atas informasi dan demokrasi, menyalahi prinsip non-manipulasi, termasuk menyalahi etik pemberitaan kekerasan seksual karena menampilkan nama korban. Lebih jauh, langkah ini seolah memberi preseden bahkan mengonfirmasi prasangka pengunjung rasa perihai transparansi dan manipulasi informasi, yang bila ditinjau secara kronik, kerusuhan 2013 justru membarai kemarahan pengunjung rasa hingga meninggalkan pusat-pusat otoritas dan memperhadapkan diri dengan etnis Bali secara langsung.

Peristiwa kerusuhan di Kabupaten Sumbawa pada 2013 memiliki pola keterulangan dan faktor rumor yang serupa dengan kekerasan komunal yang kembali terjadi di Ambon pada 2011. Rumor kematian seorang tukang ojek muslim yang dibunuh oleh orang Kristen tersebar melalui pesan singkat (Qurtuby, 2013). Informasi simpang siur ini hanya berdasar pada lokasi kematian yang terjadi di daerah pemukiman warga beragama Kristiani. Wilson (2015) mengilustrasikan kejadian ini dalam kerangka pembangunan perdamaian *illiberal* di Indonesia. Kepolisian menyebut kematian tersebut karena pengendara ojek menabrak tembok dan menolak untuk mengklarifikasi perbedaan yang jelas mengenai kematian itu. Umat Islam menyakini bahwa mereka sengaja menghindari kebenaran. Wilson menambahkan bahwa masyarakat, baik dari pihak Muslim maupun Kristiani meyakini aparat

keamanan justru memprovokasi kekerasan untuk membenarkan kehadiran dan kepentingan ekonomi mereka. Corak *illiberal* ini tidak terlepas dari bingkai demokrasi Indonesia secara keseluruhan yang berakar pada logika politik uang dan kekerasan politik (Hadiz, 2004).

Pengerahan kekuasaan tanpa didahului, diiringi, atau dilegitimasi oleh wacana hanya akan mendapat respons negatif. Diktum tersebut secara implisit terkandung dalam pembagian dua instrumen konstruksi masyarakat yang diuraikan Lincoln (1989), bahwa konstruksi masyarakat hanya mampu efektif tatkala menggunakan instrumen kekuatan (*force*) dan wacana (*discourse*) sekaligus. Dia berangkat dari epistemologi praksis komunikasi Gramscian dalam memahami kondisi dan perubahan masyarakat. Meski Lincoln menitikberatkan pada mode wacana mitos, pada tahap tertentu buku ini tidak menggunakan pembagian mitos dan sejarah. Buku ini menguniversalisasi pembagian itu ke tingkat genus wacana. Wacana sebagai genus memiliki peran signifikan dalam konstruksi masyarakat, tidak hanya per bagian di tingkat spesies, seperti mitos dan sejarah. Mitologisasi suatu peristiwa masa lalu oleh rezim atau penentangannya untuk mengklaim suatu otoritas tertentu adalah poin krusial dari Lincoln yang berguna untuk memahami fenomena populisme yang melingkungi fenomena disinformasi ini.

Sebagaimana disebutkan di bagian awal, buku ini menempatkan diskusi mengenai hoaks dalam ekosistem informasi publik. Bagian ini memperluas kembali konteks dari pembahasan, yakni sampai menyentuh perihal karakter demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, konteks diskusi tersaji secara berjenjang dari mikro, meso, dan makro. Demokrasi *illiberal* dibahas di sini sebagai konteks makro dari ekosistem informasi publik yang di dalamnya diwarnai oleh fenomena hoaks. Kerangka Lincoln ini dihadirkan untuk merangkai sejarah dan perkembangan relasi media dan negara hingga menghasilkan fenomena populisme termediasi yang dipengaruhi relasi ekonomi-politik media tersebut. Selanjutnya, fenomena populisme tersebut juga telah menghasilkan respons resistan dari masyarakat pada beberapa konteks contoh yang disajikan. Fenomena hoaks dapat

dipandang sebagai bagian dari sikap resistansi tersebut. Publik yang telah meninggalkan sumber informasi otoritatif mencari sumber informasi baru yang melayani kepentingannya, pada titik ini hoaks bisa mudah dipercaya oleh orang.

Presiden Joko Widodo menarasikan bahaya disinformasi tidak berpangkal pada rujukan sejarah konflik kekerasan yang diwarnai oleh rumor, seperti Ambon, Poso, atau Banyuwangi. Penilaian administrasi di bawahnya pun menggambarkan asumsi kontemporer digital dalam memahami disinformasi. Ada perbedaan antara konflik masa lalu yang dipengaruhi persebaran rumor dan yang dipengaruhi disinformasi pada Indonesia era digital ini. Tidak mengherankan, bila Wiranto pada 2018 menyebut bahwa hoaks adalah ancaman terbaru di era digital. Pilihan wacana bahaya yang disampaikan Presiden Joko Widodo lebih menginstrumentasi pengalaman dirinya menjadi sasaran hoaks dan pengalaman elektoral yang dilalui untuk memperkuat legitimasi atas klaim bahaya tersebut. Narasi bahaya disinformasi telah berlangsung secara gradual sejak awal pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo. Proses gradual ini mampu mengondisikan struktur apriori yang dapat membuat tindakan *illiberal* secara administrasi, seperti pemutusan akses atau pelabelan hoaks secara sepihak atas kerja jurnalistik dapat dimaknai sebagai sebuah kenormalan. Terlebih ada preseden tabloid *Obor Rakyat* yang mendaku sebagai produk jurnalistik.

Sebelum 2019, penanganan disinformasi di Indonesia tidak mengambil cara yang mencolok. Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai pun tidak membuat otoritas (pusat) merasa perlu mengambil tindakan tersebut. Tahun 2019 adalah tahun terberat bagi demokratisasi komunikasi publik di Indonesia. Kejadian ini menandai kali pertama dalam demokrasi media sosial dipenuhi disinformasi dan disinformasi tersebut memicu kerusuhan pemilu (Temby, 2019). Di penghujung tahun, kerusuhan meletus di Papua karena ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (Ubaidillah, 2019). Kedua peristiwa tersebut ditanggapi dengan melakukan pelambatan atau pemutusan akses internet. Tindakan *illiberal* memerangi disinformasi

dilakukan terutama ketika disinformasi memicu konflik pemilu atau membangkitkan konflik laten, seperti konflik Papua.

Pengabaian protes publik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 oleh presiden Joko Widodo pun didasari penilaian bahwa protes tersebut bersumber dari hoaks. Pilihan kebijakan menampilkan politik performansi siapa yang berwenang. Pada titik ini, disinformasi telah mengakibatkan relasi politik warga dan negara berganti menjadi sekadar hubungan hukum yang diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Pengawasan terhadap perbincangan publik bahkan kontra-narasi protes dilakukan kepolisian sebelum Presiden Joko Widodo memberi keterangan pers. Pilihan kebijakan kepolisian berada dalam domain kehumasan yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahwa setelah dua tahun itu, pembatasan akses internet di wilayah konflik menjadi banyak dilaporkan oleh masyarakat.

Rangkaian aktor yang tergambar dalam uraian genealogi wacana maupun penanganan disinformasi memperlihatkan bahwa aktor yang terlibat berhubungan secara struktural dan sistemik. Penanganan *illiberal* berjalan sistemik; terjalin rangkaian tindakan antar-lembaga yang saling menguatkan. Pilihan memutus akses internet diperkuat oleh pernyataan resmi Kominfo. Klaim hoaks satu lembaga didasari hasil verifikasi lembaga pemerintah lain. Memandang strategi disinformasi sebagai bentuk *illiberal*, maka apa yang terjadi di demokrasi Indonesia yang dipenuhi disinformasi dengan tepat disebut Mietzner (2018) melawan *illiberal* dengan *illiberal*. Pada titik ini, istilah instrumentasi disinformasi atau hoaks bermakna ganda: pertama, bermakna upaya mendapatkan kekuasaan politik dengan memproduksi hoaks, seperti yang dijabarkan Gunawan dan Ratmono (2020) dengan kasus Saracen, dan kedua, menginstrumentasi label dan bahaya hoaks untuk mendasari pilihan kebijakan publik atau menyudutkan lawan politik.

Pilihan kebijakan penanganan tidak menjawab persoalan laten yang mampu mengungkit rumor menjadi konflik kekerasan, seperti kepercayaan dan partisipasi publik terhadap pengelolaan negara, moderasi relasi sosial masyarakat yang memiliki riwayat konflik, atau

instrumentasi disinformasi oleh elit politik baik nasional maupun lokal. Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi contoh kekinian yang diwarnai agitasi dan disinformasi yang mengobarkan ketegangan etnis (Dayak-Melayu) dan agama (Islam-Kristiani), serta menimbulkan kekerasan (Rafsadie et al., 2020).

Dalam tipologi pembangunan perdamaian *illiberal* disebut Smith (2014; 2020), Indonesia masih tergolong memiliki upaya reformis dalam menemukan solusi yang didiskusikan bersama. Titik tengah masih diupayakan di antara berbagai tekanan dan tarikan aktor demokrasi. Pendekatan *illiberal* terletak di dalam spektrum yang mengandung elemen reformis dan *illiberal* sekaligus dan hanya menggunakan lembaga demokratis untuk tujuan tidak demokratis. Pada fragmen protes Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, poin-poin yang diuraikan Smith tergambar meski pada titik tertentu, perlu mengupas lapisan tipis tentang protes yang ditanggapi dengan dialog politik dan protes yang diarahkan untuk selesai di meja sidang uji materi undang-undang yang telah disahkan. Secara tipologi, corak *illiberal* Indonesia berada pada kategori tipis (*thin*).

Apa yang berlangsung pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tidak khas karena masa-masa sebelumnya pun sudah berlangsung. Sama seperti disebut Smith (2014; 2020) dan Wilson (2020) bahwa penyelesaian konflik Papua telah berlangsung *illiberal*. Adanya disinformasi yang mengakibatkan pemutusan akses internet menjadi sekadar varian dari pendekatan tersebut. Begitu pula dalam hal penanganan rumor sebelum era pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti penanganan kasus Sumbawa pada 2013, sudah menunjukkan sifat *illiberal*. Apa yang dilaksanakan pada era Presiden Joko Widodo bersifat melanjutkan pendekatan tersebut menjadi tampak di panggung politik nasional.

Menurut Bennett dan Livingston (2018), strategi disinformasi dan berita bohong digunakan dalam menyerang dan menggoyahkan lawan serta membangun mode pemerintahan *illiberal*. Kasus Indonesia dapat menambah sintesa Bennett dan Livingston atas pengamatan politik Amerika Serikat. Penarasian bahaya disinformasi untuk mendahului,

mengiringi, dan melegitimasi operasi kebijakan eksekutif pun merupakan mode pemerintahan *illiberal*. Pada titik ini, disinformasi menjadi penanda yang mengambang. Entah disinformasi didayagunakan sebagai strategi komunikasi maupun musuh publik dalam wacana dan kuasa politisi populis, keduanya sama-sama berpotensi memundurkan demokrasi. Pilihan wacana dan bentuk kekuatan simultan satu sama lain. Uraian mengenai respons pemerintah ini menemukan relevansi teoretiknya pada instrumen konstruksi masyarakat yang perlu mengandalkan dua instrument sekaligus, yaitu wacana (*discourse*) dan kekuatan (*force*) (Lincoln, 1989). Bahaya disinformasi yang menjadi poros wacana merupakan bentuk persuasi ideologis. Konfigurasi kuasa demikian masih berada di halaman yang sama dengan pernyataan Bakker (2017) bahwa di Indonesia, baik aktor negara maupun non-negara memperdebatkan legitimasi tindakan kekerasan publik mereka, jika tidak melalui hukum, maka oleh adat, agama, atau dukungan masyarakat. Lanskap politik kontemporer menunjukkan bahwa sifat *illiberal* tidak hanya diidap oleh negara, kelompok masyarakat sipil pun demikian, terutama yang berposisi dengan rezim. Yang diperlihatkan sekarang adalah pertarungan antar-cara *illiberal* (Mieztner, 2018).

Rumor atau misinformasi tidak menjadi pemicu tunggal kerusuhan dan konflik. Ada beberapa faktor penyerta yang turut memengaruhinya. Pertama, secara diskursif rumor terkait dengan riwayat konflik pihak yang terlibat. Kedua, konteks relasi pihak yang terlibat dengan otoritas dalam kondisi tegang atau tidak efektifnya intervensi yang dilakukan. Uraian di atas menggambarkan disinformasi dihimpit dua faktor signifikan, yakni faktor struktural dan kultural sekaligus. Faktor struktural terejawantah dalam aspek macetnya komunikasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan negara yang berbuah ketidakpercayaan.

Sementara, faktor kultural menampung aspek konservatisme masyarakat terhadap identitas primordial. Kelindan di antara kedua faktor tersebut justru dapat mengeskalasi disinformasi menjadi kerusakan fisik. Otoritas hanya mengakuisisi bahwa disinformasi dapat memicu bahaya disharmoni, tetapi mengesampingkan faktor

struktural yang menghimpitnya. Prakondisi fenomena disinformasi sendiri salah satunya adalah kualitas kepercayaan publik terhadap pengelolaan negara. Disinformasi dapat digambarkan sebagai siklus yang dimulai dengan ketidakpercayaan publik dan menghasilkan lagi ketidakpercayaan publik. Kemunculan teori konspirasi mengenai pandemi Covid-19 yang dapat digolongkan sebagai informasi palsu pun dipengaruhi oleh ketegangan publik dengan negara dalam hal melihat penanganan pandemi (Nadzir, 2020). Bahaya disharmoni signifikan untuk mengetengahkan kembali kontrol terhadap perbincangan publik. Penanganan hoaks atau informasi palsu dan menyesatkan secara pidana umum pun lebih bernuansa politis karena penangkapan yang dilakukan lebih banyak terhadap pelaku yang mendiskreditkan Presiden Joko Widodo (Tapsell, 2019).

Bahaya disinformasi menjadi titik nodal yang menstabilkan posisi wacana kontra-disinformasi dalam ekosistem informasi publik. Penilaian reduksionis terhadap hubungan persebaran rumor-misinformasi dan kekerasan komunal menghasilkan beragam keputusan publik, seperti pengendalian informasi di media massa, pelabelan sepihak terhadap produk pers tanpa melalui mekanisme jurnalistik, pengabaian aspirasi publik dengan menyerang sumber epistemik gerakan yang palsu, dan pengerahan kekuatan keamanan untuk mendistorsi diskursus publik yang justru menunjukkan gejala-gejala regresi demokrasi.

Konteks polarisasi politik dan media menjadi faktor signifikan dalam memahami fenomena hoaks di Indonesia. Temuan riset Rianto (2020) yang menyoal penyebaran hoaks saat pilpres 2019 yang menunjukkan hoaks disebar untuk mengincar sisi ideologis masyarakat pun dapat dibentangkan horizon historisnya lebih jauh. Sisi ideologis ini dapat dikatakan terbentuk sejak 2014 bahkan lebih lampau mengingat ada kesejajaran kerja ideologis dari hoaks dan pencitraan diri politisi di masa sebelum 2014 melalui pemberitaan pers sebagai pencitraan (Haryatmoko, 2010). Kesenambungan kontestan yang memperebutkan kekuasaan ini menjadi proses penebalan antagonisme dalam rentang waktu itu. Terlebih antagonisme tersebut

melibatkan identitas primordial dan narasi historis yang telah menjadi memori akan rasa sakit (Ubaidillah & Hartanto, 2020). Publik yang mengidap struktur mental polarisasi demikian menjadi sumber daya sosial dalam mendisposisikannya sewaktu-waktu untuk menopang keputusan politik. Model mental tersebut menentukan proses produksi dan interpretasi wacana (van Dijk, 1991).

Narasi mengenai bahaya atau resiko dari disinformasi memiliki kemanjuran performatif untuk menanamkan kekuasaan dan kekuatan negara dan signifikansinya (Telle, 2016). Dengan narasi bahaya disinformasi ini, apa yang dilakukan mendapat persetujuan publik. Sama seperti misinformasi '*senjata pemusnah massal*' mendasari persetujuan dan dukungan publik terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak (Lewandowsky et al., 2013). Mungkin dalam konteks demikian, kita dapat memahami pembagian dampak disinformasi dari Karpf (2021) yang membaginya menjadi langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dari disinformasi sendiri berskala kecil dan berada di ranah epistemik individu saja, namun dampak tidak langsung dari disinformasi yang ultima adalah instrumentasinya menjadi landasan membangun impunitas bagi politisi. Pada titik tersebut, fenomena penanganan disinformasi justru mendegradasi kualitas relasi tanggung jawab dan hak demokratis antara negara dan masyarakat. Pelabelan disinformasi melemparkan tanggung jawab untuk semua masalah kepada pundak pihak lain. Asesmen yang dilakukan otoritas seolah mengabaikan dimensi struktural sebagai faktor pemicu kerusakan.

Kontrol negara tidak benar-benar menghilang bersama kejatuhan Presiden Soeharto 23 tahun lalu, melainkan direplikasi dan direproduksi dengan banyak cara baru di banyak tempat. Mode operasi kekuasaan dalam bidang komunikasi dan informasi di Indonesia masa pascareformasi ini terwujud dalam '*war on rumours*'. Pada bagian ini pun, perlu pemikiran tajam untuk kembali mendefinisikan reformasi sebagai perubahan disruptif di tengah upaya negara menasbihkan diri kembali sebagai sumber kebenaran tunggal tanpa menyediakan ruang argumentatif. Rumor atau disinformasi menjadi kebenaran politis. Disinformasi berkelindan dengan terminologi SARA mengondisikan

wacana publik tidak dalam upaya merusak legitimasi kekuasaan. Monopoli saluran komunikasi dan informasi dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Pemerintah Presiden Soeharto mengadministrasi pengawasan terhadap lalu lintas informasi yang beredar di publik melalui Departemen Penerangan maupun institusi militer. Mendudukan langkah penanganan disinformasi digital dalam lintasan tersebut menunjukkan ketersambungan hasrat kuat akan ketertiban dan keamanan yang telah berjalan dan terbentuk secara historis dan telah sampai di tahap diterima sebagai aksioma administrasi yang berjalan di Indonesia. Mistifikasi ketertiban ini menghasilkan kebijakan diskriminatif.

B. CATATAN PENUTUP

Fenomena hoaks terkait dengan asas dasar kehidupan demokrasi. Hoaks sebagai diskursus mengimplikasikan upaya membangun, mengokohkan, atau bahkan merebut legitimasi dan otoritas aktor sosial. Persis pada titik itu makna politik dalam judul bermuara. Makna kata politik menjadi lebih luas daripada sekadar politik pemerintahan atau formal. Pembahasan mengenai hoaks ditautkan kembali dengan ekosistem informasi publik Indonesia yang telah memiliki sejarah panjang akan monopoli, represi, industrialisasi, hingga politisasi hasil relasi antara media dan negara. Penjelasan historis ini merupakan bagian untuk memberi sejarah dan arkeologi teks dan organisasi, sehingga dapat memberi gambaran perkembangan relasi kedua aktor tersebut dalam membentuk corak *illiberal* dari demokrasi yang berkembang di Indonesia. Sejarah rumor dan konflik pun dihadirkan untuk alasan yang sama.

Buku ini menempatkan wacana bahaya disinformasi sebagai politik hoaks era Presiden Jokowi dalam ketersambungannya dengan corak demokrasi *illiberal* Indonesia yang memiliki genealogi hingga era kolonial yang memengaruhi relasi negara dan media massa. Pada kerja media era Orde Baru, media massa mengalami dominasi administrasi, sedangkan era Presiden Joko Widodo terjalin melalui aliansi politik

yang diperantarai penguasaan kapital industri media. Aliansi ini menjawab pertanyaan Wodak (2001) mengenai “bagaimana wacana tersebut diproduksi dan membangun institusi sosial” dan “bagaimana aktor sosial mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan wacana tersebut dalam sebuah komunitas”.

Aktor sosial tidak mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan secara tunggal. Demokratisasi Indonesia meski bersifat *illiberal* mengharuskan mereka untuk berkolaborasi dan membangun aliansi. Kekuasaan tidak lagi mampu membendung arus pengetahuan yang dialirkan teknologi komunikasi. Pembangunan aliansi dengan aktor sosial, seperti media massa, yang menguasai alat produksi informasi diperlukan. Negara tidak dapat langsung menunjukkan kekuasaannya secara absolut. Dalam tipologi Althusser (1970), *repressive state apparatuses*, seperti pemerintah atau militer, tidak dapat berdiri sendiri berkuasa tanpa adanya koalisi dengan *ideological state apparatuses*, seperti pendidikan, agama, dan media massa. Bahaya disinformasi sebagai narasi sama-sama disosialisasikan oleh kedua jenis aktor tersebut. Disinformasi sebagai fenomena alternatif pemerolehan informasi sama-sama mengancam legitimasi keduanya sebagai aktor mapan. Pertemuan kepentingan negara dan media massa menjaga legitimasi ini membuat narasi bahaya disinformasi tersebar berulang-ulang.

Dalam batas tertentu, keputusan-keputusan *illiberal* yang mengabaikan hak warga negara, didukung oleh warga negara yang lain. Pertanyaan laten yang menyertai kondisi demikian adalah mengapa warga negara mendukung pengabaian warga negara lain? Ada beberapa faktor yang mampu menjelaskan kondisi demikian. Pertama, konteks polarisasi yang telah terbentuk sebelumnya sangat signifikan memengaruhinya. Bahwa dukungan terhadap suatu kebijakan publik bukan lahir dari evaluasi intrinsik elemen konstitutif keputusan tersebut dan pengaruhnya terhadap pondasi bernegara, tetapi lebih didasarkan dukungan populis terhadap politisi ideal. Dukungan terhadap kebijakan *illiberal* yang dapat menjadi upaya menyelamatkan muka diri sendiri dengan selalu menampilkan politisi

ideal tetap menghasilkan keputusan publik yang ideal sehingga harus selalu didukung. Pada titik ini, polarisasi politik telah menyusup ke proses kognitif individual kemudian menghasilkan *motivated reasoning*.

Kedua, persepsi terhadap bahaya disinformasi telah membentuk ekosistem informasi publik yang baru. Negara pun dengan segala kelembagaan dan aparatur di berbagai tingkatan melakukan kerja-kerja kontra-disinformasi. Singkatnya, narasi bahaya disinformasi telah berada dalam ekosistem yang mapan. Keputusan-keputusan *illiberal* menemukan alasan untuk dinormalisasi demi mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan oleh fenomena yang dinarasikan tersebut. Penanganan disinformasi yang dilakukan berada di sisi hilir komunikasi atau tahap informasi telah tersebar dan informasi itu diklarifikasi atau dikenakan hukum tertentu terhadap pembuat dan penyebarannya, alih-alih mereformasi 'sisi penawaran' dari komunikasi publik yang jauh lebih membutuhkan kemauan dan keterbukaan politik antara negara dan warga. Sebelum polarisasi politik terjadi pun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada persoalan kepercayaan publik yang perlu menjadi perhatian dalam membangun informasi publik. Kurangnya transparansi dan ruang dialogis telah menjadi isu dalam interaksi antara negara dengan publik. Literasi digital tidak diarahkan untuk membangun kapasitas publik untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan membuat jaringan konteks multidimensional dari informasi, melainkan menyandingkan kebenaran dengan kewenangan. Bahwa ketika menghadapi informasi yang tidak jelas, perhatian perlu diarahkan ke aktor-aktor yang berwenang. Keberwenangan secara normatif menjadi penentu kebenaran. Di sisi lain, telah banyak contoh keberwenangan yang terdiferensiasi dan menyebar telah menghasilkan tumpang tindih kebenaran dan silang sengkabut 'jadi siapa yang benar', baik antar-aktor negara maupun antara negara dengan media. Literasi digital terbentur dalam menjelaskan masalah demikian kepada publik.

Perenungan akhir dari buku ini membawa kita menyadari bahwa watak dan budaya politik *illiberal* telah ada sebelum fenomena penanganan disinformasi. Bahwa pola penanganan disinformasi atau 'war on rumors' secara demikian hanya menjadi varian. Pada titik ini,

buku ini berupaya memberi sumbangan kecil dalam perkembangan diskusi mengenai corak demokrasi tersebut. Fenomena ‘*war on rumors*’ ini dapat dibandingkan dengan fenomena global, seperti ‘*war on terorr*s’ yang mengemuka pada awal tahun 2000 (Blakeley, 2007) atau ‘*war on drugs*’ (Kenny & Holmes, 2020) yang dianggap mengundang kembali peran negara yang berlebihan dan ekseisif terhadap demokrasi di tataran global. Ketiga fenomena ini sama-sama didahului atau bahkan menciptakan kondisi populis yang berwatak konservatif. Terlepas dari keterbatasan buku ini, upaya ini menawarkan perspektif lain dalam memandang fenomena disinformasi yang tengah menjadi perhatian banyak pihak.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

REFERENSI

- @_kimjongunch. (2020, 7 April). Abang tukang bakso bawa walkie talky. https://twitter.com/___KimJongUnch/status/1247420323554660353
- @mouldie_sep. (2022, 15 Oktober). Viral adalah satu2nya cara rakyat melindungi diri dari aparat. https://twitter.com/mouldie_sep/status/1581232404181577729
- @nem_chanel. (2022, 16 Agustus). SAMBO (sama-sama boong). https://twitter.com/nem_chanel/status/1559360461568880640
- @polresjoga. (2022, 2 Juli). Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat. ... https://www.instagram.com/p/CfgpYPZJttu/?img_index=1
- @textdarioangberseragam. (2022, 6 Juli). siaap👁️. <https://twitter.com/textdarioangberseragam/status/1543239368940617729>
- Althusser, L. (1970). *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards and Investigation)*. “Lenin and Philosophy” and Other Essays (Ben Brewster, penerj). La Pensée. (Karya original diterbitkan 1968).
- Anjar, A. (2020, 19 Oktober). CekFakta #80 Menkominfo: Kalau Pemerintah Sudah Bilang Hoaks, Ya Hoaks. *Tempo.co*. <https://newsletter.tempoco.com/read/1397397/cekfakta-80-menkominfo-kalau-pemerintah-sudah-bilang-hoaks-ya-hoaks>

- Antara. (2012, 26 Desember). Jokowi tinjau gorong-gorong bundaran HI. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/350300/jokowi-tinjau-gorong-gorong-bundaran-hi>
- Asmara, G.C. (2019, 8 Januari). Jokowi Marah, Lagi-lagi soal Tuduhan PKI. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190109133718-4-49771/jokowi-marah-lagi-lagi-soal-tuduhan-pki>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections Amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2017, November). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. In *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*, 1–4. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.1>
- Bakker, L. (2017). Lynching, Public Violence, and the Internet in Indonesia. Dalam M J. Pfeifer (ed.), *Global Lynching and Collective Violence: Asia, Africa, and the Middle East volume I*, 10–33. University OF Illinois Press. <https://doi.org/10.5406/illinois/9780252040801.003.0002>
- Banaji, S., Bhat, R., Agarwal, A., Passanha, N., & Sadhana Pravin, M. (2019). *WhatsApp vigilantes: an exploration of citizen reception and circulation of WhatsApp misinformation linked to mob violence in India*. Department of Media and Communications, London School of Economics and Political Science, London, UK.
- BBC. (2019, 5 Juli). Korban tewas kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta 'ditembak orang tak dikenal'. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48872996>
- Belau, A. (2019, 28 Agustus). Di Deiyai Aparat Hambur Tembakan, 6 Orang Tewas. *Suara Papua*. <https://suarapapua.com/2019/08/28/di-deiyai-aparat-hambur-tembakan-6-orang-tewas/>
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic

- institutions. *European journal of communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Bergmann, E. (2018). *Conspiracy & Populism: The Politics of Misinformation*. Palgrave Macmillan Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-90359-0>
- Bisnis. (2012, 27 Desember). Banjir Jakarta: Jokowi siapkan gorong-gorong raksasa. *Bisnis*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20121227/77/111751/banjir-jakarta-jokowi-siapkan-gorong-gorong-raksasa>
- Blakeley, R. (2007). Bringing the state back into terrorism studies. *European Political Science*, 6(3), 228–235. <https://doi.org/10.1057/palgrave.eps.2210139>
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203379721>
- Bradshaw, S. & Howard, P. N. (2019). *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Oxford Internet Institute dan University of Oxford.
- Bubandt, N. O. (2000). Conspiracy Theories, Apocalyptic Narratives and The Discursive Construction of 'the Violence in Maluku'. *Antropologi Indonesia*, 63, 15–32. https://pure.au.dk/ws/portalfiles/portal/12750395/Conspiracy_Theories_in_Maluku__Bubandt_2000_.pdf
- Bubandt, N. O. (2008). Rumors, Pamphlets, and the Politics of Paranoia in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 67(3), 789–817. <https://doi.org/10.1017/S0021911808001162>
- Burhani, A. N. (2020). *Heresy and Politics: How Indonesian Islam Deals with Extremism, Pluralism, and Populism*. Suara Muhammadiyah.
- Butler, J. (1997). *Excitable Speech: A Politic of the Performative*. Routledge.
- Cekfakta. tanpa tahun. About. <https://cekfakta.com/about>

- CNN Indonesia. (2018, 13 April). Amien Rais Dikotomikan Partai Setan dan Partai Allah. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-raais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>
- CNN Indonesia. (2020, 4 Juni). Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>
- CNN Indonesia. (2021, 22 April). SAFENet: Ada 4 Kasus Perlambatan Internet di Papua. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210421200419-185-633076/safenet-ada-4-kasus-perlambatan-internet-di-papua-tahun-2020>
- CNN Indonesia. (2021, 10 November). Mahfud MD di Hadapan Ulama: Indonesia Bukan Negara Agama. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110092637-32-719047/mahfud-md-di-hadapan-ulama-indonesia-bukan-negara-agama>
- CNN Indonesia. (2022, 3 Oktober). Viral Akun Polsek Srandakan Komentar 'Miring' Tragedi Kanjuruhan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221003072405-192-855487/viral-akun-polsek-srandakan-komentar-miring-tragedi-kanjuruhan>
- Cosentino, G. (2020). The Tost-truth World Order. *In Social Media and the Post-Truth World Order*, 1–31. Palgrave Pivot, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43005-4_1
- Detik. (2012, 26 Desember). Eaaa! Jokowi Nyemplung di Gorong-gorong. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-2127008/-eaaa-jokowi-nyemplung-di-gorong-gorong-hi>.
- Detik. (2022, 3 Oktober). Akui Anggota Lalai, Polisi Minta Maaf soal Cuitan di Akun Polsek Srandakan. *Detik*. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6326874/akui-anggota-lalai-polisi-minta-maaf-soal-cuitan-di-akun-polsek-srandakan>
- Dewan Pertimbangan Presiden. (2017, 13 November). Rekonstruksi Relasi Agama dan Negara. <https://wantimpres.go.id/id/rekonstruksi-relasi-agama-dan-negara/>

- Dewan Pers. (2014). Sikapi 'Obor Rakyat', Dewan Pers Kirim Surat ke Kapolri. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/707/> diakses 1 April 2022.
- Dhakidae, D. (1996). Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru. Dalam *Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed). Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Partai Orde Baru*. Mizan.
- Elecheroth, G. & Reicher, S. (2017). *Identity, Violence and Power: Mobilising Hatred, Demobilising Dissent*. Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-31728-5>
- Farkas, J., & Schou, J. (2018). Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood. *Javnost-The Public*, 5(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463047>
- Foucault, M. (1995). *Discipline & Punish: The Birth of the Prison*. Penguin Books.
- Freelon, D., & Wells, C. (2020): Disinformation as Political Communication. *Political Communication*, 37(2), 145–156. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1723755>
- Freedman, D. (2021). Media Policy Failure and the Emergence of Right-wing Populism. Dalam *H. Tumber and S. Waisbord (ed), The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism*, 411–419. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003004431-43>
- George, C. (2017). *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, terj. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM. Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina.
- Google Trends. (2022). Penelusuran kata pencitraan. <https://trends.google.co.id/trends/explore?date=2004-01-01%202022-12-31&geo=ID&q=pencitraan&hl=id>
- Google Trends. (2022). Penelusuran kata pencitraan dengan topik politik. <https://trends.google.co.id/trends/explore?cat=396&date=2004-01-01%202022-12-31&geo=ID&q=pencitraan&hl=id>
- Gunadha, R & Indriani, R.M.D. (2021, 7 Oktober). Sebut Berita '3 Anak Saya Diperkosa' Hoaks, Akun Polres Luwu

- Timur Banjir Kecamatan. Suara. <https://www.suara.com/news/2021/10/07/163718/sebut-berita-3-anak-saya-diperkosa-hoaks-akun-polres-luwu-timur-banjir-kecamatan>
- Gunadha, R & Indriani, R.M.D. (2022, 10 Februari). Polri Sebut Berita Aparat Kepung Warga Wadas di Masjid Hoaks, Wadas Melawan Bongkar Fakta Kebohongan Publik. Suara. <https://www.suara.com/news/2022/02/10/161400/polri-sebut-aparat-kepung-warga-wadas-di-masjid-hoaks-wadas-melawan-bongkar-fakta-kebohongan-publik>
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2020). *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan Praktik-praktiknya di Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Harsin, J. (2018). *Post-Truth and Critical Communication Studies*. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.757>
- Haryatmoko, J. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. (2019). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan (cetakan ketiga)*. Rajawali Press.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hadiz, V. R. (2004). The Rise of Neo-Third Worldism? The Indonesian Trajectory and the Consolidation of Illiberal Democracy. *Third World Quarterly*, 25(1), 55–71. <https://www.jstor.org/stable/3993777>
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Hadiz, V. R. (2019). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Pustaka LP3ES.
- Hadiz, V. R. dan Robison, R. (2005). Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox. *Journal of*

Development Studies, 41(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/022038042000309223>

- Halimatusa'diah. (2020). Mengkaji untuk Advokasi: Kasus Aliansi Sumatera Utara Bersatu dan Setara Institute, dalam A. H. Burhani (ed.), *Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*, 173–220. Gramedia Pustaka Utama.
- Hall, S. (1973). *Encoding and Decoding in the Television Discourse*. Centre for Contemporary Cultural Studies, Birmingham.
- Hernawan, B. (2015). Torture as a Mode of Governance: Reflections on the Phenomenon of Torture in Papua, Indonesia. In 'Stone-Age' to 'Real-Time': *Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*, edited by Martin Slama and Jenny Munro, 195–220. ANU Press, The Australian National University, Canberra, Australia . <https://doi.org/10.22459/FSART.04.2015.08>
- Herriman, N. (2010). The Great Rumor Mill: Gossip, Mass Media, and the Ninja Fear. *The Journal Asian Studies*, 69(3), 723–748. <https://doi.org/10.1017/S0021911810001488>
- Herriman, N. (2015). 'Hard-Copy': Print Media and Rumour in Indonesia. *South East Asia Research*, 23(1), 45–60. <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0247>
- Humprecht, E., Esser, F., & Van Aelst, P. (2020). Resilience to Online Disinformation: A Framework for Cross-National Comparative Research. *The International Journal of Press/Politics*, 25(3), 493–516. <https://doi.org/10.1177/1940161219900126>
- Idris, I. K. (2022, 8 Maret). Penghentian Hoaks dan Apa Manfaat Literasi Digital Pemerintah Jokowi. *Koran Tempo*. <https://koran.tempo.co/read/opini/472243/penghentian-hoaks-dan-apa-manfaat-literasi-digital-pemerintah-jokowi>
- Ishadi, S.K. (2014). *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-hari terakhir Presiden Soeharto*. Kompas Gramedia.
- JPNN. (2018, 2 Juni). Wanita Paruh Baya Maki Polantas, Begini Respons Kakorlantas. *JPNN*. <https://www.jpnn.com/news/wanita-paruh-baya-maki-polantas-begini-respons-kakorlantas>

- JPPN.com (@jppncom). (2018, 2 Juni). Ada wanita sipit memaki Polantas, begini respons Kakorlantas. <https://twitter.com/jppncom/status/1002935881345273856>
- Juditha, C. (2019). Agenda Setting Penyebaran Hoaks Dimedia Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 155–168. <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.669>
- Karma, F. (2014). *Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Papua*. Deiyai.
- Karpf, D. (2020). How Digital Disinformation Turned Dangerous. In W. L. Benneth dan S. Livingston (ed.) *The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States*, 153–168. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108914628.006>
- Karundeng, N. N. (2019). Senjakala Tempo Bela Bigot KPK, Hina Simbol Negara. *Narasi Kita*. <https://www.narasikita.com/senjakala-tempo-bela-bigot-kpk-hina-simbol-negara/> diakses 4 April 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2018, 25 Oktober). 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menkopolhukam: Indeks Demokrasi Indonesia Naik. *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*. <https://polkam.go.id/4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-menkopolhukam-indeks-demokrasi-indonesia-naik/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2017, 9 Februari). Presiden Jokowi: “Stop berita bohong!”. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. https://kominfo.go.id/content/detail/9219/presiden-jokowi-stop-berita-bohong/0/sorotan_media
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019, 11 Maret). [Hoaks] innalillahi ternyata presiden sekarang sebenarnya Kristen dan pemerintahan sekarang dikuasai Kristen. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/17065/hoaks-innalillahi-ternyata-presiden-sekarang-sebenarnya-kristen-dan-pemerintahan-sekarang-dikuasai-kristen/0/laporan_isu_hoaks

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019, 29 Agustus). [Hoaks] Di Deiyai Aparat Hambur Tembakan, 6 Orang Tewas. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/20970/hoaks-di-deiyai-aparat-hambur-tembakan-6-orang-tewas/0/laporan_isu_hoaks
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019, 20 September). Pembatasan Akses Internet di Papua Sesuai Hukum. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/pembatasan-akses-internet-di-papua-sesuai-dengan-dasar-hukum/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, 8 September). [Hoaks] RUU Cipta Kerja Omnibus Law Hapus Pesangon. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. https://m.kominfo.go.id/content/detail/29991/hoaks-uu-cipta-kerja-omnibus-law-hapus-pesangon/0/laporan_isu_hoaks
- Kompas. (2014, 24 Maret). Jokowi: Macet dan Banjir Mudah Diatasi jika Jadi Presiden. *Kompas*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/24/1553111/Jokowi.Macet.dan.Banjir.Lebih.Mudah.Diatasi.jika.Jadi.Presiden>
- Kompas. (2022, 30 Mei). Hasil Pemilu 2004, Perolehan Suara Parpol dan Kursi DPR. *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/06160071/hasil-pemilu-2004-perolehan-suara-parpol-dan-kursi-dpr?page=all#google_vignette
- Kompas. (2020, 9 Oktober). Jokowi Sebut Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja karena Disinformasi dan Hoaks. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/17521861/jokowi-sebut-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-karena-disinformasi-dan-hoaks>
- Kontan. (2012, 26 Desember). Inilah Upaya Terobosan Jokowi Atasi Banjir DKI. *Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-upaya-terobosan-jokowi-atasi-banjir-dki>
- Kenny, P. D., & Holmes, R. (2020). A New Penal Populism? Rodrigo Duterte, Public Opinion, and the War on Drugs in the Philippines. *Journal of East Asian Studies*, 20(2), 187–205. <https://doi.org/10.1017/jea.2020.8>

- Kepolisian Republik Indonesia. (2020). Surat Telegram Kapolri nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020. Kepolisian Republik Indonesia.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2003). *Sembilan Elemen Jurnalisme* (Y S. Parianom, Penerj). Pantau. Karya original diterbitkan 2001.
- Kusnandar, V.B. (2021, 18 Agustus). Alokasi Anggaran Polri dalam RAPBN 2022 Naik 14,6%. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/alokasi-anggaran-polri-dalam-rapbn-2022-naik-146>
- Lakoff, G. P., & Duran G. (2018). How to report Trump Media Manipulation Language. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/13/how-to-report-trump-media-manipulation-language> diakses 30 Maret 2022.
- Lewandowsky, S., Stritzke, W., Freund, A. M., Oberauer, K., & Krueger, J. I. (2013). Misinformation, Disinformation, and Violent Conflict: From Iraq and the “War on Terror” to Future Threats to Peace. *American Psychologist*, 68(7), 487–501. <https://doi.org/10.1037/a0034515>
- Lincoln, B. (1989). *Discourse and Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification*. Oxford Universtiy Press.
- Liputan6. (2012, 26 Desember). Jokowi Nyemplung ke Gorong-gorong Buatan 1970-an. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/475140/jokowi-nyemplung-ke-gorong-gorong-buatan-1970-an>
- Liputan6. (2022, 10 Februari). 7 Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD Soal Insiden Desa Wadas. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4882727/7-pernyataan-menko-polhukam-mahfud-md-soal-insiden-desa-wadas>
- Liputan6. (2022, 8 Agustus). Pernyataan Benny Mamoto Viral Soal Insiden Brigadir J, Sebut Bharada E Juara menembak. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5036844/pernyataan-benny-mamoto-viral-soal-insiden-brigadir-j-sebut-bharada-e-juara-menembak>

- Malik, K. (2018). Persecution of the Roma brings shame on Europe. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/24/persecution-of-the-roma-brings-shame-on-europe> diakses 8 April 2021.
- Mallarangeng, R. (2010). *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Masha, N. (2020). *Jungkir Balik Pers: Masa Depan Pers dalam Pergumulan Internet of Things dan Konglomelarasasi Bisnis Media*. Republika Penerbit.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). *The Agenda-Setting Function of Mass Media*. *The Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <http://www.jstor.org/stable/2747787>. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Merdeka. (2012, 27 Desember). Jokowi Pejabat yang Rela Masuk Gorong-gorong. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-pejabat-yang-rela-masuk-gorong-gorong.html>
- Merdeka. (2014, 3 Juli). Jokowi: media terus manas-manasi, gimana relawan gak panas. *Merdeka*. <https://m.merdeka.com/politik/jokowi-media-terus-manas-manasi-gimana-relawan-gak-panas.html>
- Merdeka. (2022, 3 Oktober). Cuitan tak pantas akun Polsek Srandakan Soal Tragedi Kanjuruhan, Polisi Duga Diretas. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/cuitan-tak-pantas-akun-polsek-srandakan-soal-tragedi-kanjuruhan-polisi-duga-diretas.html>
- Miller, D. & Robinson, P. (2019). Propaganda, Politics and Deception. In *The Palgrave Handbook of Deceptive Communication* (Tony Docan-Morgan edited). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96334-1_50
- Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282. <https://doi.org/10.5509/2018912261>
- Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. *Government and Opposition*, 39(4), 541–563. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x>

- Mulyartono, S., Rafsadie, M. I., & Nursahid, A. (2017). *Rekayasa Kebencian dalam Konflik Agama: Kasus Tanjung Balai, Sumatera Utara*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Wakaf Paramadina.
- Nadzir, I. (2020). Conspiracy Theories and Modern Disjuncture Amidst the Spread of Covid-19 in Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 46(2), 150–167. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i2.909>
- Obor Rakyat. 2014. Capres Boneka, edisi 01, hal. 2-11 Mei 2014.
- Oetama, J. (1987). *Perspektif Pers Indonesia*. LP3S.
- Pambudi, H. J., Nugroho, A. L. A., Handoko, L., & Dianastiti, F. E. (2021). Buzzer di Masa Pandemi Covid-19: Studi Analisis Wacana Kritis Kicauan Buzzer di Twitter. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 75–89. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1265>
- Panjimas. (2017, 12 Februari). Berulang Kali Siarkan Berita Bohong, Metro TV Lagi-lagi Diusir Aksi Bela Islam. *Panjimas*. <https://www.panjimas.com/news/2017/02/13/berulang-kali-siarkan-berita-bohong-metro-tv-lagi-lagi-diusir-aksi-bela-islam/>
- Paul, C., & Matthews, M. (2016). The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. *Rand Corporation*. <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep02439.pdf>
- Pickard, V. (2020). Confronting the Misinformation Society: Facebook’s “Fake News” Is a Symptom of Unaccountable Monopoly Power. In M. Zimdars and K. McLeod (ed.), *Fake News: Understanding Media and Misinformation in the Digital Age*. *The MIT Press*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11807.003.0014>
- Power, T. P. (2018). *Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Portmess, L. (2018). ‘America’s Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opinions Trump Facts and Evidence’. In Prado, C. G. (ed.) *America’s Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opinions Trump Facts and Evidence*, 59–71. Praeger.

- Putri, B. U. (2018, 17 Desember). Prabowo: saya dituduh Islam garis keras, besoknya dibilang Zionis. *Tempo*. <https://pilpres.tempo.co/read/1156192/prabowo-saya-dituduh-islam-garis-keras-besoknya-dibilang-zionis/full&view=ok>
- Quandt, T., Frischlich L., Boberg S., & Tim Schatto-Eckrodt. (2019). Fake News. *The International Encyclopedia of Journalism Studies*. <https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0128>
- Qurtuby, S. A. (2013). *Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island, Islam and Christian–Muslim Relations*, 24(3), 349–367. <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.785091>
- Rafsadie, I., Kartika, D. A., & Mulyantoro, S. (2020). Rumour, identity and violence in contemporary Indonesia: evidence from elections in West Kalimantan, 326–345. In T. Power dan E. Warburton (ed.). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*. ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789814881524-021>
- Rasid, A. (2011). Pola Interaksi Pers, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila: Suatu Analisis Retrospektif. *Sosiohumaniora*, 13(2), 189–210. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5516>
- Remotivi (@remotivi). (2019, 5 September). Kalau Puspen TNI mengecap berita Reuters sebagai “hoax” <https://twitter.com/remotivi/status/1169605689133522944>
- Republika. (2012, 26 Desember). Jokowi Kecelek Lihat Gorong-gorong Dekat Bundaran HI. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/mfmwm1/jokowi-kecelek-lihat-goronggorong-dekat-bundaran-hi>
- Republika. (2017, 10 November). Mahfud MD: Indonesia Bukan Negara Agama dan Bukan Sekuler. *Republika*. https://khazanah.republika.co.id/berita/pl49ek320/mahfud-md-indonesia-bukan-negara-agama-dan-bukan-sekuler#google_vignette
- Republika. (2022, 21 Agustus). Polda Jabar: Saksi dan Tersangka Penganiayaan terhadap Purnawirawan TNI Sempat Berbohong. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rgy1rm428/>

polda-jabar-saksi-dan-tersangka-penganiayaan-terhadap-purnawirawan-tni-sempat-berbohong

- Retsikas, K. (2006). The semiotics of violence Ninja, sorcerers, and state terror in post-Soeharto Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI)*, 162(1), 56–94. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003674>
- Rianto, P. (2020). When Lying Becomes an Ordinary Things: Communication Ethics in the Post-Truth Era. *Indonesia Communication Journal*, 9(1), 57–63. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.11986>
- Rizki, R. (2018, 8 Agustus). “PBNU: Jika Bukan NU, Tak Ada Tanggung Jawab Menangkan Jokowi”. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808190440-32-320666/pbnu-jika-bukan-nu-tak-ada-tanggung-jawab-menangkan-jokowi>
- Ruangrupa. (2013, 15 Februari). Di Balik Frekuensi. <http://update.ruangrupa.org/2013/di-balik-frekuensi/>
- Sanjaya, M. (2019). Mengapa Metro TV Berani Mengabaikan Reuni 212. <https://www.remotivi.or.id/amatan/507/mengapa-metro-tv-berani-mengabaikan-reuni-212> diakses 4 April 2022
- Satrio, D. C. (2021, 16 Desember). Staf Ahli Menkominfo Banjir Sindiran, Bagikan Informasi Hoaks di Twitter, Polri Diminta Bertindak. *Tribunkaltara*. <https://kaltara.tribunnews.com/2021/12/16/staf-ahli-menkominfo-banjir-sindiran-bagikan-informasi-hoaks-di-twitter-polri-diminta-bertindak?page=4>
- Sindonews. (2012, 26 Desember). Jokowi masuk gorong-gorong HI. *Sindonews*. <https://metro.sindonews.com/berita/700875/31/jokowi-masuk-gorong-gorong-hi>
- Sindonews. (2019, 1 Maret). Jokowi: Tindak Tegas Pembuat dan Penyebar Hoaks. *Sindonews*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1383043/12/jokowi-tindak-tegas-pembuat-dan-penyebar-hoaks>
- Smith, C. Q. (2014). Illiberal peace-building in hybrid political orders: managing violence during Indonesia’s contested political

- transition. *Third World Quarterly*, 35(8), 1509–1528. <https://doi.org/10.1080/01436597.2014.946277>
- Smith, C. Q. (2020). Liberal and illiberal peace-building in East Timor and Papua: establishing order in a democratising state. *Conflict, Security & Development*, 20(1), 39–70. <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705068>
- Smith, C. Q., Waldorf, L., Venugopal R., & McCarthy, G. (2020). Illiberal peace-building in Asia: A comparative overview. *Conflict, Security & Development*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705066>
- Solopos. (2012, 26 Desember). MASUK KE GORONG-GORONG: Jokowi Sebut Gorong-Gorong Terlalu Kecil. *Solopos*. <https://www.solopos.com/masuk-ke-gorong-gorong-jokowi-sebut-gorong-gorong-hi-terlalu-kecil-362140>
- Starr, P. (2021). How We Become more vulnerable to disinformation in the Digital Era. In W. L. Benneth dan S. Livingston (ed.), *The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in The United States*. Cambridge University Press.
- Strick, B., & Syavira, F. (2019). Papua: Cara kerja jaringan bot penyebar hoaks soal Papua dengan biaya miliaran rupiah. *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49969337> diakses 22 Februari 2022.
- Sudibyo, A. (2009). Rekolonialisasi Ruang Publik: Anomali Dunia Penyiaran Pasca-2002. *Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 28(1), 55–65.
- Sukirno. (2019, 22 November). 5 Konglomerat Penguasa Media di Balik Jokowi. *Alinea*. <https://www.alinea.id/media/5-konglomerat-penguasa-media-di-balik-jokowi-b1Xqa9ppQ>
- Supriatma, A. M. T. (2009). Menguatnya Kartel Para “Bos”. *Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 28(2), 3–14.
- Supriatma, M. (2020). The Indonesian police’s dual function under Jokowi. <https://www.eastasiaforum.org/2020/10/06/the->

indonesian-polices-dual-function-under-jokowi/#more-304248 diakses 25 Oktober 2022.

- Suwardi, H. (1993). *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia: suatu studi komunikasi politik terhadap liputan berita kampanye pemilu 1987*. Pustaka Sinar Harapan.
- Tapsell, R. (2019). Indonesia's Policing of Hoax News Increasingly Politicised. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Tapsell, R. (2020). The media and democratic decline. In *Tomas Power & Eve Warburton (ed.) Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* 210–227. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Temby, Q. (2019). *Disinformation, Violence, and Anti-Chinese Sentiment in Indonesia's 2019 Elections*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Tempo. (2014, 3 Juli). Ini Kronologi Aksi Massa di Kantor TV One Yogya. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/590204/ini-kronologi-aksi-massa-di-kantor-tv-one-yogya/full&view=ok>
- Tempo. (2019, 16 September). Penjelasan Majalah Tempo soal sampul bergambar Jokowi. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1248507/penjelasan-majalah-tempo-soal-sampul-bergambar-jokowi/full&view=ok>
- Tempo. (2021, 16 April). Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya. *Tempo*. <https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya>
- The Jakarta Post. (2014, 4 Juli). Editorial: Endorsing Jokowi. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/07/04/editorial-endorsing-jokowi.html>
- Tirto. (2022, 6 September). DPR Setujui Tambahan Anggaran Polri 23,41 Triliun untuk 2023. *Tirto*. <https://tirto.id/dpr-setujui-tambahan-anggaran-polri-2341-triliun-untuk-2023-gvSH>
- Titscher, S., Mayer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana* (editor Abdul Syukur Ibrahim). Pustaka Pelajar

- Telle, K. (2016) Ritual Power: Risk, Rumours and Religious Pluralism on Lombok. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 419–438. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1206614>
- Tomsa, D. (2007). Party Politics and the Media in Indonesia: Creating in Indonesia: Creating a New Dual Identity for Golkar. *Contemporary Southeast Asia*, 29(1), 77–96. <http://www.jstor.org/stable/25798815>
- Tribunnews. (2012, 26 Desember). Gubernur Jokowi Masuk Gorong-gorong. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/12/26/gubernur-jowoki-masuk-gorong-gorong>
- Tribunnews. (2019, 8 Januari). Irjen pol. Suntana Paparkan Bahaya Penyebaran Disinformasi di Media Sosial. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/08/irjen-pol-suntana-paparkan-bahaya-penyebaran-disinformasi-di-media-sosial>
- Tribunnews. (2022, 12 Juli). Kapolres Jaksel Sebut Status Bharadae E yang Tembak J Hingga Tewas, Sebatas Saksi. *Tribunnews*. <https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/12/kapolres-jaksel-sebut-status-bharada-e-yang-tembak-brigadir-j-hingga-tewas-sebatas-saksi>
- Ubaidillah. (2015, 23 Januari). Blusukan: Ilusi Kedaulatan Rakyat di Media. *Indoprogres*. <https://indoprogres.com/2015/01/blusukan-ilusi-kedaulatan-rakyat-di-media/>
- Ubaidillah. (2019a). Resignification: Wacana balik orang Papua dalam menanggapi rasisme. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(3), 327–340. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i3.876>
- Ubaidillah. (2019b, 7 Agustus). Belajar dari “El Paso”. *Detik*. <https://news.detik.com/kolom/d-4656004/belajar-dari-el-paso>
- Ubaidillah dan Hartanto, A. (2020). Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3), 353–366. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1107>
- Ubaidillah. (2020, 15 Juni). Cina dalam benak Generasi Z: Tinjauan Awal. *PMB LIPI*. <https://pmb.brin.go.id/cina-dalam-benak-generasi-z-sebuah-tinjauan-awal/>

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. (1982). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47032/uu-no-21-tahun-1982>
- Universitas Gadjah Mada. (2018, 23 Agustus). Mahfud MD Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>
- Viva. (2012, 26 Desember). Masuk Gorong-gorong MH Thamrin, Jokowi tercengang. *Viva*. <https://www.viva.co.id/berita/metro/377616-masuk-gorong-gorong-mh-thamrin-jokowi-tercengang>
- VOA Indonesia. (2017, 14 Juli). Jokowi: Islam Radikal Bukan Islam Indonesia. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-islam-radikal-bukan-islam-indonesia-/3943369.html>
- Van Dijk, T. A. (1991). *Racism and the Press*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315682662>
- Walter, N., Cohen, J., Holber, R. L., & Morag, Y. (2019) ‘Fact-Checking : A Meta-Analysis of What Works and for Whom. *Political Communication*, 37(3), 350–375. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1668894>
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2018). Thinking about ‘information disorder’: formats of misinformation, disinformation, and mal-information. In *Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation* (Cherilyn Ireton dan Julie Posetti, ed), 43–54. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Warta Ekonomi. (2022, 8 Maret). Denny Siregar Terserat Dugaan Ujaran Kebencian, Bagaimana Kabar Kasusnya di Polda. *Warta Ekonomi*. <https://wartaekonomi.co.id/read397990/denny-siregar->

terseret-dugaan-ujaran-kebencian-bagaimana-kabar-kasusnya-di-polda

- Widjajanti, Widyawati, N., Katubi, Warsilah, H., Aribowo, S., & Muchtar, R. (2011). *Cyberdemokrasi, Wacana Korupsi: Kasus Cicak dan Budaya* (Widjajanti, ed.). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Widyawati, N., Muchtar, R., Hanim, M. S., Rochmawati, & Hadi, A. (2009). *Analisis Framing terhadap political talk di media massa pada Pemilihan Umum Legislatif 2009*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Wilson, C. (2015). *Illiberal democracy and violent conflict in contemporary Indonesia*. *Democratization*, 22(7), 1317–1337. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.949680>
- Wilson, C. (2020). Illiberal Peacebuilding in India and Indonesia: The Dangers of the Hybrid Approach. In Y. Uesugi (ed.), *Hybrid Peacebuilding in Asia*, 115–138. Palgrave Pivot, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18865-8_6
- Wodak, R. (1989). *Introduction. Language, Power, and Ideology: Studies in Political Discourse* (R. Wodak, ed.). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/ct.7>
- Wodak, R. (2001a). *What CDA is about*. In *Methods of Critical Discourse Analysis* (R. Wodak dan M. Meyer, ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>
- Wodak, R. (2001b). *The Discourse-Historical Approach*. In *Methods of Critical Discourse Analysis*, 1, 63–94. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>
- Wodak, R. (2009). *The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual*. Palgrave Macmillan.
- Ylä-Anttila, T. (2018). Populist knowledge: ‘Post-truth’ repertoires of contesting epistemic authorities. *European Journal of Cultural and Political Sociology*, 5(4), 356–388. <https://doi.org/10.1080/23254823.2017.1414620>

YLBHI. (2022, 10 Februari). Rilis Pers Koalisi Serius Revisi UU ITE terkait Kasus Wadas. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-pers-koalisi-serius-revisi-uu-ite-terkait-kasus-wadas/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

TENTANG PENULIS



Ubaidillah menamatkan pendidikan sarjana di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto tahun 2013 dan pendidikan magister Linguistik di Universitas Gadjah Mada pada 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan, kemudian bergabung menjadi peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2019 yang kini bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Penulis menekuni kajian mengenai saling pengaruh antara bahasa dan kekuasaan dalam memeriksa perubahan sosial, budaya, dan agensi. Sejak 2020 sampai sekarang menjadi anggota tim penelitian ‘*Penanganan Disinformasi dan Keamanan Siber*’ di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya. Pada 2023 menjadi koordinator tim riset ‘*Model Penanganan Disinformasi Berbasis Local Knowledge: Debunking dan Prebunking*’. Anggota tim riset untuk ‘*Tradisi Lisan Lego-Lego Orang Abui di Pulau Alor Nusa Tenggara Timur: Ekspresi Simbolik Kebudayaan dan Daya Hidupnya*’ (2022) dan menjadi koordinator tim riset ‘*Wacana Etnoreligius: Trauma Kultural Masyarakat Banda Neira*’ (2022). Koordinator tim riset ‘*Keterlibatan Politik Digital Generasi Z di Indonesia*’ (2024)

Publikasi ilmiah yang telah diterbitkannya antara lain: *Ritual dan Narasi Tradisi Lego-Lego Suku Abui: Dinamika Perubahan dan Kestinambungan Ritus Sakral di Era Wisata Budaya* (2023) ditulis bersama Katubi dan *Cirebon and Geertz's Trichotomy: Exploration of Anti-Structure Folklore in Javanese Culture* (2023) yang ditulis bersama Agus Susanto; *Disinformation and Tradition as Prebunking: The Case of Javanese Culture* ditulis bersama Widjajanti M. Santoso, Nina Widyawati, Ana Windarsih, Ikbal Maulana, Al Araf, dan Vience (2022); *Kerata Basa: Gramatika Budaya Masyarakat Jawa* (2022); *A Directive Speech Act of Hate Speech on Indonesian Social Media* bersama I Dewa Putu Wijana (2021); *Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana* ditulis bersama Arief Hartanto (2020); *Resignification: Wacana Balik Orang Papua dalam Menanggapi Rasisme* (2019); *Peran Agama dalam Ujaran Kebencian, Sumber atau Target?* (2019); *Penggunaan Kata Jamu dan Herbal dan Sistem Pengetahuan Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Antropologis Teks Politik Indonesia* (2017). Tulisannya yang lain pun dapat ditemukan di Indoprogres, The Conversation Indonesia, Detik.com, Ibtimes.com, Harian Kompas, Geotimes, dan Alif.id. Penulis dapat dihubungi melalui surel 23ubaid@gmail.com atau ubaidillah@brin.go.id.

INDEKS

- Berita, 29, 43, 46
- Cek fakta, 45
- Cipta Kerja, 55, 56, 57, 59, 84, 85, 102
- Hakekat, 20
- Identitas, 98
- Illiberal, 79, 95, 99, 107, 111
- Internet, 78, 94, 95, 103
- Jokowi, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 56, 66, 67, 73, 74, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110
- Jurnalisme, 47, 97, 102
- Kabupaten Sumbawa, 71, 72, 77, 81
- Kominfo, 53, 54, 56, 58, 59, 84, 101
- Konflik, 104
- Literasi digital, 18, 91
- Media massa, 22, 42, 47
- Misinformasi, 10
- Narasi, 37, 38, 66, 78, 83, 88
- Partai Komunis Indonesia, 5, 50, 73
- Pemilu, 27
- Pencitraan, 32, 33
- Pers, 19, 20, 21, 36, 47, 49, 50, 53, 73, 97, 103, 104, 105, 108, 112
- Polarisasi, 5, 6, 32, 45
- Polisi, 59, 72, 103, 108
- Populisme, 34, 99
- Prabowo, 5, 36, 37, 39, 41, 45, 105
- Protes, 62
- Rumor, 73, 74, 81, 86, 88
- Tanjung Balai, 70, 73, 77, 83, 104
- Teks, 114
- Tentara Nasional Indonesia, 57
- Twitter, 54, 61, 63, 65, 76, 78
- Viral, 96
- Wacana, 82, 97, 110, 111, 113, 114

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Media sosial sebagai salah satu jalur diseminasi informasi memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran hoaks. Data dari Kominfo pada bulan September 2019 menyebutkan bahwa pada periode Agustus 2018 sampai September 2019 ditemukan sebanyak 3.356 hoaks. Dari jumlah itu, bidang politik dan pemerintah mendominasi isi konten hoaks tersebut. Hoaks terkait isu politik dan pemerintah juga sempat mewarnai peristiwa Pemilu Tahun 2019 dan membuat masyarakat menjadi resah dan tidak tenang dalam menghadapi pemilu.

Buku *Politik Hoaks dan Hoaks Politik di Indonesia* ini hadir sebagai wujud dari keresahan penulis selaku akademisi ketika melihat maraknya peredaran hoaks pada saat Pemilu 2019. Ditulis berdasarkan hasil penelitian selama tiga tahun, buku ini memberikan gambaran mengenai akar dari proses produksi dan penyebarluasan hoaks di masyarakat serta diskusi mengenai disinformasi yang menjadi arena perebutan legitimasi kebenaran informasi publik oleh negara dan media.

Semoga terbitnya buku ini bisa menggugah masyarakat untuk bisa bersikap bijak dan berpikir kritis dalam menghadapi masifnya informasi yang diperoleh, khususnya lewat media sosial.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.790



ISBN 978-623-8372-60-7

